

**MANAJEMEN EKOWISATA BERBASIS
MASYARAKAT DI DESA WISATA PUJON
KIDUL KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Rachmat Hidayat
NIM. 135030107111045**



Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin

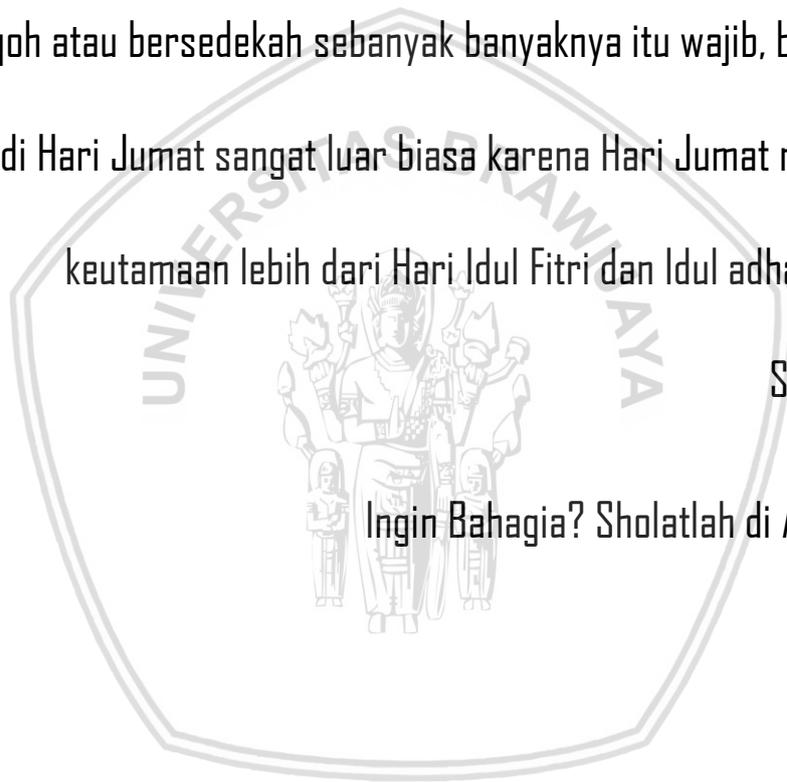
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2018**

MOTTO

Sodaqoh atau bersedekah sebanyak banyaknya itu wajib, bersedekah di Hari Jumat sangat luar biasa karena Hari Jumat mempunyai keutamaan lebih dari Hari Idul Fitri dan Idul adha sekalipun

Subhanallah

Ingin Bahagia? Sholatlah di Awal Waktu



HALAMAN PERSEMBAHAN



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul
Kabupaten Malang

Disusun oleh : Rachmat Hidayat

NIM : 135030107111045

Fakultas : Ilmu Administrasi

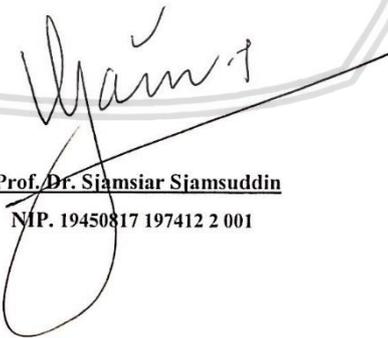
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 25 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Samsiar Samsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001



TANDA PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

- Hari : Kamis
- Tanggal : 07 Juni 2018
- Pukul : 09.00 WIB
- Skripsi atas nama : Rachmat Hidayat
- Judul : Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

Dan dinyatakan LULUS
MAJELIS PENGUJI
Ketua,

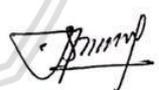

Prof. Dr. Samsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001

Anggota,



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP, Ph.D
NIP. 2011078312041001

Anggota,



Siswidiyanto, Dr, Drs, MS
NIP. 19600717 198601 1 002



PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, sert diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 26 April 2018



Nama : Rachmat Hidayat
NIM : 135030107111045

RINGKASAN

Rachmat Hidayat, 2018, **Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang**, Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan konsep ekowisata dengan kecenderungan melihat dimensi sosial kemasyarakatan yang ada. Sehingga masyarakat harus memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaannya dan harus mendapatkan manfaat paling besar dari diselenggarakannya ekowisata. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang dan untuk mendeskripsikan serta menganalisis apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Situs penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Desa Wisata Pujon Kidul. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Metode analisa data yang dilakukan mulai dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa Manajemen ekowisata yang digunakan menurut Iwan Nugroho (2011) terdapat lima aspek yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif, keterlibatan penduduk lokal, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kemampuan penduduk lokal. Selain itu terdapat juga faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang, faktor pendukung adanya komitmen yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, dan pemberitaan dari media massa. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata.

Saran perlunya pengemasan menarik paket wisata yang berwawasan edukatif dan konservasi bagi para wisatawan sehingga dapat menambah wawasan masyarakat maupun wisatawan dan meningkatnya ekonomi lokal di desa wisata pujon kidul. Serta perangkat desa harus mau untuk membekali diri dengan wawasan mengenai desa wisata agar mampu berperan aktif untuk menggerakkan masyarakatnya dalam pengembangan desa wisata.

SUMMARY

Rachmat Hidayat, 2018, **Ecotourism Management Society Based in Desa Wisata Pujon Kidul Malang Regency** Advisor: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin

Ecotourism society based is an ecotourism concept with tendency of seeing the existing social dimension. The society has to be involved in its development and management, and also they have to gain the greatest advantage of it. The purpose of this research is to discover and describe how the Ecotourism Management Society Based in Desa Wisata Pujon Kidul Malang Regency is and to analyze the supporting and obstructing factors in Ecotourism Management Society Based in Desa Wisata Pujon Kidul Malang Regency.

This research uses descriptive research method with qualitative approach. The research site is Department of Tourism and Culture of Malang Regency and Desa Wisata Pujon Kidul. This research uses observation, interview, documentary, and triangulation as the data collection techniques. The data analysis method done is starting from data condensation, data presentation, and conclusion withdrawal.

The result of this research is according to Nugroho there are five aspects of the used Ecotourism Management, they are specific marketing that leads up to the tourist destination, intensive skill and service to the visitors, the local resident's involvement, government policy, and the local resident's skill development. Besides that, there are also supporting and obstructing factors in Ecotourism Management Society Based in Desa Wisata Pujon Kidul Malang Regency. The supporting factors are there is well commitment from both local government and the society to develop tourism village and mass media reporting, while the obstructing factors are the lacks of infrastructure in the tourism village and the society's low skill in managing tourism potential.

The suggestion is it is necessary to make interesting packaging of educational perspective and conservation tourism packages in order to add the insight of the society and the visitors. It also helps the society to increase the local economic of Desa Wisata Pujon Kidul. In addition, the village community has to be able to equip themselves with the insight about tourism village to take the role actively for stirring the society in developing the tourism village.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang”** yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya., MDA., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin., M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Ibu Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya Dosen Jurusan Administrasi Publik yang selama ini telah memberikan dan menularkan kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian skripsi ini.
7. Bu Nobi selaku Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang telah



- memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat
8. Bu Lani Selaku Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat
 9. Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat
 10. Pak Badur Selaku anggota Pengelola Desa Wisata Pujon Kidul yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat
 11. Para responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini
 12. Teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi dan teman-teman seperjuangan publik 2013 yang telah memberikan masukan baik kritik maupun saran serta semangat untuk bersama-sama menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Mei 2018

Penulis,

Rachmat Hidayat

DAFTAR ISI

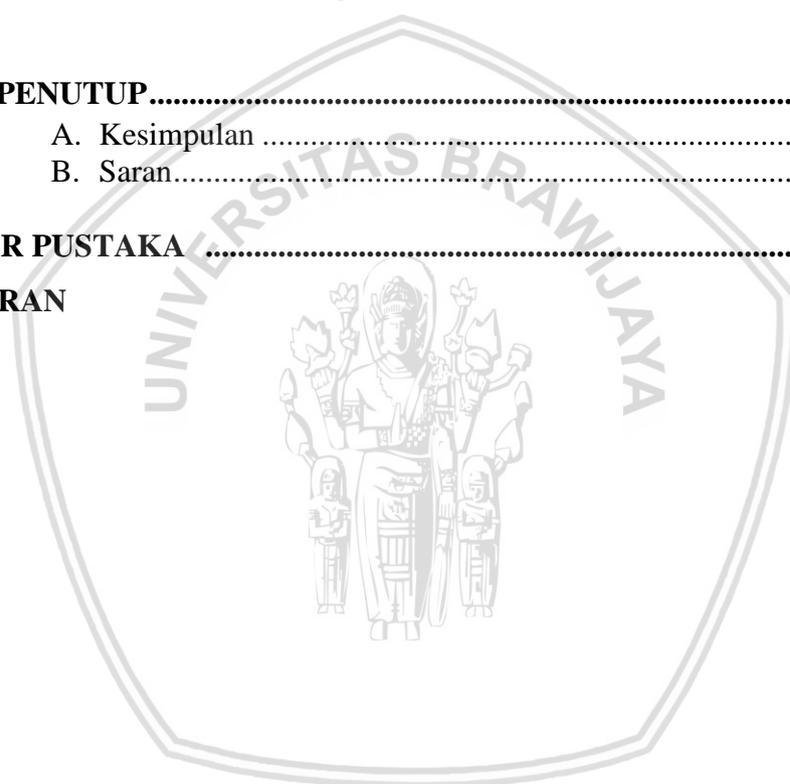
	Halaman
MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Administrasi Publik.....	13
B. Administrasi Pembangunan.....	14
C. Pariwisata.....	19
1. Pengertian Pariwisata	19
2. Bentuk Pariwisata.....	21
3. Jenis Pariwisata	23
4. Tujuan Pariwisata.....	24
5. Potensi Pariwisata	25
D. Konsep Ekowisata	25
1. Definisi Ekowisata	25
2. Perspektif Ekowisata	27
3. Elemen Penting Ekowisata.....	28
4. Prinsip dan Kriteria Ekowisata.....	29
5. Pengembangan Ekowisata.....	35
6. Strategi Program Pengembangan Ekowisata.....	43
E. Ekowisata Berbasis Masyarakat	43
F. Desa Wisata.....	46
1. Pengertian Desa Wisata.....	46
2. Kriteria Desa Wisata	50
3. Persyaratan Desa Wisata	50



G.	Pembangunan Desa	51
1.	Definisi Pembangunan	51
2.	Definisi Desa	52
3.	Definisi Pembangunan Desa	52
4.	Tujuan Pembangunan Desa	52
5.	Prinsip Pembangunan Desa	53
6.	Perencanaan Pembangunan Desa	54
7.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	54
BAB III	METODE PENELITIAN	55
A.	Jenis Penelitian	55
B.	Fokus Penelitian	56
C.	Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	57
D.	Sumber Data dan Jenis Data	58
E.	Teknik Pengumpulan Data	60
F.	Instrumen Penelitian	62
G.	Uji Keabsahan Data	63
H.	Analisis Data	65
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A.	Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian	68
1.	Gambaran Umum Kabupaten Malang	68
2.	Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang	77
3.	Gambaran Umum Desa Pujon Kidul	88
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian	106
1.	Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang	106
a)	Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata	106
b)	Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif	113
c)	Keterlibatan Penduduk Lokal	115
d)	Kebijakan Pemerintah	118
e)	Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal	122
2.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang	124
a)	Faktor Pendukung	124
b)	Faktor Penghambat	128
C.	Analisis Data Penelitian	131
1.	Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang	131
a)	Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata	132

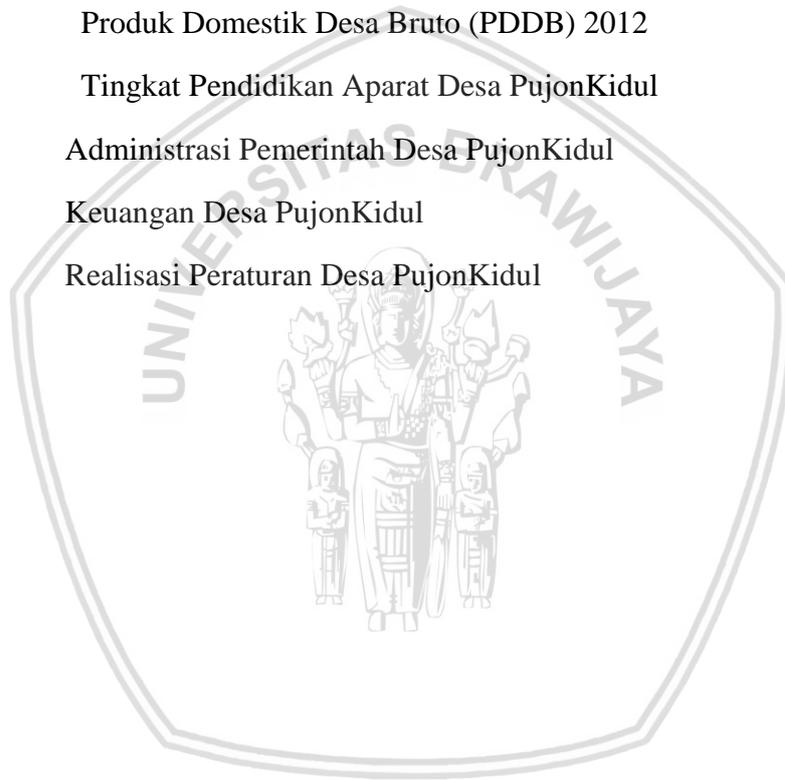


b) Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif	136
c) Keterlibatan Penduduk Lokal	137
d) Kebijakan Pemerintah	139
e) Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal	143
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang	145
a) Faktor Pendukung	145
b) Faktor Penghambat.....	146
BAB V PENUTUP.....	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	151
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	92
2.	Tamatan Sekolah Masyarakat Desa PujonKidul	94
3.	Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya	97
4.	Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) 2012	101
5.	Tingkat Pendidikan Aparat Desa PujonKidul	102
6.	Administrasi Pemerintah Desa PujonKidul	103
7.	Keuangan Desa PujonKidul	104
8.	Realisasi Peraturan Desa PujonKidul	105



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif	66
2.	Peta Kabupaten Malang	68
3.	Peta Desa Wisata PujonKidul	88
4.	Paket Wisata di Desa Wisata PujonKidul	109
5.	Gapura dan Penunjuk Arah ke Desa Wisata PujonKidul	120
6.	Pemberitaan dari Media Televisi	127
7.	Akses Menuju Desa Wisata PujonKidul	129



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Halaman
1.	Surat Riset	2
2.	Instrumen Penelitian	1
3.	Dokumentasi Peneliti	4
4.	Curriculum Vitae	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu sektor yang saat ini diperhitungkan sebagai aspek yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara melalui perolehan devisa. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah bermacam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa tujuan dari kepariwisataan antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk citra tanah air
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuang bangsa
- j. Mempercepat persahabatan antar bangsa

Berdasarkan tujuan dari kepariwisataan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, diharapkan bahwa sektor pariwisata akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menghapus kemiskinan yang saat ini merupakan masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Tanah yang subur menjadi salah satu faktor sehingga segala jenis tanaman dapat tumbuh baik didukung dengan iklim tropisnya, semua kekayaan alam dan hayati merupakan aset yang tidak ternilai. Kekayaan daratan dan perairan baik perairan darat maupun perairan laut selayaknya harus dilestarikan. Pelestarian alam dan sumber daya hayati ini secara berkelanjutan dalam jangka panjang sangat penting, karena kelestarian hidup di masa depan bergantung pada kelestarian alam dan lingkungan. Sehubungan dengan upaya-upaya pelestarian itu, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna melindungi kekayaan alam yang luar biasa ini melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Selain upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah, potensi kekayaan alam dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah tersebut dikelola dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera tersebut maka adanya upaya dari pemerintah

yaitu dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan dan perubahan yang berencana kepada setiap masyarakatnya secara merata dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya-upaya pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan sumber daya alam ini tentu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, setiap daerah otonom di negara ini diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memutuskan bahwa hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah di era otonomi daerah memiliki peranan yang lebih besar dalam upaya-upaya pelestarian kekayaan hayati ini harus lebih banyak lagi melibatkan partisipasi masyarakat daerahnya. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara terintegrasi pada semua sektor, sehingga diperoleh manfaat yang lebih besar dari berbagai potensi ekonomi daerah. Selain itu, perencanaan yang terintegrasi juga akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diharapkan baik pada saat ini maupun yang akan datang. Sehingga setiap daerah dituntut untuk bersaing secara kompetitif untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan menggali serta mengembangkan potensi daerahnya khususnya pertanian,

kelautan, industri, dan pariwisata guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga dapat membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata;
- Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Mendorong pendayagunaan produksi nasional

Pengembangan potensi sektor pariwisata sering kali dikaitkan dengan peranannya sebagai salah satu kekuatan dari sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah pada saat ini, dimana masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah atau bisanya sektor pariwisata pengembangannya lebih kepada usaha peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin pembangunan disuatu daerah otonom.

Pengembangan pariwisata pada daerah tujuan wisata diharapkan dapat mampu melestarikan kelestarian akan adat istiadat serta budaya lokal dan mampu memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat di daerah tujuan wisata. Sesuai dengan pengertian ekologi administrasi publik, menurut Dalton E. 1970 dalam Makmur (2009,h.3) berpendapat bahwa ekologi adalah suatu konsep yang dipinjam dari bidang biologi, dimana istilah tersebut mengacu kepada studi organism dalam kaitannya dengan lingkungan. S. Pamudji 2000 dalam Makmur (2009, h.14), mengungkapkan bahwa ekologi administrasi publik berfungsi sebagai perangsang para administrator (aktor) untuk berusaha dan sekaligus menerima hasil kerja. Ekologi semacam ini merupakan lingkungan hidup administrasi public yang mempunyai faktor yang bersifat fisik alamiah dan faktor sosial masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang harus dipecahkan oleh pembuat kebijakan dan sebaliknya juga membantu mengatasi masalah tersebut. Adanya pengembangan secara fisik serta arus keluar masuk wisatawan sedikit banyak akan membawa pengaruh pada masyarakat lokal, sehingga diperlukan perhatian sejak dini akan dampak pengembangan pariwisata disuatu daerah tempat tujuan wisata guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu menjaga kelestarian nilai budaya dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Malang diperlukan sebagai usaha baik yang memungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Semakin pesatnya pengembangan pada saat ini yang mana tentunya sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam mengembangkan potensi

wisata selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Kabupaten Malang Khususnya.

Jenis pariwisata yang kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dikembangkan Indonesia saat ini adalah wisata alam, wisata cagar alam, wisata yang memperhatikan konservasi alam yang kemudian dikenal dengan konsep Ekowisata. Tujuan dari penancangan konsep tersebut adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam melestarikan alam dan warisan budaya serta pengembangan Ekowisata. Ekowisata adalah konsep yang mengkonsepkan kombinasi antara kepentingan industri kepariwisataan dengan pecinta lingkungan. Sejalan dengan konsep tersebut pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah.

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tersebut akan menjamin tercapainya sasaran yakni pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya konservasi. Kabupaten Malang memiliki potensi wisata yang menjanjikan bagi pemerintah untuk menambah pendapatan daerah. Saat ini peningkatan investasi ke dalam wilayah Kabupaten Malang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya guna mengembangkan objek-objek wisata di Kabupaten Malang.

Pengembangan Ekowisata juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan wisatawan yang pada umumnya berasal dari Kota, menginginkan suasana baru di pedesaan atau di alam yang jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk Kota. Jawa Timur dengan wilayah daerah yang sangat luas, memiliki potensi berupa lahan yang cukup luas dan iklim yang mendukung untuk dikembangkan program Ekowisata. Namun menurunnya kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur kian hari semakin memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara, air, meningkatnya aktivitas industri dan pertanian. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian khususnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dampak positif dengan adanya pengembangan Ekowisata ini seperti menambah pemasukan daerah yang bertujuan untuk investasi sarana dan prasarana serta melaksanakan program-program pembangunan dan mengentaskan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat sekitar memiliki potensi bisnis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan wisata. Akan tetapi dibalik itu semua terdapat dampak negatif jika pemerintah tidak dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan muncul akibat pengembangan pariwisata yang pesat tersebut antara lain adalah tergeser sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan dan tingginya tingkat perbedaan pendapatan pada setiap masyarakat. Selain itu juga tingginya tingkat perbedaan pendapatan di tiap masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kecakapan beberapa kelompok masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan peluang usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan daerah, hal tersebut terjadi

karena kurangnya modal atau pengetahuan dari masyarakat itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kelompok masyarakat di Kabupaten Malang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang pengetahuan dan jaringan.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya dapat melakukan beberapa hal guna menanggulangi dampak negatif tersebut, antara lain dengan penguatan konsep Ekowisata yang perlu diintensifkan guna menciptakan sebuah model wisata baru yang dekat dengan alam serta lingkungan sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini keunikan tradisi dan kebiasaan lokal hendaknya dapat diangkat secara lebih matang di wilayah Kabupaten Malang. Ekowisata adalah kegiatan alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Dengan dikembangkannya Ekowisata di kawasan Desa Wisata Pujon Kidul menumbuhkan banyak harapan bagi masyarakat, terutama harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin ramainya wisatawan yang berkunjung mampu membuka kesempatan kerja yang semakin luas dan juga telah menumbuhkan harapan dan cita-cita munculnya peluang meningkatkan pendidikan, karena penambahan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka sehingga anak-anak tersebut mempunyai kesempatan lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi, ataupun instansi yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu :

1. Kontribusi Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Ekowisata, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
- b. Sebagai salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mempunyai tema atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat, dimana hal ini penting untuk kesejahteraan rakyat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraannya.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Pariwisata di Kabupaten Malang dan

Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon
Kidul Kabupaten Malang

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan, seperti mengenai Konsep Ekowisata, Ekowisata Berbasis Masyarakat, Desa Wisata dan Pembangunan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yaitu penggambaran instansi dan lokasi penelitian yang bersangkutan beserta masalah secara kronologis menurut tujuan penelitian, serta bagaimana Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan yang dapat dijadikan pertimbangan dan bermanfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang dalam mengembangkan desa wisata.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Lokus dari ilmu administrasi (*interest*) dan urusan publik (*public affair*). Sedangkan fokus dari ilmu administrasi publik yaitu teori organisasi dan ilmu manajemen.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal administrasi, dikarenakan banyak anggota masyarakat yang telah melakukan hubungan kerja dengan kantor pemerintahan. Namun demikian istilah administrasi saat ini tidak hanya digunakan pada kantor pemerintahan, tetapi juga digunakan pada kantor non pemerintah karena administrasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi menurut Siagian dalam Pasolong (2007:3), “merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik merupakan “proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu:

1. Administrasi merupakan suatu proses kerjasama.
2. Proses kerjasama tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara rasional.
3. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ketiga persamaan tersebut merupakan syarat atau faktor penyebab terjadinya administrasi. Tanpa adanya salah satu faktor itu maka tidak akan terjadi administrasi.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi

karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara

langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Mostopadidjaya dalam affudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik

b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan yang efektif.

C. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (2003:5) pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagipula pariwisata sebagai sektor yang kompleks, meliputi industry-industri dalam arti

klasik seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan serta transportasi.

Menurut Sammeng (2001:1) kata wisata dan wisatawan termasuk sudah menjadi pembendaharaan Bahasa Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan wisata adalah 1. Berpakaian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya), 2. Piknik. Wisatawan = orang yang berwisata, pelancong, turis. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:49-50) kepariwisataan memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansial yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya yakni bagaimana perkembangannya dari mulai direncanakan, dikelola sampai dipasarkan pada pembeli yaitu wisatawan.

Menurut Suwanto (2004:3) bahwa pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses kegiatan sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan bepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan atau karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Sedangkan menurut Yoeti (2008:8) pariwisata memenuhi empat kriteria di bawah ini yaitu :

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ketempat yang lain. Perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.

2. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih, kecuali bagi *excursionist* (kurang dari 24 jam).
3. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang tanpa mencari nafkah dinegara, kota yang dikunjungi.
4. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana ia biasanya tinggal atau berdiam dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari pakar di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu yang bersifat kompleks dengan melibatkan kegiatan manusia di sebuah obyek wisata yang berupa sarana dan prasarana kondisi wisata dan lain sebagainya.

2. Bentuk Pariwisata

Menurut Pendit (2002:37) bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang digunakan. Bentuk-bentuk pariwisata tersebut dijelaskan dibawah ini:

a. Menurut asal wisatawan

Wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan.

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, hal ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara keluar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

c. Menurut jangka waktu

Kedatangan seseorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut,

pariwisata kereta api, pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat, mobil, kereta api, kapal laut atau mobil.

3. Jenis Pariwisata

Menurut Spillane (1991:28-31) jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu, untuk menikmati keindahan alam, dan lain-lain.

b. Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultur Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup rakyat, dan lain-lain.

d. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*), dibagi menjadi:

1. *Big sport events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.
2. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri, seperti pendaki gunung, rafting, berburu, dan lain-lain

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini seperti industri pariwisata, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instansi teknis yang bahkan menarik orang-orang luar profesi ini.

f. Pariwisata untuk berkonveksi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis wisata ini makin lama makin penting. Konveksi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara.

4. Tujuan Pariwisata

Tujuan pariwisata telah dijabarkan oleh para ahli di bidang pariwisata sebagai optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber daya pariwisata. Daerah tujuan wisata menurut Surjanto dalam Karyono (1997:11) yaitu daerah-daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata diharuskan memiliki objek wisata dan daya tarik wisata (atraksi wisata) sebagai media untuk menarik minat wisatawan.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik

maka justru akan membawa kerugian atau berdampak negatif bagi daerah tempat pariwisata.

5. Potensi Pariwisata

Definisi potensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994:576) potensi adalah kesanggupan, daya dan kemampuan untuk lebih berkembang. Sedangkan menurut Pendit (2004:117) menyebutkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dibagi 2 yaitu:

- a. Potensi Budaya**
Merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, mata pencaharian, kesenian dan budaya.
- b. Potensi Alamiah**
Merupakan potensi yang ada di masyarakat, yang berupa potensi fisik dan geografi seperti alam.

Jadi yang dimaksud potensi wisata adalah segala hal dan keadaan baik dan nyata dan dapat diraba maupun yang tidak meraba, yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai kemampuan, faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa-jasa (Darmadjati, 2001:128).

D. Konsep Ekowisata

1. Definisi Ekowisata

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata

yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (Fandeli dan Mukhlison, 2005).

Ekowisata dapat di definisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan yang mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan yang konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Dirjen Pariwisata, 1995). Masyarakat ekowisata Indonesia pada tahun 1977 mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami dimana tujuannya untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap udaha-usaha konservasi alam serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata.

Batasan tentang ekowisata juga diberikan oleh beberapa organisasi atau pakar luar negeri seperti :

- a. Australian National Ecotourism Strategy, 1994 :

Ekowisata adalah wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan.

- b. Alam A. Leq, Ph.D the Ecotourism Market in The Asia Pacific Region, 1996: Ekowisata adalah kegiatan petualangan, wisata alam, budaya dan alternatif yang mempunyai karakteristik.
- c. Hector Cebollos Lascuarin, 1987

Ekowisata adalah kealam perawan yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan tujuan khusus mempelajari, mengagumi, serta perwujudan bentuk budaya yang ada di dalam kawasan tersebut.

Ekowisata yang berasaskan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan prinsip yang penting dalam visi ekowisata, ditambah dengan pembedayaan masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi landasan pengembangan untuk merumuskan misi. Misi ekowisata dapat dijabarkan melestarikan alam dengan mengkonversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Penciptaan lapangan kerja setempat, pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan pendapatan lokal maupun regional secara adil, dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan ekowisata yang menentukan kewilayahannya berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaannya.

2. Perspektif Ekowisata

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Berdasarkan Damanik dkk. (2006) selanjutnya disebutkan ada tiga perspektif ekowisata yaitu :

- a. Ekowisata sebagai produk yaitu semua astraksi yang berbasis pada sumberdaya alam.
- b. Ekowisata sebagai pasar yaitu perjalanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.

- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yaitu metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

3. Elemen Penting Ekowisata

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak definisi, yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada 5 (lima) elemen penting, yaitu :

- a. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai pelayanan yang prima.
- b. Memperkecil dampak negatif yang bias merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.
- c. Mengikutsertaka masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- d. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan).
- e. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari elemen ekowisata tersebut, terdapat beberapa cakupan ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta upaya dalam kegiatan konservasi.

4. Prinsip dan Kriteria Ekowisata

Pengembangan ekowisata di dalam hutan yang tidak mengenal kejenuhan pasar, dapat menjadikan wisata alam sebagai salah satu tujuan wisata. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata, untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan (Fandelli, 2005). Menurut Damanik dkk. (2006), prinsip-prinsip ekowisata antara lain :

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Mengembangkan kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat, melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek ekowisata.
- d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.

- e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal, dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- f. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Dalam pengembangan ekowisata, diperlukan sebuah dukungan khusus dalam pengadaan produk wisata, yang dapat menjadi bahan pertimbangan wisatawan. Wisatawan dengan minat khusus, umumnya memiliki latar belakang intelektual yang lebih baik, pemahaman serta kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai tertentu, sehingga bentuk dari wisata ini adalah untuk mencari pengalaman baru (Fandeli dkk., 2005).

Secara umum, basis pengembangan wisata minat khusus menurut Fandeli dkk. (2005) yaitu :

- a. Aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam atau taman nasional.
- b. Objek dan daya tarik wisata budaya yang meliputi budaya peninggalan sejarah dan budaya kehidupan masyarakat. Potensi ini selanjutnya dapat dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah, wisata pedesaan

dan sebagainya. Wisatawan memiliki minat untuk terlibat langsung dan berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat, serta belajar berbagai hal dari aspek-aspek budaya yang ada.

Prinsip, pengembangan dan kriteria Ekowisata yang disusun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Ecotourism Network (INDECON), yang secara konseptual menekankan beberapa prinsip dasar, yaitu :

- a. Prinsip Konservasi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam. Prinsip konservasi alam diartikan sebagai memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta dalam pengembangannya harus mengikuti kaidah ekologis. Prinsip konservasi alam memiliki tujuh kriteria :
 - 1) Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan daerah tujuan wisata melalui zonasi
 - 2) Mengelola dan menciptakan kegiatan wisata yang berdampak rendah dan ramah lingkungan
 - 3) Menyisihkan hasil keuntungan untuk kegiatan konservasi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia setempat
 - 4) Menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan pengunjung, sarana dan fasilitas
 - 5) Mengembangkan kegiatan interpretasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku dan pengunjung terhadap lingkungan alam dan budaya

6) Melakukan monitoring kegiatan untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan

7) Mengelola usaha secara sehat

b. Prinsip Konservasi Budaya. Konservasi budaya memiliki prinsip peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip konservasi budaya memiliki tiga kriteria :

- 1) Melakukan penelitian dan mengenakan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata
- 2) Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/ pemuka masyarakat setempat pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata
- 3) Menerapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi setempat.

c. Prinsip Ekonomi. Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang bangunan yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak. Prinsip ekonomi memiliki dua kriteria :



- 1) Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berusaha dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha ekowisata untuk kesejahteraan penduduk setempat

d. Prinsip Edukasi. Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam, lingkungan dan budaya. Prinsip edukasi memiliki lima kriteria :

- 1) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata
- 2) Memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional yang berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai nilai tambah
- 3) Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpretasi lokal dari produk ekowisata
- 4) Memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung
- 5) Dikemas dalam bentuk dan teknik dan penyampaian yang komunikatif dan inovatif

e. Prinsip Wisata. Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung, serta

memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Prinsip wisata memiliki lima kriteria :

- 1) Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan keamanan dan keselamatan di lapangan.
 - 2) Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan mengoptimalkan kandungan material lokal
 - 3) Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar
 - 5) Memprioritaskan keramahan dalam sikap pelayanan
- f. Prinsip partisipasi masyarakat. Perencanaan dan pengembangan harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat. Prinsip partisipasi masyarakat memiliki beberapa kriteria :
- 1) Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata
 - 2) Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata
 - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan

- 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata
- 5) Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat

(Sumber : Haris Sutan Lubis, 2008)

5. Pengembangan Ekowisata

Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang makna dari istilah pengembangan. Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daryanto, 1997:350), pengembangan diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan”. Sedangkan menurut Pamuji (1985:7), pengembangan merupakan suatu pengembangan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi, dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat. Sesuai dengan topik dari penelitian ini, maka pengembangan yang dilakukan merupakan pengembangan dalam ekowisata. Merujuk pada dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat dengan Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:4), prinsip-prinsip pengembangan ekowisata dapat digunakan dengan berbasis pada masyarakat dan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Keberlanjutan ekowisata dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat)
 Ekowisata yang dikembangkan dikawasan konservasi adalah ekowisata yang “HIJAU dan ADIL” (*Green & Fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat dikawasan yang dilindungi, berbagai manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada dikawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, dan nilai sejarah yang tinggi.
2. Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (Prinsip partisipasi masyarakat)
 Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci : pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata. Beberapa contoh di lapangan menunjukkan bahwa ekowisata di tingkat lokal dapat dikembangkan melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik antara *Tour Operator* dan organisasi masyarakat (contohnya : KOMPAKH, LSM, Tana Tam). Peran organisasi masyarakat sangat penting oleh karena masyarakat adalah *stakeholder* utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Koordinasi antar *stakeholder* juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu model percontohan organisasi pengelolaan ekowisata yang melibatkan *stakeholder* termasuk masyarakat, pemerintah daerah, UPT, dan sektor swasta, adalah “Rinjani Trek *Management Board*”. Terbentuknya Forum atau dewan pembina akan banyak membantu pola pengalolaan yang adil dan efektif terutama di daerah dimana ekowisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.
3. Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)
Homestay adalah sistem akomodasi yang sering dipakai dalam ekowisata. *Homestay* bisa mencakup berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola secara langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. *Homestay* bukan hanya sebuah pilihan akomodasi yang tidak memerlukan modal yang tinggi, dengan sistem *homestay* pemilik rumah dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari kunjungan turis, dan distribusi manfaat di masyarakat lebih terjamin. Sistem *homestay* mempunyai nilai tinggi sebagai produk ekowisata dimana seorang turis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai

alam, budaya masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut. Pihak turis dan pihak tuan rumah bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain, dan dengan itu dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman yang lebih baik. *Homestay* sesuai dengan tradisi keramahan orang Indonesia. Dalam ekowisata, pemandu adalah orang lokal yang pengetahuannya dan pengalamannya tentang lingkungan dan alam setempat merupakan asset terpenting dalam jasa yang diberikan kepada turis. Demikian juga seorang pemandu lokal akan merasakan langsung manfaat ekonomi dari ekowisata, dan sebagai pengelola juga akan menjaga kelestarian alam dan objek wisata.

4. Prinsip Edukasi:

Ekowisata memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan pada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Dalam pendekatan ekowisata, Pusat Informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis yang bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi, kawasan dari segi budaya, sejarah alam, dan menyasikan acara seni, kerajinan dan produk budaya lainnya.

5. Pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata (Prinsip konservasi dan wisata).

Dalam perencanaan kawasan ekowisata, soal daya dukung (*carrying capacity*) perlu diperhatikan sebelum perkembangannya ekowisata berdampak negatif terhadap alam (dan budaya) setempat. Aspek dari daya dukung yang perlu dipertimbangkan adalah: jumlah turis/tahun; lamanya kunjungan turis; berapa sering lokasi yang "rentan" secara ekologis dapat dikunjungi; dll. Zonasi dan pengaturannya adalah salah satu pendekatan yang akan membantu menjaga nilai konservasi dan keberlanjutan kawasan ekowisata.

Selain itu terdapat pendapat lain mengenai pengembangan ekowisata dikemukakan oleh Nugroho (2011:17) mengemukakan bahwa pengembangan jasa ekowisata diharuskan memiliki manajemen yang profesional, mencakup :

1. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran menempati posisi penting untuk menjangkau dan menarik pengunjung seluruh dunia. Mereka diharapkan menjadi sumber informasi bagi pengunjung lainnya agar dapat membantu konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal.
2. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif. Layanan ekowisata adalah pengalaman dan pendidikan terhadap

lingkungan atau wilayah yang baru. Kepuasan pengunjung akan tercapai melalui ragam layanan yang sabar dan efektif.

3. Keterlibatan penduduk lokal dalam memandu dan menerjemahkan objek wisata. Penduduk lokal akan memiliki intensif konservasi lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberian informasi, dan memperoleh manfaat yang pantas.
4. Kebijakan pemerintah dalam kerangka melindungi aset lingkungan dan budaya. Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan atau dikombinasi dengan instrument pasar beroperasi di wilayah tujuan wisata.
5. Pengembangan kemampuan penduduk lokal. Penduduk lokal dan lingkungannya adalah kesatuan utuh wilayah ekowisata. Mereka perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh *benefit* agar tercipta intensif dan motivasinya untuk ikut mengonservasi lingkungannya.

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengoperasionalkan pengembangan ekowisata yang dilandasi prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Ekowisata di Daerah, dalam Pasal 2 yaitu :

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata.
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.

- f. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan, dan
- g. Menampung kearifan lokal

Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah dapat menjamin tercapainya sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan, swasta memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya-upaya konservasi.

Seiring dengan berkembangnya tujuan-tujuan ekowisata diluar taman nasional atau otoritas kementerian, serta semangat pembangunan ekonomi daerah, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 pelaku usaha ekowisata dapat berbentuk perseorangan dan/atau badan hukum, atau pemerintah daerah atau kerja sama diantara mereka. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin, pengembangan ekowisata, pemantauan pengembangan ekowisata, penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata, dan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata. Pengendalian ekowisata dilakukan antara lain terhadap fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian ekowisata.

Kegiatan ekonomi kepariwisataan terkait dengan usaha pariwisata. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 14, usaha pariwisata meliputi, antara lain :

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, boga, dan bar/kedai minum.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya,

- berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan, caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkupnya berupa kegiatan usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- i. Jasa informasi pariwisata adalah jasa yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya

yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman/makanan sehat, oleh aktivitas fisik dengan tujuan dengan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperlihatkan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Secara formal pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang mencakup prinsip :

- a. Masyarakat sebagai kekuatan dasar.
- b. Pariwisata ; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, serta
- c. Pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat, sedang pemerintah hanya merupakan fasilitator dari kegiatan pariwisata.

Sedangkan realisasi dari prinsip ini tertuang di dalam 7 program pokok dalam kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata yang terdiri dari :

- a. Pengembangan ekowisata
- b. Desa wisata
- c. Pariwisata inti rakyat
- d. Kemitraan
- e. Pengembangan usaha rakyat kecil

- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata, dan
- g. Peningkatan partisipasi dalam pengembangan pariwisata

6. Strategi Program Pengembangan Ekowisata

- a. Strukturisasi kewilayahan berdasarkan ekosistem dan kesatuan pengelolaan
- b. Pengembangan berkesinambungan ekosistem daratan dan perairan
- c. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelestarian dalam kawasan hutan
- d. Pengembangan ekowisata berkeadilan skala lokal, regional, nasional

(Sumber : Fandeli, 2005)

E. Ekowisata Berbasis Masyarakat (community-based ecotourism)

Merujuk pada Dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat

lokal dalam mengelola kegiatan wisata dikawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Pendapat lain mengenai ekowisata berbasis masyarakat dikemukakan oleh Schevyns dalam Jones(2005:3) :

ecotourism ventures only be considered “successful” if lokal community have some measure of control and share equitably in the benefits. The term “community-based ecotourism” should be reserved for that ventures based on high degree of community control (and hence where communication command a large proportion of the benefits) rather than those almost holly controlled by outside operators.

“usaha ekowisata hanya akan dianggap berhasil apabila komunitas lokal memiliki beberapa ukuran control dan pembagian manfaat secara adil. Istilah “ekowisata berbasis masyarakat” seharusnya dilaksanakan untuk usaha tersebut berdasarkan dengan tingginya tingkat control (karenanya komunikasi memegang porsi yang besar dalam pemanfaatan) daripada secara penuh dikontrol oleh pihak-pihak luar”. Selain itu pendapat dari WWF international beranggapan bahwa :

community-based ecotourism takes the social dimension of ecotourism a stage further, by developing a form of ecotourism where the local community has substantial control over and involvement in, its’s development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community.

“Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial dari ekowisata selangkah lebih lanjut, dengan membangun konsep ekowisata dimana komunitas

lokal memiliki control secara substansial dan keterlibatan dalam pembangunan dan manajemen, serta memiliki proporsi utama dalam kemanfaatan yang kembali lagi kepada masyarakat”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ekowisata berbasis masyarakat merupakan konsep ekowisata dengan kecenderungan melihat dimensi sosial kemasyarakatan yang ada. Sehingga masyarakat harus memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaannya dan harus mendapatkan manfaat paling besar dari diselenggarakannya ekowisata.

Merujuk pada kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah :

- a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan pariwisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
- b. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat)
- c. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
- d. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
- e. Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat termasuk penentuan biaya (*fee*) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata)

Lebih lanjut, Rudianto dan Tanaya (2014:73) mengatakan bahwa konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Lake dan Sharply dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74) menyatakan bahwa pariwisata pedesaan dapat muncul jika ada perilaku

wisata yang muncul di wilayah pedesaan. Roberts dan Hall dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74) menambahkan bahwa dalam pariwisata pedesaan harus ada karakter khusus yang dapat berupa budaya tradisional, budaya pertanian, pemandangan alam dan gaya hidup yang sederhana.

F. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Menurut Muljadi (2009:27) menyebutkan desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan. Ditegaskan kembali oleh Muriawan dalam Jurnal berjudul Konsep Desa Wisata (2006:67) bahwa desa wisata berdasarkan unsur-unsur yang sudah melekat dalam masyarakat desa lalu dimanfaatkan menjadi objek wisata. Pendit (1994:71) menyebutkan bahwa terdapat dua komponen dalam Desa Wisata, sebagai berikut:

- a. Akomodasi, sebagai tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi, sebuah kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah lokasi atau tempat yang digunakan sebagai tempat untuk wisata dengan

memanfaatkan potensi-potensi yang sudah ada, seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Kemudian, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan, pengelolaan dan pelayanan juga menjadi point penting dalam kesuksesan desa wisata. Tidak lupa poin terpenting dari desa wisata adalah akomodasi dari dan menuju lokasi desa dan atraksi para wisatawan dengan penduduk.

Dalam pelaksanaan desa wisata masyarakat ikut berpartisipasi, partisipasi tersebut harusnya bisa mengubah masyarakat dari menjadi obyek sehingga menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, harus menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang ada di handout *concept resort and leisure* oleh Sastrayuda (2010) desa wisata harus memiliki manfaat terhadap :

a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Desa wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara : (1) Usaha Ekonomi Rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan koperasi, (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat. Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas

pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut di atas dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

b. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, sebagai regulator dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat, unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Disamping itu beberapa pendapat menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya control masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan permodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa wisata mempunyai beberapa ciri, seperti; desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih

intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosial budaya pariwisata yang menurut Fiquerola (dalam Pitana 2005:117) terdiri dari enam kategori, yaitu :

- 1) Dampak terhadap struktur demografi
- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
- 3) Dampak terhadap transportasi nilai
- 4) Dampak terhadap gaya hidup tradisional
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- 6) Dampak terhadap pembanbunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

c. Pemberdayaan Lingkungan Desa Wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan. Budiharsono (2006:10) mengemukakan dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi kearah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

2. Kriteria Desa Wisata

Ascholani dalam opininya di website Kabar Indonesia pada 25 maret 2010 berjudul “Membangun Desa Wisata Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan” menyebutkan kriteria Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Atraksi wisata, semua mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- b. Jarak tempuh, jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dari ibukota provinsi dan kota.
- c. Besaran desa, menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas di sebuah desa.
- e. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

3. Persyaratan Desa Wisata

Program dalam desa wisata memiliki beberapa persyaratan agar desa tersebut menjadi Desa Wisata, menurut Priasukmana dan Mohammad(2001:38) persyaratan Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

G. Pembangunan Desa

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju kearah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno : 2006; 53)

Menurut Sondang P. Siagaan pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan
- b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain
- c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya
- d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan.

2. Definisi Desa

Menurut UU Desa Pasal 1 Nomor 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000:10)

4. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam Pasal 78 RUU desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pembangunan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan Indonesia (Tjahja Supriatna, 2000:64)

5. Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Tjahja Supriatna (2000:13) adalah :

- a. Imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Pada Pasal 79 RUU Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, mencakup :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

7. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa (swakelola). Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Menurut Moleong (2006:14) seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari kata dan diuji kembali secara empiris. Salah satu dari teori dasar penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana juga dianggap sebagai pendekatan luas sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian lapangan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moeleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Begitu juga menurut Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif kualitatif mngutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan suatu prinsip utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dekskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapat gambaran secara sistematis, aktual dari permasalahan yang akan dipecahkan. Selain itu, dapat menggambarkan dengan cepat keadaan atau kejadian yang apa adanya, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata penjabaran dari kejadian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus pada suatu penelitian untuk memusatkan objek perhatian dan mempersempit objek untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2014:288) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial yang berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial.. Spradley dalam Sugiyono (2014:290) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain*
3. Menetapkaan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul

Kabupaten Malang, meliputi :

- a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata
- b. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif
- c. Keterlibatan penduduk lokal
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

- a. Faktor Pendukung Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
- b. Faktor Penghambat Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah di Kabupaten Malang.

Selanjutnya yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Desa Wisata Pujon Kidul. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dan dianggap mampu memberikan informasi yang tepat, valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh para peneliti. Sedangkan Desa Wisata Pujon Kidul merupakan salah satu desa yang melaksanakan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data keberadaannya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan, sedangkan untuk data sekunder peneliti mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan pada lokus dan situs penelitian di atas.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi wawancara mendalam. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara orang-orang terlibat seperti :

- a. Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- b. Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- c. Kepala Desa Pujon Kidul
- d. Pengelola Desa Wisata Pujon Kidul
- e. Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Dokumen-dokumen
- b. Laporan-laporan
- c. Informasi lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data aktual dari sumber data. Menurut Margono (199) yang dikutip oleh Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b) Observasi tidak langsung yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti sendiri menggunakan observasi langsung, observasi dilakukan di Desa Wisata Pujon Kidul dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mengetahui proses Management Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing dalam Idrus (2009:120). Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan tiga komponen lembaga yaitu :

- a. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
 1. Bu Nobli selaku Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
 2. Bu Lani selaku Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- b. Pemerintah Desa Wisata Pujon Kidul
 1. Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul
- c. Perwakilan masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul
 1. Pak Badur selaku anggota Pengelola Desa Wisata Pujon Kidul
 2. Masyarakat setempat yaitu Bu Ririn dan Pak Andy

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang

diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian. Begitu juga menurut Zuriyah (2009:191) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini meliputi :

- a. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 2016 – 2021
- b. RPJMD Kabupaten Malang 2016 – 2021
- c. Profil Desa Wisata Pujon Kidul Tahun 2016

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang mendukung penelitiannya. Berdasarkan Arikunto dalam Zuriyah (2009:168) kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama penelitian yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul data dengan menggunakan panca inderanya untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Berikut adalah instrumen penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara bertujuan agar pencarian data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti guna memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya yang digunakan untuk menangkap data dan informasi yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun hasil studi di lapangan. Serta menggunakan catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014: 320) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2014: 324) tertulis bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian

(*confirmability*). Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2014) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika

data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

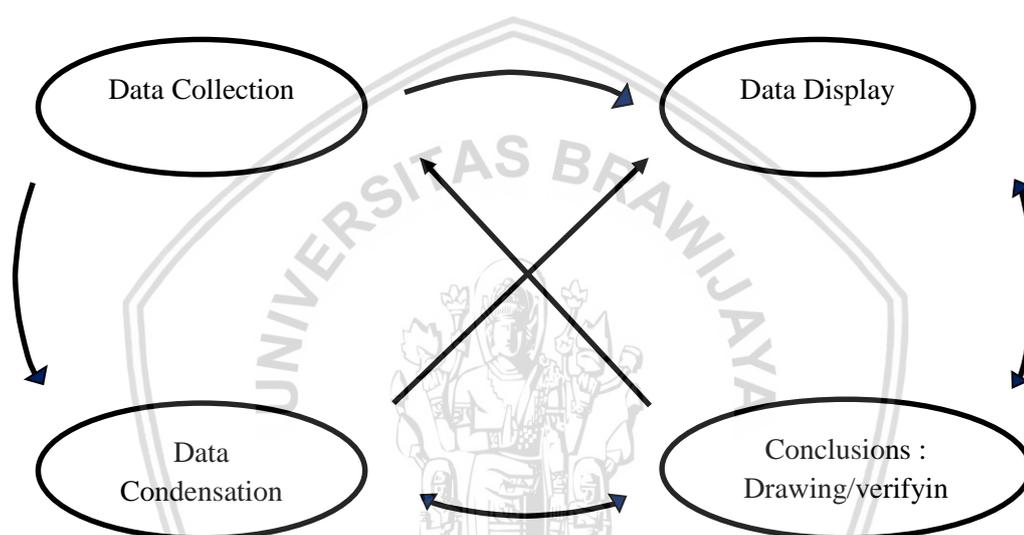
Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

H. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti untuk mendapatkan data, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh. dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2014:332) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang meliputi analisis-*analisis* berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan dalam periode tertentu, dalam menganalisis data

penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014:33) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. adapun model analisa data interaktif dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:33

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, membuat data kita kuat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses kondensasi data, peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan penelitian, penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian yang disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi yang dapat dipelajari dan memberi manfaat bagi semua pihak. Pada penyajian data ini diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang kaya akan informasi dan pengetahuan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/drawing*)

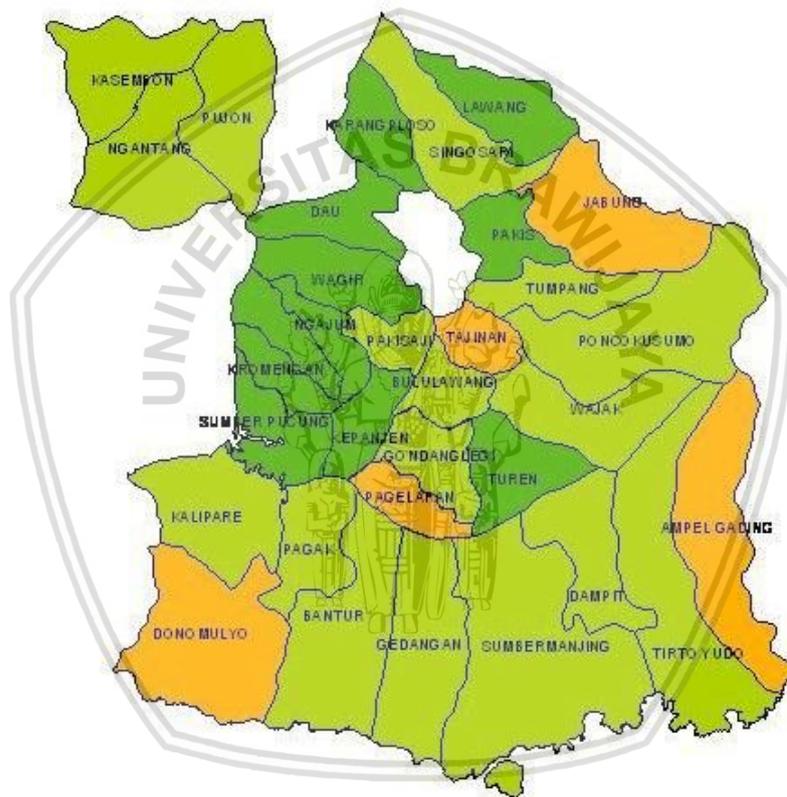
Setelah proses penyajian data, sebelum itu data yang disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang dikumpulkan. Kemudian setelah data itu difahami dan disajikan, maka peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan penulis di kajian pustaka.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang



Gambar 2. Peta Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112o17',10,90" Bujur Timur dan 112o57',00,00" Bujur Timur dan antara 7o44',55,11" Lintang Selatan dan 8o26',35,45" Lintang Selatan.

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² (sumber; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung

tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter), Gunung Panderman (2.040 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Batok (2.868 meter) dan Pegunungan Kendeng (600 meter). Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat 56 tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan (Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso- Malang, pada Tahun 2015 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 17o C hingga 27,6o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 9 persen hingga 99,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 15,3 mm hingga 485 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli- Oktober, hasil pemantauan Pos Karangates. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan April, hasil pemantauan Pos Karangploso.

b. Jumlah Penduduk

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 berjumlah 2.544.315 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.278.511 (50,24 persen) jiwa dan perempuan 1.265.804 (49,76 persen) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,07 persen (dibawah 30 persen) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,80 persen (dibawah 10 persen). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Sementara umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 tahun dan umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 68,12 persen.

c. Tata Ruang Wilayah

Struktur ruang kabupaten bertujuan dalam penentuan hirarki dan penetapan fungsi kawasan baik perkotaan maupun perdesaan, serta pembagian satuan wilayah pengembangan. Adanya hierarki perkotaan berarti ada keterkaitan suatu perkotaan dengan perkotaan lainnya. Perkotaan yang memiliki hierarki lebih tinggi akan lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi perkotaan yang hierarkinya lebih rendah. Seiring perkembangan yang ada di Kabupaten Malang, Kepanjen akan berubah status dari Ibukota Kecamatan menjadi Ibukota Kabupaten. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan berbagai kegiatan, sehingga hierarki perkotaannya juga naik dari orde IV menjadi orde III. Pada masa yang akan datang orde perkotaan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut :

- Orde III adalah Perkotaan Kepanjen.
- Orde IV adalah Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, Perkotaan Gondanglegi dan Perkotaan Donomulyo.
- Orde V semua perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan selain yang disebut diatas.
- Tiap-tiap kecamatan untuk mempercepat perkembangan dapat di tempuh dengan penentuan desa-desa pusat pertumbuhan.

Pola Ruang

1. Kawasan Permukiman

Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai Ibukota Kecamatan. Wilayah ini dominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.

2. Kawasan Pertanian.

Kawasan ini secara keseluruhan seluas 162.441 Ha dengan rincian : pertanian sawah seluas 47.902 Ha, tegalan seluas 102.219 Ha dan perkebunan seluas 12.320 Ha, dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dari kondisi tersebut diharapkan kawasan ini

mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

3. Kawasan Perkebunan.

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan. Jenis komoditi perkebunan yang ada dan cukup dominan di beberapa wilayah adalah teh, cengkeh, panili, tebu, kelapa, coklat dan kopi. Wilayah yang menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis tanaman yang ditanam adalah termasuk jenis tanaman keras.

4. Kawasan Industri.

Kawasan industri yang ada di Kabupaten Malang meliputi kawasan industri Singosari - Lawang, Wagir, Turen dan lain-lain. Untuk kawasan industri Turen meliputi industri besar (PT. PINDAD) serta beberapa jenis industri kecil dan home industry lain seperti indusuri tapioka, marning, sangkar burung, kerupuk, dan lain-lain. Jenis industri lain yang ada di Kabupaten Malang antara lain : industri tapioka di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, industri gula yang terdapat di dua kecamatan yaitu pabrik gula Kebonagung di Kecamatan Pakisaji dan pabrik gula Krebbe Baru di Kecamatan Bululawang. Selain itu terdapat pula industri lidi, rokok, keramik, asbes di Kecamatan Wagir; industri tikar mendong, tampar mendong, keju di Kecamatan Wajak; dan lain-lain.

5. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Malang ternyata memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, obyek tersebut diantaranya adalah : Obyek Wisata Buday, Obyek Wisata Buata, Wisata Alam Air`Terjun, Wisata Alam Air`Terjun dan Pantai

6. Kawasan Peternakan.

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, baik ternak besar maupun ternak kecil, Kecamatan Ampelgading : potensinya adalah sapi potong dan kambing. Selain ternak-ternak besar tersebut diatas, masing-masing kecamatan juga memiliki potensi pengembangan ternak kecil, yakni : ayam buras/kampung, ayam ras, kambing, domba, kelinci dan sebagainya terdistribusi secara merata.

7. Kawasan Perikanan.

Peningkatan perkenomian Kabupaten Malang bidang perikanan dikembangkan melalui mperikanan laut atau tangkap di wilayah pantai Sendangbiru melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang dan ikan serta sandar perahu. Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut :

8. Kawasan Pertambangan.

Yang termasuk kawasan ini adalah penggalian pasir, kerikil dan batuan yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai, yakni di Kecamatan Turen, Ampelgading, Wajak, Ngantang, Kromengan, Kasembon, Dampit, Gedangan,

Tumpang, Lawang, Pakis, Singosari dan Gondanglegi. Wilayah yang mempunyai potensi bahan galian/tambang batu kapur adalah Kecamatan Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Pagak dan Sumbermanjing Wetan, sehingga pengembangannya di masa yang akan datang tetap terpacu pada lokasi tersebut dengan tetap memperhatikan konservasi alam.

9. Kawasan Hutan.

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian berada di utara dan sebagian di selatan Kabupaten Malang, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang terletak pada kawasan non budidaya adalah hutan produksi terbatas. Diantara kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan produksi terbatas adalah di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Dau, Wagir, Karangploso, Pujon, Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, bantur dan Gedangan sedangkan termasuk sebagai hutan produksi tetap adalah di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Dampit, Pagak, Kalipare dan Bantur.

10. Kawasan Khusus, yakni *Kawasan Sekitar Bandar Udara, Kawasan Militer, Sekitar Gudang Amunisi*

d. Pemerintahan

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.035 RW dan 13.906 RT . Roda pemerintahan berjalan lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi derap pengembangan. Sebagai salah satu indikasi pencapaian kemajuan pembangunan dapat dicermati melalui tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa/kelurahan merupakan cermin kemandirian dalam mengorganisasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 13,24 persen, SMU sekitar 56,76 persen, Akademi 3,51 persen, dan Universitas 26,49 persen. Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan maka Pemerintah Kabupaten Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Aspirasi politik 58 masyarakat Kabupaten Malang berjalan baik sesuai koridornya melalui beberapa partai besar.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

a. Sejarah

Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Pada tahun 1989 sampai dengan 1996 waktu itu masih berstatus Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang yang berkantor di Jalan Kawi 41 Malang menjadi satu dengan kompleks Gedung APDN Malang, Kepala Cabang Dinas Pariwisata saat itu dipimpin oleh Bapak SUNARDI (almarhum). Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan dari Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang menjadi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan Gede No. 6 Malang yang dipimpin oleh Kepala Dinas :

1. SUNARDI pada tahun 1996 sampai dengan 1999
2. Dra. HARSIARI pada tahun 1999 sampai dengan 2001
3. Drs. NURYANTO, MM pada tahun 2001 sampai dengan 2004

Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang dengan Nomor: 90 Tahun 2004 dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang yaitu Bapak PURNADI, SH. MSi. Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2013 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor: 11 Tahun 2008 dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjadi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang dan dipimpin oleh Kepala Dinas:

1. Bapak PURNADI, SH. MSi. pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010
2. Ibu RATNA NURHAYATI, MSi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Setelah Ibu RATNA NURHAYATI, MSi. Menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 digantikan oleh Bapak Made Arya Wedanthara, SH, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

A. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
- e. Bidang Pemasaran;

f. Bidang Obyek Wisata;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata;



- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya;
- o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

3. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan
- i. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- j. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- e. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan penyajian bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

c. VISI MISI

VISI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi sebagai berikut “
TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG YANG
BERBASIS MASYARAKAT “

MISI

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui :
 3. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan kearifan lokal;
 4. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 5. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;
 6. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat

d. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN

Berdasarkan Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 - 2015 maka diterapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya dukungan untuk mewujudkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya daerah
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya
- d. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata melalui pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata
- e. Meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas
- f. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

- a. TUJUAN
 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal di Kabupaten Malang;
 2. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
 3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

b. SASARAN

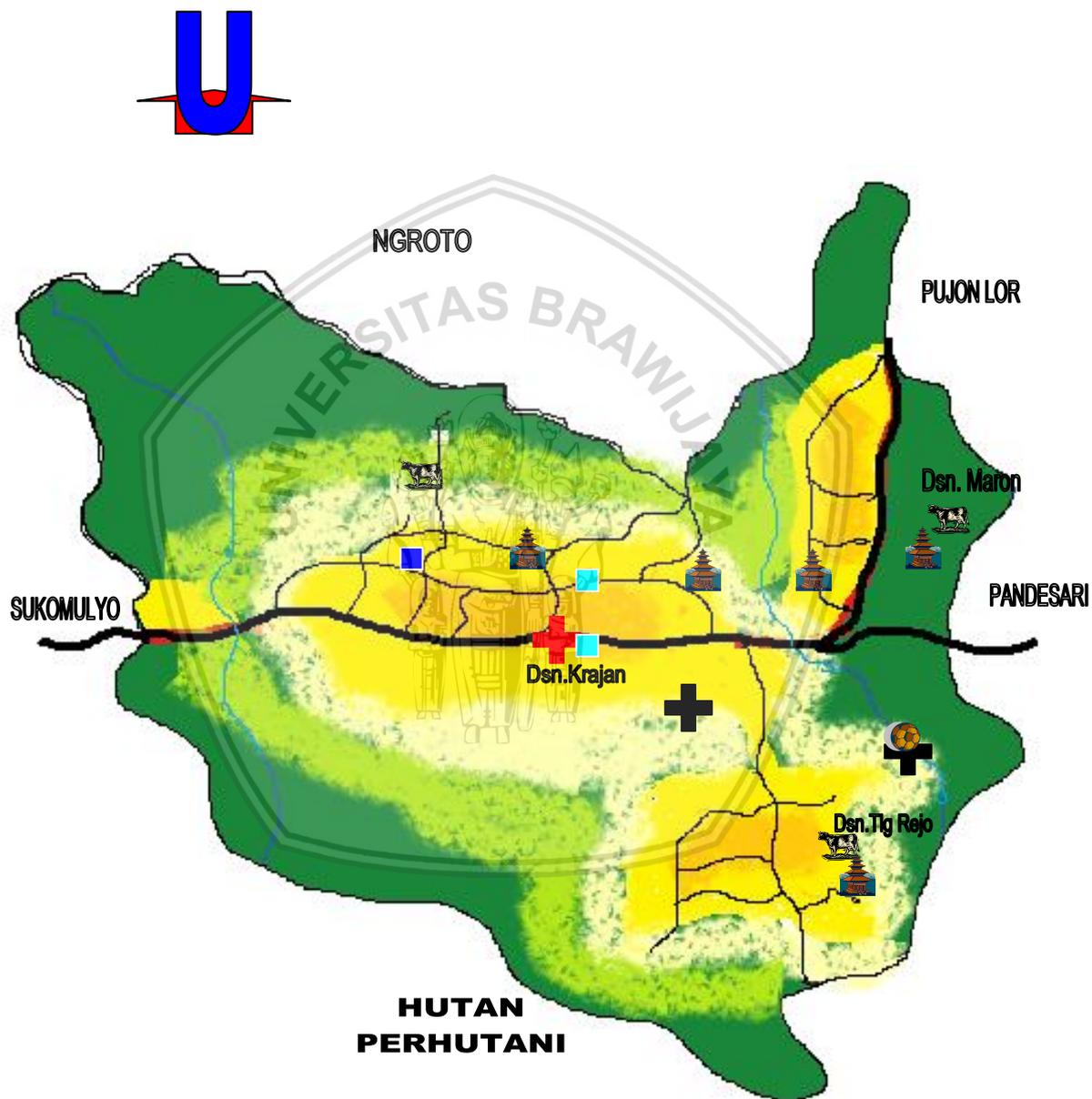
1. Terlaksananya pemberdayaan seniman, kelompok kesenian, budayawan lokal Kabupaten Malang;
2. Meningkatnya pengembangan obyek wisata secara kualitas dan kuantitas;
3. Terlaksananya peningkatan program kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang.



3. Gambaran Umum Desa Pujon Kidul

PETA DESA PUJON KIDUL

KECAMATAN PUJON



Gambar 3. Peta Desa Pujon Kidul

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

1. Kondisi Desa

Secara geografis Desa Pujonkidul terletak pada posisi $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan /Pegunungan yaitu sekitar 1200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pujonkidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1200. mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013-2016

Secara administratif, Desa Pujonkidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pujonlor Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukomulyo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Pujonlor. Kecamatan Pujon.

Jarak tempuh Desa Pujonkidul ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 37 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.1/2 jam.

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pujonkidul adalah 330 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 24.9 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 87 Ha. Luas lahan untuk ladang

tegalan dan perkebunan adalah 240. Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 578. Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran Ha, sekolah 0,4 Ha, olahraga 0,5 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,5 Ha.

Wilayah Desa Pujonkidul secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa .Pujonkidul terpetakan sebagai berikut: sangat subur 56 Ha, subur 140 Ha, sedang 1.109 Ha, tidak subur/ kritis 233 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti, jagung, serta tanaman buah seperti Apel , Tomat, wortel juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman Kayu-kayuan merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam Desa Pujonkidul ini menjadi bagus sebagai lahan Pertanian jiwa penduduk.

Sejarah Desa

➤ Sejarah Berdirinya Desa

Menurut informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh desa bahwa desa Pujonkidul didirikan oleh 2 orang yang bernama Mbah Brojonolo dan Den Ajeng Karsinah yang juga disebut pada tahun 1901 membuka hutan di bagian di daerah barat, namun demikian Mbah Brojonolo dan Den Ajeng Karsinah kehilangan arah

selanjutnya beliau berdua melalui babatan batan hutan amat dariman kemudian babatan huta amat dariman dibagi menjadi dua sebelah utara dan sebelah selatan. babatan hu/tan inilah yang kemudian menjadi Desa **Sejarah Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Pujonidul berdiri sejak tahun 1901 dengan kepala pemerintah pertama kali yaitu Bapak Aris, untuk lebih jelas tentang silsilah pemerintahan desa Pujonkidul sebagai berikut:

1. Jaeng Retno (1865-1890)
2. Jaeng Rono (1890 -1915)
3. Aris Jais' -(1915-1925)
4. Rateno (1925-1945)
5. Saeru (1945-1978)
6. Admadihardjo (1979-1980)
7. Painu (1980-1983)
8. Djuma'i (1983-1993)
9. Sugiono (1993-1994)
10. Siti Nurjana (1994-2000)
11. Jamludin (2000-2001)
12. Sugiono (2001-2011)
13. Udi Hartoko (2011 s/d Sekarang)

B. Demografis/ Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun **2017**, jumlah penduduk Desa Pujonkidul adalah **4.394 jiwa**, dengan rincian **2.059** laki-laki dan **2.335** Perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam **1.362 KK**.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pujonkidul maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	161 orang	3,67%
2	5-9	312 orang	7,11%
3	10-14	319 orang	7,27%
4	15-19	394 orang	8,98%
5	20-24	332 orang	7,57%
6	25-29	346 orang	7,89%
7	30-34	336 orang	7,66%
8	35-39	380 orang	8,66%
9	40-44	325 orang	7,41%
10	45-49	327 orang	7,45%

No	Usia	Jumlah	Prosentase
11	50-54	337 orang	7,68%
12	55-59	241 orang	5,49%
13	60-64	172 orang	3,92%
14	65 ke atas	406 orang	9,25%
Jumlah		4.388 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pujonkidul sekitar 2.046 atau hampir 46,63%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

A. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa

Tabel 2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	563	12,83%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	475	10,82%
3	Tamat SD/Sederajat	2.496	56,88%
4	Tamat SMP/Sederajat	577	13,15%
5	Tamat SMA/Sederajat	232	5,29%
6	Diploma I/II	7	0,16%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana	7	0,16%
8	Diploma IV/Strata I	29	0,66%
9	Strata II	2	0,05%
10	Strata III	0	0,00%
JUMLAH		4.388	100,00%

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pujonkidul hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pujonkidul tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pujonkidul baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa . Pujonkidul. yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pujonkidul Bahkan beberapa lembaga binbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Pujonkidul. sekarang ini.

B. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang

bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa . Pujonkidul. secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa . Pujonkidul

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2016 di Desa Pujonkidul berjumlah lumayan banyak yaitu 358 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 358 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa .. Pujonkidul. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 5 kasus bayi lahir pada tahun 2016, hanya 0 bayi yang tidak tertolong.

C. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa .Pujonkidul dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian dan

peternakan, jasa/perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan berjumlah 1.730 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 182 orang, yang bekerja di sektor wira swasta 97 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 162 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 4.149 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 3.
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya pada tahun 2016

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.833 orang	
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	19 orang	
	2. Jasa Perdagangan	26 orang	
	3. Jasa Angkutan	16 orang	
	4. Jasa Ketrampilan	8 orang	
	5. Jasa lainnya	21 orang	
3	Sektor Peternakan	1.714 orang	
4	Sektor lain	16 orang	
Jumlah		3.653 orang	

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

D. Struktur Pemerintahan

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pujonkidul memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari

kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk

Wilayah Desa .Pujonkidul terbagi di dalam 9 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Krajan ,Dkuh Maron dan Dukuh Tulungrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pujonkidul tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya.

C. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pujonkidul hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Pujonkidul, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisi memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena

inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Pujonkidul pada tahun 2011. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pujonkidul seperti acara perayaan desa.

Pada tahun 2013 dan 2014 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 85 % daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progress demokrasi yang cukup signifikan di desa Pujonkidul

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan

kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pujonkidul. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pujonkidul mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pujonkidul. kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pujonkidul Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan,

tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa . Pujonkidul. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pujonkidul.. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

➤ **Bencana Alam dan Sosial**

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pujonkidul. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

D. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.

Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) tahun 2016

No	Sumber Pendapatan	Hasil
1.	Industri rumah tangga	-

2.	Jasa	Rp. 600.000.000,-
3.	Perdagangan	Rp. 750.000.000,-
4.	Peternakan	Rp. 3.111.000.000,-
5.	Perkebunan	Rp. 692.000.000,-
6.	Ladang / Tegalan	Rp. 73.500.000,-
7.	Pertanian	Rp. 610.500.000,-
	Jumlah	Rp 5.237.600.000,-

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

E. Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel 5.

Tingkat pendidikan Aparat Desa

No	Aparat	Keterangan			
		SD / Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Sarjana
1	Kepala Desa			1 Orang	
2	Sek Des			1 Orang	
3	Kaur		3 Orang	1 Orang	1 Orang

4	Kepala Dsn		2 Orang	1 Orang	
5	Staf		1 Orang		

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 6.

Administrasi Pemerintah Desa Pada Tahun 2016

No	Jenis Administrasi	Keterangan	
I	Buku Administrasi Umum:		
1	Buku Keputusan Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
2	Buku Kekayaan / Inventaris Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
3	Buku Agenda	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
II	Buku Administrasi Keuangan		
4	Buku Data Induk Penduduk	Ada / Tidak	Kosong / Terisi

5	Buku Rekap Penduduk Akhir Bulan	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
III	Buku Administrasi Keuangan		
6	Buku Anggaran Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
7	Buku Kas Umum	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
8	Buku Kas Pembantu	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
9	Buku Administrasi PBB	Ada / Tidak	Kosong / Terisi

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 7.

Keuangan Desa Pada Tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp 652.728.000,-
2	Bagi Hasil Pajak	Rp 23.614.926,-

3	Alokasi Dana Desa	Rp 486.990.000,-
4	Pendapatan Desa Yang Sah	Rp 29.200.000,-
Jumlah		Rp 1.192.532.926,-

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 8.

Realisasi Peraturan Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Peraturan desa tentang APBDes	ADA
2	Struktur Organisasi dan Tata kerja pemerintah desa	ADA
3	Peraturan Desa tentang Desa Wisata	ADA

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata

Berdasarkan pendapat Iwan Nugroho (2011:17) mengenai pengembangan ekowisata, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah adanya pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran yang menempati posisi yang penting untuk menjangkau dan menarik wisatawan. Pemasaran destinasi biasanya diletakkan dengan strategi yang berorientasi pertumbuhan dan berfokus pada penciptaan citra, pengiklanan dan promosi penjualan yang bertujuan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional (Dewi, 2011:8). Merujuk pada pendapat Phillip Koetler (2005:10), pemasaran adalah proses sosial yang dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran destinasi dirancang agar dapat mempengaruhi wisatawan berkaitan dengan jenis produk dan aktivitas yang dipilih, periode waktu kunjungan, jenis akomodasi, serta pola pengeluaran/ belanja selama berada di destinasi wisata.

Dalam pemasaran dikenal dengan istilah bauran pemasaran, yang menyangkut aspek-aspek di dalamnya, salah satunya adalah 4P, 4P merupakan singkatan dari *product* (produk), *price* (harga), *place* (distribusi), *promotion* (promosi). Aspek pertama yaitu *product* (produk), berkaitan dengan dengan produk yang dijual kepada pelanggan, dimana hal ini produk berarti potensi wisata yang ada di desa wisata yang dijual ke wisatawan. Dari aspek *product* masyarakat

berperan secara penuh dalam perencanaan dan pengelolaan potensi wisata yang akan dijual sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa ::

“terkait produk yang akan dijual ditentukan oleh masyarakat sendiri, karena pada dasarnya produk tersebut sudah ada sebelum dikenal dengan istilah desa wisata. Sebagai contoh yaitu sayuran organik, peternakan sapi perah dan lain sebagainya itu mayoritas masyarakat pujon kidul bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Sehingga bukan pemerintah yang mendirikan dan sengaja membuat potensi wisata tersebut melainkan dari dulu memang alamiah seperti itu, hanya saja sejak dibentuknya desa wisata ini, potensi tersebut sudah lebih dikembangkan agar tidak hanya terlihat sebagai kebun dan peternakan biasa tapi dilayak disebut obyek wisata dan dapat menarik perhatian wisatawan. Untuk pengelolaannya tentu saya masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya membantu mempromosikan dan memfasilitasi.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Penentuan dalam aspek *product* yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa :

“ masyarakat desa yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apa yang kami jual di desa pujon kidul ini. Kami yang telah mendiami desa ini sejak lama, ibaratnya kami penduduk asli sehingga kami memahami apa saja yang dapat dijadikan potensi wisata disini. Lagipula memang potensi disini di dominasi oleh alam, dan itu memang sudah ada sedari dulu karena mayoritas masyarakat kami bekerja di sektor tani. Hanya saja kalau dulu kami sekedar bertani, jadi sawah dan kebun hanya sekedar memproduksi lalu dijual ke tengkulak. Tapi dengan adanya desa wisata ini terjadi peningkatan manfaat dari sawah dan kebun menjadi potensi wisata dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hanya memberi bantuan fasilitas dan promosi terkait dengan produk wisata ini.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon).

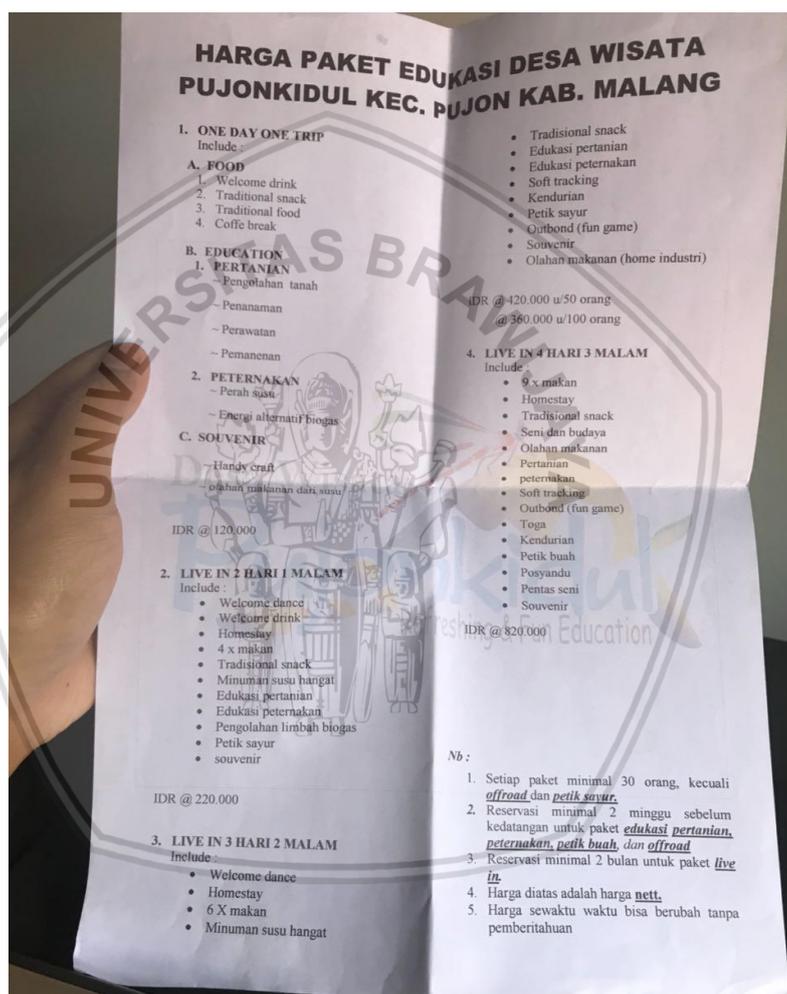
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam penentuan produk yang dijual sebagai suatu potensi wisata di desa wisata pujon kidul. Dikarenakan objek wisata yang bersifat alamiah bukan buatan maka kebanyakan produk yang dijual memang sudah ada sebelum desa wisata dibentuk atau di canangkan sebagai desa wisata. Hanya saja pada perkembangannya produk tersebut mengalami perkembangan untuk meningkatkan nilainya agar memiliki daya tarik bagi para wisatawan.

Aspek kedua *Price* (harga) sama halnya dengan aspek sebelumnya, *Price* (harga) juga ditentukan sendiri oleh masyarakat desa wisata yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut menjadi aktor tunggal dalam penentuan dan penetapan harga. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“Pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari berbagai paket wisata adalah masyarakat setempat, dan untuk yang mengelola objek desa wisatanya ya masyarakat sendiri sehingga dalam aspek hargapun masyarakat yang menentukan. Sehingga hal ini menimbulkan masalah juga, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang patokan harga sesuai paket wisata, sehingga terkadang terjadi perang tarif antar sesama desa wisata. Hal ini yang menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME terkait masyarakat sebagai penentu harga paket wisata juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa :

“dalam penentuan harga setiap paket wisata ya masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi itu bukan menjadi ranah pemerintah karena kepemilikan dan yang menjalan objek wisata di desa ini masyarakat kami sendiri. Cuma akhirnya kami susah juga karena belum ada peraturan yang mengatur tentang patokan harga. Jadi pernah terjadi perang harga. Hal itu membuat suasana antar pelaku desa wisata tidak enak karena persaingan yang tidak sehat.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan).



Gambar 4.

Paket Wisata di Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari setiap paket wisata di desa wisata yang bersangkutan karena mereka

sendiri yang memiliki dan mengelola berbagai obyek wisata yang ada di desa wisata tersebut. Hanya saja pada perkembangannya terjadi permasalahan bahwa penetapan harga tersebut tidak dilengkapi dengan adanya regulasi dari pihak pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya perang harga sesama pelaku wisata di desa wisata yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Aspek ketiga dalam pemasaran adalah *place* (distribusi) yang berkaitan dengan pemilihan tempat yang meliputi transportasi, perdagangan, pengaturan persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen. Untuk aspek ini, masyarakat desa tidak menjadi aktor tunggal, melainkan pemerintah turut ikut serta dalam mengatur aspek distribusi. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“dalam hal distribusi pihak pemerintah turut juga membantu dalam hal aksesibilitas, seperti memperbaiki jalan menuju wisata. Selain itu kami juga membantu dalam hal pemesanan bagi konsumen. Jadi di website kami sertakan kontak yang dapat dihubungi untuk info pemesanan.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Pendapat yang sama mengenai aspek *place* dikemukakan oleh bapak Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa :

“kalau dalam aspek distribusi kami tidak bertindak sendirian, pemerintah juga membantu dalam hal distribusi, contohnya masalah jalan yang berkaitan dengan akses yang memfasilitasi adalah pemerintah seperti memperbaiki aspal. Selain itu pemerintah di website maupun dibrosur menyertakan kontak pengelola desa wisata apabila ada wisatawan yang ingin reservasi.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam aspek place (distribusi), masyarakat tidak menjadi satu satunya pihak yang berperan di dalamnya, melainkan terdapat peran pemerintah yang membantu memfasilitasi, seperti dalam hal aksesibilitas berkaitan dengan jalan menuju destinasi wisata, serta dengan menyertakan kontak masyarakat desa setempat yang dapat dihubungi apabila wisatawan ingin melakukan reservasi.

Berkaitan dengan aspek promosi dalam pemasaran yang spesifik menuju desa wisata, maka pihak yang melakukan aktivitas tersebut adalah pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, bahwa :

“untuk masalah pemasaran desa wisata hal itu sudah menjadi salah satu tugas dari bagian promosi. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat banyak brosur yang masing-masing menunjukkan potensi dari desa wisata. Brosurnya tergolong lengkap mulai dari fasilitas dan akomodasi yang akan didapatkan oleh wisatawan. Jika ada event-event maka itulah yang kami bagikan. Dari situlah banyak masyarakat yang tau bahwa bukan hanya wisata buatan seperti jatimpark yang ada di Kota Batu. Masih banyak potensi desa wisata yang memiliki keunikan masing-masing. Selain itu info kepariwisataan juga kami cantumkan di website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kalau secara informal kami sering menyebarkannya melalui teman dan keluarga.” (Hasil dari wawancara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“Selain promosi yang dilakukan oleh bidang promosi, saya beserta staff juga pernah melakukan promosi tentang desa wisata. Jadi kami mempertemukan ketua dan anggota asosiasi *travel agent* yang ada di Malang Raya maupun di Jawa Timur serta ketua pemandu wisata tingkat provinsi dan di tingkat Malang Raya beserta kelompok sadar wisata. Diharapkan mereka yang menjadi motor untuk memasarkan desa wisata. Jadi terdapat kerjasama

dengan biro perjalanan untuk memasarkan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Kami juga pernah mempertemukan pihak-pihak pelaku wisata dari Jogjakarta dan Bali dengan yang ada di Batu dan Malang Raya. Kami duduk disatu meja untuk saling mempromosikan potensi daerah, yang salah satunya adalah desa wisata di Pujon Kidul ini.”(hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Malang)

Aktivitas promosi desa wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tapi juga dilakukan oleh masyarakat yang mendiami desa wisata. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata Pujon Kidul, bahwa:

“masyarakat Pujon Kidul sebenarnya sudah sangat sadar dan semangat untuk mengembangkan desa wisata. Tanpa disuruh pemerintah, kami sudah jalan sendiri untuk memasarkan desa kami. Pemuda-pemuda melalui karangtaruna membuat blog maupun website tentang Desa Pujon Kidul. Jadi dari website itu banyak orang yang tau tentang potensi wisata apa aja yang ada Desa Wisata Pujon Kidul. Banyak orang yang mengira bahwa hanya ada pemandangan café sawah padahal wisata yang bisa di dapatkan disini lebih dari itu seperti outbond, perah susu dan bercocok tanam sayur dll. Oleh karena itu website dan blog kami isi dan memperlihatkan semua potensi wisata yang ada disini. Ternyata memang banyak pengunjung yang datang kesini awalnya tertarik melihat potensi wisata yang kami tampilkan di website. Selain itu masyarakat disini juga aktif untuk menawarkan dan memasarkan tempat-tempat wisata yang ada. Intinya kami sebagai warga lokal aktif memasarkan dengan cara yang minim biaya.” (hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2018 di café sawah Pujon).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kedua belah pihak, yakni pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Pujon Kidul, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan promosi dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, hanya saja pemerintah melakukan lebih banyak jenis aktivitas promosi, mulai dari pembuatan brosur, *free map*, promosi melalui website resmi pemerintah, sampai pada mempertemukan aktor-aktor pariwisata. Sedangkan dari masyarakat, website

menjadi media yang ampuh untuk memasarkan desa wisatanya, hal tersebut sama-sama dilakukan masyarakat.

b. Keterampilan dan Layanan Kepada Pengunjung Secara Intensif

keterampilan dan layanan kepada pengunjung berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagai tuan rumah desa wisata. Masyarakat yang terlibat bersifat keseluruhan, itu artinya mulai dari pelaku usaha seperti pemilik kebun/sawah, pemilik ternak dalam semua bidang potensi wisatanya sampai pada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa wisata tersebut. Pada dasarnya mayoritas masyarakat Pujon Kidul adalah petani sehingga mereka tidak memiliki *mindset* sebagai seorang pelaku usaha wisata. Oleh karena itu terkadang minim tentang melayani wisatawan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Ibu RIRIN sebagai salah satu warga desa pujon kidul bahwa, :

“kami kan memang dasarnya banyak bekerja sebagai petani, kami tidak mempunyai dasar atau pengetahuan tentang pariwisata. Apalagi orang-orang disini rata-rata hanya lulusan SD , jadi tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk menjamu wisatawan. Tapi untungnya pemerintah memberi pelatihan ke POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Pelatihannya seperti mengelola dan menjamu wisatawan baik tatacara dan sopan santu agar tertib. Semua pengetahuan tersebut disebarkan ke masyarakat-masyarakat desa lainnya sehingga bertahap kami mengerti bagaimana cara mengelola desa wisata kami.” (hasil wawancara pada tanggal 7 februari 2018 di desa pujon kidul).

Pelatihan memang menjadi salah satu kunci untuk membekali keterampilan untuk desa wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang secara rutin dan berkala memberikan pelatihan terkait dengan mengelola desa wisata agar memiliki daya jual dan membekali masyarakat dengan prinsip-prinsip

kepariwisataan demi memberi kepuasan kepada para wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“salah satu program kami memang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku wisata, seperti Pokdarwis. Pelatihan itu diadakan dua kali setahun, dan kami mendatangkan pembicara yang memang kompeten dibidangnya. Jadi kami datangkan dari provinsi yang memang memiliki keahlian dibidangnya sehingga masyarakat dapat mengembangkan berbagai aspek dan potensi yang ada didesanya. Yang kami berikan ini materinya luas, menyangkut berbagai aspek dan menyeluruh kesemua pelaku wisata, bahkan di taraf terkecil selain pelatihan juga kami pernah melakukan studi banding ke desa wisata lain. Jadi kami ajak pokdarwis untuk ikut studi banding jadi mereka bisa lihat bagaimana orang orang disana dalam mengembangkan desanya, bagaimana interaksi antara warga lokal dengan wisatawan. Sehingga saat mereka pulang mereka bisa menceritakan pengalaman dan informasi tersebut kepada masyarakat di desanya.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ternyata memang menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif. Hal itu sependapat dengan yang dijelaskan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas memang memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan desa wisata disini. Dari situ saya mengetahui banyak hal tentang mengelola desa wisata dan melayani wisatawan. Dari situ informasi yang sudah saya dapatkan saya ceritakan lagi keteman-teman, pemilik usaha, keluarga dan pemuda pemudi disini. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari segi potensi alamnya desa kami lebih kaya dan berpotensi dari pada desa wisata lainnya. Saya cerita begitu keteman-teman di desa jadi mereka lebih bersemangat agar desa wisata pujon kidul ini menjadi desa wisata lebih baik ,” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan dari keterangan-keterangan diatas yang didapat melalui wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui bagian pengembangan SDM sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat desa wisata pujon kidul melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkala yang diikuti oleh para pelaku pariwisata termasuk perwakilan desa wisata. Pelatihan dan pembinaan tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap keterampilan dan layanan kepada pengunjung. Studi banding juga menjadi salah satu media yang tepat untuk meningkatkan keterampilan penduduk lokal dan mengelola desa wisatanya, karena dari studi banding tersebut mereka dapat membandingkan apa yang menjadi plus dan apa yang kurang dari desa wisatanya sehingga sepulangnya ketempat asalnya para perwakilan desa wisata yang mengikuti studin banding dapat melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan desa wisatanya selama ini dan dapat menceritakan kepada warga yang lain untuk meningkatkan kualitas desa wisatanya terlebih dalam hal keterampilan melayani wisatawan.

c. Keterlibatan Penduduk Lokal

Merujuk pada dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata dan WWF Indonesia (2009:2), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitik beratkan peran aktif komunitas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya yang menjadi potensi dan nilai jual daerahnya sebagai daya tarik wisata.

Oleh karena itu keterlibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak. Pola kegiatan ekowisata berbasis masyarakat yang dalam penelitian ini adalah desa wisata, mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki baik secara adat maupun sebagai pihak pengelola.

Dilaksanakannya pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang juga tidak lepas dari masyarakat setempat, bahwa mereka memiliki peran yang aktif dalam pengelolaan desa wisatanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“dalam pengembangan desa wisata, dapat dikatakan kalau pemerintah bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dan membantu, ya seperti dalam hal sarana dan pengembangan SDM. Jadi untuk menemukan dan mengelola potensi wisatanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa wisata itu sendiri. Masyarakat berperan sangat aktif dalam mengembangkan desa wisatanya. Salah satunya memasarkan desa wisata mereka dengan membuat blog dan website sebagai sarana untuk memasarkan pariwisatanya. Selain itu pemerintah juga membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Anggota pokdarwis ini berasal dari masyarakat masing – masing desa wisata itu sendiri. Ibaranya pokdarwis ini menjadi kelompok yang mewakili masyarakat desa wisata. Kalau ada acara atau pelatihan ya kami mengundang pokdarwis itu diharapkan bekal yang diberikan Pemerintah, pokdarwis ini bisa menyebarkan informasi dan wawasannya ke masyarakat di desanya. Pokdarwis ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan desa wisata.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata juga diakui oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“keterlibatan masyarakat di desa wisata ini menyangkut aspek yang luas. Jadi walaupun ada pihak yang lain yang memiliki peran pengembangan

desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan sebagai pihak yang juga memiliki peran dalam pengembangan desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan pihak yang sangat penting, pembangunan fasilitas yang dibangun pemerintah juga mendapat pengawasan dari masyarakat setempat.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan desa wisata, masyarakat desa setempat memiliki peran yang sentral. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana beserta bimbingan dan pelatihan secara rutin dan berkala. Untuk pengelolaan potensi desa wisata dikembangkan lagi kepada masyarakat desa setempat karena mereka yang sangat paham tentang kondisi dan situasi desa wisatanya. Jadi pihak yang mengelola potensi wisata adalah masyarakat itu sendiri. Selain dalam aspek pengelolaan, keterlibatan masyarakat juga dapat lihat dalam aspek promosi dimana mereka menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik secara internal maupun eksternal. Dari segi internal masyarakat membangun kerjasama antara pengusaha peternakan, pertanian serta kegiatan alam bebas lainnya beserta pokdarwis, dan juga dengan kelompok masyarakat yang ada seperti karang tarun. Sedangkan dari segi eksternal, masyarakat terutama yang ada dalam gabungan pokdarwis melakukan kerjasama antar desa wisata untuk mempromosikan masing-masing desanya.

Selain itu, adanya partisipasi dalam pembangunan desa wisata, juga menimbulkan sisi positif dalam hal pertambahan nilai. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“tentu saja dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata, hal tersebut menimbulkan perkembangan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya bahwa sebelum dicanangkannya desa wisata banyak sekali masyarakat desa yang pengangguran. Tetapi dengan adanya desa wisata dan keterlibatan penuh dari masyarakat kesejahteraan warga juga meningkat khususnya bagi para petani yang ada di desa pujon kidul ini. (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan penuh dari masyarakat di desa wisata menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya pihak petani. Selain itu dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pembangunan, masyarakat setempat yang sebelumnya banyak tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan karena direkrut oleh pemilik usaha di desa wisata yang bersangkutan.

d. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu saja tidak terlepas dari adanya intervensi Pemerintah, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pengembangan desa wisata. Merujuk pada pendapat James E. Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17): kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem a matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Nugroho (2012:167) berpendapat bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, dan pemerintah disini adalah Negara.

Selain dalam hal sarana prasarana serta pengembangan SDM, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membantu kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Hal tersebut sejalan dengan oleh ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“jadi disini untuk mengembangkan desa wisata itu ada dua hal yang menjadi perhatian, yang pertama masalah sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur yang menjadi salah satu tugas di bidang pengembangan sumberdaya manusia. Di bidang saya, kami mengembangkan desa wisata dengan membangun sarana untuk menunjang kegiatan wisata. Contohnya kita bangun gapura atau pintu masuk menuju desa wisata, gazebo, membangun paving jalan dan rest area. Malah di salah satu desa kami malah membangun fasilitas outbound. Jadi ya dalam membangun sarana prasarana di desa wisata kami menyesuaikan wilayah dan potensi yang ada di desa yang bersangkutan. Untuk tindakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam hal pengembangan SDM ya melakukan dengan pembinaan dan pelatihan, sosialisasi, kami juga melakukan studi banding untuk menambah wawasan dari pelaku wisata di desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Informasi terkait dengan pengembangan sarana prasana desa wisata juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“bahwa kalau di desa pujon kidul ini bantuan yang kami dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ya gapura serta papan penunjuk arah menuju desa wisata pujon kidul. Sementara ini hanya itu saja yang dibangun Dinas sebagai sarana desa wisata pujon kidul ini.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)



Gambar 5.

Gapura dan Penunjuk Arah Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan dengan masyarakat desa pujon kidul dapat dikatakan bahwa pembangunan fasilitas yang dilakukan pemerintah tidak sama antar satu desa dengan desa yang lainnya. Hal tersebut juga didasarkan atas kondisi dan kebutuhan dari desa wisata yang bersangkutan. Peran POKDARWIS dalam pengembangan desa wisata ini sejalan dengan Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“pemerintah membentuk pokdarwis ini diharapkan ada perwakilan-perwakilan dari desa wisata yang dapat menjadi penggerak bagi pengembangan desa wisatanya. Jadi kami menetapkan orang-orang yang dianggap pantas mewakili desa wisata untuk tergabung dalam kepengurusan pokdarwis. Mereka juga dapat menjadi mediator antara kami dan masyarakat, karena mereka merupakan penduduk asli yang mendiami desa wisata sehingga mereka sendiri yang mengetahui kebutuhan dan problematika apa yang dihadapi di desanya, karena mereka dibentuk oleh Dinas, maka keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat mereka sampaikan kepada kami.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Keberadaan peran Pokdarwis ini juga diakui oleh masyarakat yang mendiami wisata, hal ini sejalan dengan Pak Andi selaku warga Desa Pujon Kidul bahwa :

“tentu saja pokdarwis berperan aktif dalam pengembangan desa wisata disini. Di desa ini ada Pak Badur beliau sering ikut pelatihan yang dilakukan Pemerintah, jadi pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan itu sering dibagi ke masyarakat desa ini melalui pertemuan-pertemuan warga atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Beliau ini kalau bagi saya menjadi salah satu penggerak dan aktif dalam menghimpun anak-anak muda disini untuk mengembangkan desa”. (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan desa wisata salah

satunya adalah dengan cara membentuk Pokdarwis dimana hal tersebut telah ditetapkan dengan suatu regulasi, yang salah satunya adalah Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Hanya saja pada realitanya, harapan bahwa Pokdarwis ini mampu menjadi salah satu penggerak bagi pengembangan desa wisata tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pengembangan desa wisata adalah berupa pembuatan visi misi serta RPJMD yang mencantumkan strategi dalam mengembangkan desa wisata, pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang baik dari segi sarana prasarana dan SDM, serta keputusan pemerintah untuk membentuk kelompok sadar wisata demi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di desanya masing-masing.

e. Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal

Penduduk lokal beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh dari wilayah desa wisata, yang dalam hal ini mengacu pada konsep ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat desa yang bersangkutan perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh manfaat atas diselenggarakannya desa wisata. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan penduduk lokal, hal ini telah menjadi salah satu tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bagian Pengembangan Sumberdaya Manusia yang menjadi tugas langsung dari Seksi Bimbingan dan Pelatihan. Berbeda dari pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang lebih

bertujuan memberi dan meningkatkan kualitas keterampilan dari masyarakat desa wisata, tetapi bimbingan dan binaan yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“selain melakukan pelatihan secara rutin dan berkala, salah satu tugas kami adalah memberikan bimbingan dan binaan yang juga dilakukan secara rutin dan berkala. Salah satu contohnya pada awal 2011 kami menyelenggarakan acara yang mempertemukan para pelaku desa wisata termasuk perwakilan masing-masing desa dan pokdarwis untuk memberikan wawasan kepariwisataan. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa mayoritas masyarakat yang mendiami desa wisata ini adalah orang-orang pertanian yang tentu saja mindsetnya adalah mindset petani bukan mindset seorang pelaku wisata. Dan kami berupaya untuk membekali mereka dengan dasar-dasar pariwisata dan banyak hal lagi yang berkenaan dengan cara-cara untuk mengembangkan desa wisata. Diharapkan dari bimbingan yang diberikan mulai terbentuk mindset sebagai pelaku wisata dan diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola daerahnya sebagai desa wisata.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Adanya upaya dari Pemerintah untuk mengembangkan kemampuan penduduk desa wisata melalui bimbingan dan binaan juga diakui oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“bimbingan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah tentunya saja memiliki pengaruh positif dalam hal kemampuan penduduk di Desa Wisata. Kan seperti yang saya katakan bahwa mayoritas masyarakat disini mindsetnya ya petani, kami juga bukan orang-orang pendidikan yang tinggi yang memiliki wawasan luas tentang kepariwisataan. Apa yang diselenggarakan oleh dinas tidak hanya pelatihan demi meningkatkan keterampilan tetapi juga ada bimbingan. Seperti yang saya ikuti yaitu tentang kepariwisataan. Darisitu saya semakin paham tentang dasar-dasar pariwisata.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kemampuan penduduk lokal demi mengembangkan desa wisata diwujudkan melalui bimbingan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan dasar kepada penduduk lokal yang mendiami desa wisata, dimana penduduk lokal tersebut masih memiliki mindset sebagai petani bukan seorang pelaku wisata. Sehingga melalui bimbingan dan pembinaan tersebut masyarakat secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan khususnya dalam upaya mengembangkan desa wisatanya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Dalam Pengembangan Community Based Ecotourism, tentu banyak hal yang menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung ini dapat berasal baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang mendiami desa wisata. Berdasarkan wawancara dan data-data pendukung dalam pengembangan Desa Wisata, yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata

Merujuk pada visinya, Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan. Salah satu



objek wisata yang dapat perhatian dari Kabupaten Malang adalah Desa Wisata, yang itu artinya pengembangan desa wisata menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan desa wisata, yang hal itu tertera dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Komitmen yang kuat juga dari pemerintah ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mengembangkan desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“pemerintah berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada, salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata ini menjadi suatu alternative wisata yang memiliki keunikan tersendiri. Kan selama ini orang melihat Malang identik dengan Jatim Park, BNS, padahal banyak desa wisata yang patut untuk dikunjungi. Terlebih lagi desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang masih sangat alami dan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat bagaimana caranya untuk memajukan desa wisata. Kepala Dinas pun semangat untuk memajukan desa wisata. Beliau selalu mengingatkan agar kami terus memaksimalkan segala upaya baik dari segi infrastruktur dan SDM agar desa wisata dapat menjadi lebih baik dan semakin dikenal wisatawan.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan desa wisata juga sejalan yang dikatakan Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“kami berupaya semampu kami untuk membantu masyarakat desa wisata untuk mengembangkan daerahnya. Salah satu contohnya adalah saya pernah memberikan kontak para *travel agent* dan melakukan kerjasama agar dapat mempromosikan desa wisatanya. Intinya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka agar desa wisatanya dapat

berkembangan dan menjadi lebih baik.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen dari pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tidak hanya sekedar tertuang dalam RPJMD tetapi juga terwujud dalam upaya yang dilakukan oleh segenap staff dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan desa wisatanya masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tidak menjadi satu-satunya pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat yang mendiami daerah tersebut juga memiliki komitmen yang kuat baik dalam menggali potensi, mengelola, maupun mengembangkan.

2. Pemberitaan Media Massa

Kiprah Kabupaten Malang sebagai Kabupaten dengan beragam potensi wisata ternyata sudah dikenal tidak hanya dalam skala regional tetapi juga secara nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang menyorot potensi wisata di Kabupaten Malang, salah satunya desa wisata. Ternyata pemberitaan tersebut menjadi promosi dengan pengaruh yang besar, karena dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ketertarikan yang tinggi dari media massa tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul bahwa:

“kami sering kedatangan tamu dari media, baik yang sekitar Malang Raya, Provinsi bahkan media nasional, terutama dari TV. Kami senang sekali jika ada media yang meliput, kan hal itu bisa menjadi ajang promosi juga untuk desa kami. Dari media itu akhirnya banyak sekali wisatawan yang datang, bahkan dari luar pulau. Mereka takjub sekali

dengan desa wisata yang ada di Pujon Kidul ini. Mungkin di kotanya tidak ada desa wisata dengan potensi yang alamiah ini. Setelah saya Tanya dapat info desa wisata ini darimana? Mereka menjawabnya dari siaran TV nasional. Terkadang tamu-tamu daerah dan Kementerian pun sering berkunjung ke desa kami.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di Kelurahan Pujon Kidul)



Gambar 6. Pemberitaan dari Televisi

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemberitaan dari media, terutama media nasional memberikan pengaruh yang positif bagi pengembangan desa wisata. Dari pemberitaan terjadilah aktivitas promosi dengan lingkup yang luas, yakni nasional. Sehingga pemberitaan tersebut dapat menarik minat wisatawan yang bahkan berasal dari luar pulau. Dengan semakin banyaknya

orang yang melihat pemberitaan tersebut maka semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata, oleh karena itu masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan desa wisatanya.

b. Faktor Penghambat

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desa Wisata

Dalam pariwisata, sarana prasarana menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Begitu juga terkait dengan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang awalnya adalah lingkungan asli tempat masyarakat tinggal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desa wisata merupakan pemukiman yang tentu di dalamnya terdapat sarana prasarana wisata yang memadai. Sebenarnya masalah sarana prasarana telah menjadi tanggung jawab dari pemerintah melalui Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tetapi pada realitanya sarana prasarana yang dibangun masih tergolong minim. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“salah satu hambatan dalam pengembangan desa wisata ini ya kurangnya sarana prasarana yang memadai. Pemerintah hanya baru membangun gapura, lahan parkir untuk wisatawan. Akses ke desa kami masih tergolong susah ketika wisatawan lagi ramai ramainya karena jalan yang sempit. Diluar itu kami masih butuh sarana-sarana seperti jalan paving ataupun aspal yang baik menuju desa wisata kami.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)



Gambar 7.

Parkir dan Akses Menuju Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih tergolong minim hanya sebatas aksesibilitas. Sarana prasarana lainnya seperti pos informasi masih rencana. Ternyata pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mendapat respon yang lamban sehingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut secara maksimal.

2. Rendahnya kemampuan masyarakat Pujon Kidul dalam hal Manajemen Potensi Wisata

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa wisata pujon kidul adalah masyarakat yang kesulitan dalam hal manajemen potensi wisata yang ada di daerahnya. Masyarakat pujon kidul di dominasi oleh petani dan tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup handal untuk mengelola segala potensi yang ada di daerahnya menjadi suatu daya tarik wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“kelemahan kami memang dalam hal manajemen. Untuk masyarakatnya sebenarnya sudah mendukung diselenggarakannya desa wisata ini, Cuma ya kami sadar bahwa kemampuan masyarakat masih tergolong rendah untuk mengelola potensi yang ada disini. Karena masyarakat sendiri belum paham tentang manajemen dan dasar-dasar pariwisata sendiri, ya namanya juga *basicnya* masih petani, jadi ya pengembangan wisata ini masih menjadi hal yang asing. Dan pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada sosialisasi tapi kita harus menjelaskan kembali ke masyarakat agar lebih paham dan mengerti.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan manajemen dan dasar-dasar pariwisata masih kurang.

Hal itu disebabkan karena pada dasarnya masyarakat pujon kidul bekerja sebagai petani sehingga masih asing dengan konsep pariwisata.

C. Analisis Data

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

Ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) merupakan suatu pariwisata yang lahir dari konsep ekowisata. Merujuk pada definisi dari *World Conservation Union* (WCU) dalam Nugroho (2011:15) mengemukakan bahwa ekowisata adalah perjalanan wisata yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) muncul sebagai konsep yang mengedepankan aspek sosial dari konsep ekowisata. Konsep ini merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki partisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Denman (2001:2), bahwa *“The term community based ecotourism take this social dimension a stage further. This is a form of ecotourism where the local community has substantial control over, and involvement in, it’s development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community”*. (konsep ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial selangkah lebih jauh. Hal ini

merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki control secara substansial dan keterlibatan di dalamnya, baik itu dalam pengembangan dan manajemen, serta memiliki proporsi yang besar dari keuntungannya). Dalam penelitian ini desa wisata dianggap sebagai salah satu destinasi wisata yang menggunakan konsep ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) karena desa wisata menjunjung keaslian dari lingkungan dari alamiah dan dikelola oleh masyarakat setempat yang mendiami desa tersebut. Dalam melakukan pengembangan, terdapat beberapa aspek, yaitu :

a. Pemasaran yang spesifik

Aspek pertama dalam pengembangan desa wisata adalah pemasaran. Menurut Santon dalam Basu Swasta dan Irawan (2003:5) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam bidang pemasaran, dikenal istilah bauran pemasaran, yakni 4P *product, price, place, dan promotion*. Aspek pertama dalam pemasaran adalah *product*. *Product* berkaitan dengan barang yang dijual ke customer, yang dalam hal ini adalah berbagai potensi yang ditawarkan oleh masyarakat desa wisata. Dalam aspek ini, masyarakat desa juga menjadi aktor tunggal dalam penentuan dan pengelolaan aspek *product*. Pada dasarnya potensi yang ada di desa wisata sudah ada sebelum desa yang bersangkutan mencanangkan dirinya sebagai desa wisata. Itu artinya pertanian dan peternakan telah ada sejak lama dan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa

product yang dijual di desa wisata bukanlah program buatan dari pemerintah melainkan memang telah menjadi lingkungan alamiah di desa wisata yang bersangkutan. Pengelolanya pun dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa wisata setempat.

Aspek kedua dari pemasaran adalah *price* yaitu berkaitan dengan besaran harga yang ditujukan untuk suatu paket wisata. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan mengatur harga paket-paket wisata di masing-masing desa wisata. Sayangnya belum ada regulasi yang mengatur mengenai kesetaraan harga di masing-masing desa wisata, sehingga terkadang terjadi perang harga sesama pemilik usaha di suatu desa wisata. Hal ini dapat menjadi masukan bagi perangkat desa atau pihak dari kecamatan untuk melakukan intervensi dengan membuat regulasi agar terjadi kesetaraan harga dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam desa wisata yang bersangkutan.

Aspek ketiga dalam bauran pemasaran adalah *place*. *Place* berkaitan dengan distribusi. Menurut Koetler (2008:48), distribusi meliputi aktivitas perubahan dalam membuat produknya tersedia di target pasar. Strategi pemilihan tempat meliputi transportasi, pergudangan, pengaturan persediaan, cara pemesanan bagi konsumen. Selain itu distribusi juga berkaitan dengan pemilihan lokasi, persediaan, transportasi dan juga logistik. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengatur aspek *place* karena mereka merupakan masyarakat yang telah lama mendiami desa wisata yang tentu saja sangat mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di lokasi, hanya saja pemerintah juga turut

berperan yakni dalam hal akses, transportasi serta cara pemesanan bagi konsumen yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Aspek keempat adalah *promotion*. *Promotion* berkaitan dengan pemasaran. Promosi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata “*Pro*” dan “*Movere*”. *Pro* berarti maju *Movere* berarti bergerak. Jadi promosi maknanya adalah membuat sesuatu tampak terbuka dan hidup senantiasa (Effendy 1986). Promosi merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang sesuatu yang dijadikan bahan promosi agar khalayak merasa tertarik atau bertambah informasinya. Berdasarkan pendapat Koetler dan Keller (2009:512), bauran komunikasi pemasaran promosi terdiri atas tujuh cara komunikasi, yaitu :

1. *Advertising*
2. *Sales promotion*
3. *Public relation and publicity*
4. *Direct marketing*
5. *Personal selling*
6. *Word of mouth marketing*
7. *Event and experiences*

Dalam pengembangan desa wisata, pemasaran yang digunakan salah satunya melalui pembuatan brosur yang langsung memperlihatkan potensi masing-masing desa wisata, *guide book*. Itu artinya salah satunya cara yang digunakan dalam pemasaran ini adalah *advertising*. Cara *advertising* ini dilakukan oleh

pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui *website*, baik dari *website* resmi pemerintah maupun blog yang dibuat oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Pemasaran melalui *website* tergolong dalam cara *direct marketing*. Tidak hanya dengan cara *advertising* dan *direct marketing*, pemasaran juga dilakukan pemerintah yang dapat melalui forum pertemuan atau pameran yang diadakan oleh pemerintah yang dapat diistilahkan dengan *public relation and publicity*. Cara lain yang digunakan adalah *word of mouth*, yakni mempromosikan dari mulut ke mulut, dimana dalam hal ini staf-staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya untuk memasarkan desa wisata baik di lingkungan pergaulan, keluarga, dan pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemasaran yang spesifik menuju desa wisata dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan mengenai empat aspek dalam pemasaran tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat menduduki peran yang sentral, itu artinya telah terjadi suatu pemberdayaan masyarakat di dalam pemasaran desa wisata, dimana masyarakat yang berperan secara dominan dalam pemasaran, baik dari segi produk, harga, distribusi dan promosi, sedangkan pemerintah hanya membantu dan bertindak sebagai fasilitator. Sayangnya dari keempat faktor tersebut pemerintah harus benar-benar melakukan intervensi terkait dengan aspek harga yang disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang kesetaraan harga. Bagaimana pun pemerintah desa juga pemerintah yang bersangkutan harus mulai mengatur patokan harga agar tidak terjadi perang harga antar sesama pelaku wisata, karena pada dasarnya desa wisata berpijak pada keterlibatan dan peran aktif

masyarakat desa sehingga seharusnya tidak boleh terjadi persaingan yang tidak sehat sesama masyarakat desa yang dapat membuat situasi pengembangan desa wisata menjadi tidak kondusif karena salah satu tujuan dikembangkan ekowisata adalah untuk mengerakkan aktivitas ekonomi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata ini juga masih memerlukan adanya regulasi dan pembagian tugas yang baik antara perangkat desa maupun perangkat desa lainnya agar informasi yang disampaikan sesuai dengan harapan mereka serta perlunya kerja sama antara media massa dengan desa terkait agar tetap ada terpublikasi secara berkelanjutan.

b. Keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung

Aspek kedua dalam pengembangan desa wisata adalah keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung. Masyarakat desa wisata sebagai tuan rumah dan penyelenggara wisata tertentu harus memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pariwisata. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memberikan pelatihan kepada komponen desa wisata, yang di dalam hal ini adalah Pokdarwis beserta perwakilan desa wisata yang merupakan bekal agar memiliki keterampilan dalam menyuguhkan potensi wisata dan melayani wisatawan. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh pelaku wisata, seperti contohnya melatih masyarakat desa tentang cara mengelola desa wisatanya, memandu wisatawan, menerjemahkan objek wisatanya dengan sebaik-baiknya. Pelatihan tersebut dilakukan oleh orang-orang yg memang ahli dibidangnya. Pemateri yang didatangkan merupakan pakar dan praktisi

dibidang perhotelan, sehingga dengan di datangkannya tenaga profesional sebagai pemateri dapat dipastikan apabila hal-hal yang diajarkan merupakan materi yang berkualitas. Selain itu peran Pokdarwis dalam peningkatan keterampilan sangatlah penting karena bagaimanapun ia harus bertanggung jawab untuk melakukan transfer pengetahuan dan informasi yang telah di dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada masyarakat di desanya.

c. Keterlibatan Masyarakat

Sebagai konsep ekowisata berbasis masyarakat, pendekatan pengembangannya pasti melibatkan masyarakat dengan alasan bahwa sektor pariwisata menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, serta pariwisata dapat menciptakan berbagai keuntungan sosial maupun budaya, serta pariwisata dapat membantu mencapai sasaran konservasi lingkungan (Inskeep dalam Tanaya dan Rudianto 2014:73). Dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, adanya keterlibatan penduduk lokal tentu menjadi pelaku wisata yang mengelola, mengembangkan dan mendapatkan keuntungan finansial dari penyelenggaraan desa wisata. Pada dasarnya masyarakat di desa pujon kidul memiliki peran besar terhadap pengelolaan desa wisatanya. Mereka saling membantu dan bekerja sama antar pelaku wisata serta mempromosikan desa wisatanya. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) juga dapat dikatakan menjadi penggerak pengembangan desa wisata melalui transfer pengetahuan dan informasi. Adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, mengandung aspek pemberdayaan masyarakat. Merujuk pendapat Prijono Sonny dan Pranaka (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Teguh (2004:82-83), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam suatu proses pemberdayaan antara lain :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian

Berkaitan dengan pengembangan desa wisata, ketiga aspek tersebut telah dilakukan pemerintah demi memberdayakan masyarakat di masing-masing desa wisata, termasuk desa pujon kidul. Tahap pertama yakni penyadaran dan pembentukan perilaku dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang visi misi Kabupaten Malang yang salah satunya berupaya menjadi kota atau kabupaten pariwisata nasional dan internasional. Dari situ masyarakat sudah mulai mengerti bahwa pariwisata menjadi sektor yang dapat perhatian besar dari pemerintah. Sehingga mulai timbul kesadaran untuk mengembangkan desanya tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam sektor pariwisata. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan cara memberikan pembinaan yang di

dalamnya memperkenalkan dasar-dasar pariwisata dan cara-cara mengelola pariwisata. Dari situ mulai terdapat wawasan baru tentang kepariwisataan, khususnya desa wisatanya. Hal tersebut menjadi hal yang penting karena *mindset* masyarakat sebelumnya berbasis pertanian, sehingga pengenalan konsep pariwisata menjadi hal yang mutlak untuk membuka wawasan masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Sedangkan tahap ketiga adalah peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengadakan pelatihan secara berkala dengan ragam materi tentang pengembangan desa wisata, seperti cara mengelola desa dan produk unggulannya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya mayoritas petani dapat memiliki keterampilan. Diharapkan melalui ketiga tahap tersebut masyarakat memiliki bekal yang cukup mandiri dalam mengembangkan desa wisatanya.

d. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu tidak terlepas begitu saja dari peran pemerintah, melainkan menjadi salah satu perhatian dalam sektor pariwisata. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengembangan desa wisata. Merujuk pada jenis atau kategori kebijakan tersebut menurut James Anderson dalam Suharno (2010:24-25), dapat dikatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang pengembangan desa wisata adalah kebijakan substansial, karena kebijakan pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kebijakan substansial ini berupa visi misi Kabupaten Malang

serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memasukan desa wisata sebagai salah satu perhatian yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Sayangnya hal tersebut dirasa belum cukup mengatur pengembangan desa lingkup kota, padahal juga diperlukan kebijakan yang bersifat regulatori dalam lingkup desa atau kelurahan terkait kesetaraan harga di desa wisata serta mengatur peranan Pokdarwis, karena bagaimanapun juga desa dan kelurahan yang bersangkutan yang menjalankan desa wisata secara langsung.

Solichin Abdul Wahab (2008:40), memberikan beberapa pedoman memahami istilah kebijakan, yakni :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik ekspilisit maupun inplicit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisaisi dan intra organisasi
9. Kebijakan publik mesti tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau di definisikan secara subjektif

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan desa wisata tertuang dalam visi misi Kabupaten Malang serta dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berikut merupakan visi misi Kabupaten Malang 2016-2021 :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Adapun Misi-misi Kabupaten Malang antara lain :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dari visi misi tersebut pemerintah Kabupaten Malang memiliki perhatian khusus dalam hal pariwisata, yang tentu terdapat aspek desa wisata di dalamnya. Demi menjalankan misi no 4 yakni Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, terdapat beberapa strategi terkait dengan pengembangan desa wisata antara lain :

1. Mengembangkan desa atau kelurahan menjadi desa-desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata untuk desa wisata

Adapun dalam menjalankan misi no 6 yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, salah satu sasaraannya memiliki keterkaitan dengan pengembangan desa wisata yaitu terwujudnya infrastruktur pariwisata, yang salah satu straginya berupa pembangunan rest area serta akses menuju lokasi wisata. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan pengembangan dalam dua hal, yaitu infrastruktur dan Sumberdaya Manusia.

Selain dalam hal pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumberdaya manusia, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata atau sering disebut POKDARWIS. Merujuk pada pendapat Rahim (2012:5) sadar wisata digambarkan

sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam dua hal berikut, yaitu :

1. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana dan kondusif sebagaimana yang tertuang dalam slogan Sapta Pesona
2. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air

Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) menjadi kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan secara informal yang dibentuk dari anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan daerahnya) yang menjadi salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan serta peran penting dalam pengembangan wisata di daerahnya yang dalam hal ini adalah desa wisata. Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai salah satu penggerak untuk mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di desanya.

e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal

Adanya pengembangan kemampuan penduduk lokal menjadikan adanya suatu proses pengembangan kapasitas dilingkup masyarakat desa setempat merujuk pada pendapat Ryadi (2006:15) dimensi pengembangan kapasitas terbagi ke dalam tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat sistem.

Pada tingkat individu, *capacity building* ditekankan pada aspek pengetahuan keterampilan, kemampuan dan pengelompokan kerja. Sedangkan pada tingkat organisasi, berkaitan dengan sumberdaya organisasi, budaya organisasi, keterlaksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Tingkatan akhir adalah tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem, dimana seluruh komponen pemerintah termasuk di dalamnya, seperti menyangkut peraturan, serta kebijakan. Apabila merujuk kepada aspek pengembangan kapasitas di desa wisata terjadi di tingkat individu yaitu pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan penduduk lokal demi mengembangka desa wisata dilakukan dengan cara pemberian bimbingan-bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memberikan wawasan secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan dan bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang ada di desanya.

Selama ini peserta dari kegiatan bimbingan dan pembinaan ini adalah Pokdarwis dan perwakilan desa wisata. Itu artinya hanya satu atau dua orang yang mewakili desa wisata untuk mendapatkan wawasan tersebut. Hal ini menjadi tidak efektif apabila wakil yang bersangkutan ternyata bukan orang yang diharapkan oleh pemerintah. Mengetahui hal tersebut maka regulasi mengenai tugas dan peran Pokdarwis tingkat kelurahan atau desa sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun lingkup kelurahan atau desa yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengembangan desa wisat, sehingga apabila regulasi tersebut diberlakukan

anggota pokdarwis akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya di desa wisatanya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Dalam pengembangan desa wisata setidaknya dua faktor pendukung, yakni adanya komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, dan pemberitaan dari media massa. Sebagai faktor pertama, terdapat keselarasan antara pemerintah dan masyarakat desa wisata untuk saling berkomitmen mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat desa pun telah memiliki kesadaran dan upaya untuk mengembangkan desa wisatanya. Sehingga pemerintah tidak perlu berupaya keras dalam memotivasi masyarakat. Komitmen yang tinggi dari masyarakat ditunjukkan melalui visi misi Kabupaten Malang serta RPJMD yang memuat poin mengenai pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu, staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga aktif dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di desa wisata dengan melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala, serta sering mempertemukan pelaku wisata diluar desa wisata untuk melakukan kerja sama. Di lain pihak, komitmen yang tinggi dari masyarakat terlihat dari inisiatifnya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta memasarkan desa wisatanya melalui *website* ataupun blog dan media sosial lainnya.

Faktor pendukung kedua dalam pengembangan desa wisata adalah pemberitaan media massa. Citra Kabupaten Malang sebagai kota wisata sudah dikenal baik skala regional maupun dalam lingkup nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang memberikan potensi Kabupaten Malang, yang salah satunya adalah desa wisata. Pemberitaan tersebut dilakukan baik dari media cetak maupun televisi. Hal itu membawa dampak yang sangat positif karna melalui pemberitaan itulah terjadi promosi dengan cakupan masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi wisatawan yang berdomisili jauh dari Kabupaten Malang.

b. Faktor penghambat

Dibalik adanya faktor pendukung, tentu terdapat pula faktor-faktor yang menghambat pengembangan desa wisata. Faktor tersebut adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata. Faktor penghambat pertama adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata. Merujuk pada pendapat Budiyanto (2010:38), pengembangan ekowisata salah satunya menyangkut peningkatan sarana dan prasarana penunjang dikawasan wisata. Tetapi pada realitasnya, fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih belum memadai bagi aktivitas wisatawan. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah hanya sebatas aksesibilitas sedangkan untuk fasilitas umum penting seperti toilet rest area, pos informasi masih belum dibangun. Pengaduan masyarakat belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga sampai saat ini untuk pemenuhan

fasilitas masih belum terlaksana secara penuh. Hal tersebut menjadi kesalahan yang vital karena pada dasarnya kegiatan pariwisata harusnya dapat menciptakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang salah satunya diperoleh dari adanya fasilitas umum di destinasi wisata. Maka dari itu pemerintah harus memberi perhatian yang lebih intens terkait dengan fasilitas umum yang dibangun di desa wisata.

Faktor kedua adalah rendahnya kemampuan masyarakat pujon kidul dalam hal manajemen potensi wisata. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya masyarakat pujon kidul bekerja dalam sektor pertanian sehingga tidak tahu banyak tentang konsep pariwisata. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga belum melakukan secara intens kepada masyarakat terkait dengan dijadikannya Pujon Kidul sebagai desa wisata. Akibatnya tidak ada pihak yang secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat pujon kidul mengenai bagaimana cara mengelola potensi yang ada. Terlebih Pokdarwis yang diharapkan dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat setempat sekaligus memberikan *transfer knowledge* tidak berperan secara aktif, sehingga pengetahuan dan wawasan yang didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah tidak tersalurkan kepada seluruh masyarakat pujon kidul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan fokus masalah serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan desa wisata terdapat lima aspek yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif, keterlibatan penduduk lokal, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kemampuan penduduk lokal
2. Sebagai aspek pertama yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, hal ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Dari segi pemerintah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang membuat brosur yang masing-masing menunjukkan potensi desa wisata lengkap beserta paket wisata, harga dan akomodasi, beserta potensi wisatanya masing-masing serta *guide book* yang memuat informasi wisata beserta paket wisata, akomodasi dan *contact person* yang dapat dihubungi. Selain itu pemerintah juga melakukan promosi desa wisata melalui event-event yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Sedangkan dari segi masyarakat, masyarakat desa wisata setempat melakukan promosi dengan membuat blog yang memperlihatkan potensi yang ada di desa wisata beserta paket wisatanya.

Aspek ketiga yakni kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tertuang dalam visi misi yaitu ingin mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Kebijakan pemerintah juga terlihat dalam RPJMD Kabupaten Malang yakni berusaha mengembangkan desa menjadi desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Selain itu kebijakan pemerintah dilakukan dengan memberikan sarana prasarana fasilitas kepada masing-masing desa wisata dan bimbingan secara berkala kepada perwakilan desa wisata, serta dengan membuat SK tentang pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang dibentuk sebagai perwakilan desa wisata yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat di desanya dan sebagai mediator antara masyarakat desa dengan pemerintah.

Aspek selanjutnya dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan penduduk lokal, dimana masyarakat desa setempat berperan aktif dalam aspek penentuan objek wisata, pengelolaan desa wisata. Aspek terakhir adalah kemampuan penduduk lokal. Peningkatan kemampuan penduduk lokal dilakukan dengan cara yang sama pelatihan dan bimbingan secara rutin dan berkala kepada perwakilan pokdarwis yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

3. Dalam pengembangan desa wisata terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata antara lain adanya komitmen yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, dan pemberitaan dari media massa. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan nantinya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya memberikan perhatian yang intens terkait sarana dan prasarana untuk menunjang desa wisata. Sarana prasarana tersebut harus dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan dasar dari wisatawan, seperti rest area, pos informasi dan jalan yang dipaving atau aspal yang baik.
2. Disamping pemberian pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis dan wakil dari desa wisata akan lebih baik apabila pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan sosialisasi secara intens mengenai manajemen potensi wisata dan observasi ke desa wisata untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Perlunya pengemasan menarik paket wisata yang berwawasan edukatif dan konservasi bagi para wisatawan sehingga dapat menambah wawasan masyarakat maupun wisatawan dan meningkatnya ekonomi lokal di pujung kidul.
3. Perangkat desa harus mampu membekali diri dengan wawasan mengenai desa wisata agar mampu berperan aktif untuk menggerakkan masyarakatnya dalam pengembangan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascholani, Chasan.. *Membangun Desa Wisata sebagai upaya pengurangan kemiskinan* (<http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20100325101857>)
- Basu Swasta, DH dan Irawan, 2003. *Manajemen pemasaran modern*. Yogyakarta: Liberty
- Darmardjati, RS. 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramit.
- Damanik, Janianton., Webber, Helmut.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata*
- Daryanto, Endri. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Denman, 2001. *Community based Development Planning*. John Willey, and Sons, Inc.
- Fandeli, Chafid., dan Nurdin, Muhammad. 2005. *Pengembangan Ekowisata*
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga
- Haris Sutan Lubis, 2008. "Prinsip-prinsip Ekowisata"
- Koetler, dan Keller. 2009. *Manajemen pemasaran* Edisi 13
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muriawan, Agus Putra. 2006. *Konsep Desa Wisata*. Jurnal Manajemen Pariwisata. Vol. 5 No. 1. Hal 72
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Iwan. 2011. "Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pendit, Nyoman Suwandi. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Cetakan Kelima Pradnya Paramita. Jakarta. Hal. 71
- Pitana, I Gede, Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Priasukmana, Soetarso,. Dan R. Mohammad Mulyadin. 2001. *Info sosial ekonomi pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Vol. 2 No. 1 (2001) pp.37-44

Sastrayuda, Gumelar S. (2010) *Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure*

Sammeng, Andi. Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta : Balai Pustaka

Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Spillane, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta. Kanisius.

Tjahja Supriatna, 2000. *Pembangunan Desa*. Gramedia Pustaka

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah

Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Bandung : Angkasa

Wahab, Yoeti, Oka A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

Zuriah, Nurul. 2009. *Metedeologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara



Lampiran 1

Surat Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 3580 /35.07.207/2018

Untuk melakukan Survey/Research/Penelitian/KKN/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 16420/UN10.F03.11.11/PN/2017 Tanggal: 1 November 2017 Perihal Ijin Prariset

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Prariset oleh:

- Nama / Instansi : Rachmat Hidayat
- Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang
- Thema/Judul/Survey/Research : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat "Community Based Ectourism" (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kab. Malang
- Daerah/tempat kegiatan : di Desa Wisata Pujon Kidul Kec. Pujon Kab. Malang
- Lamanya : 2 Minggu
- Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan - Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 06 November 2017

An. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN MALANG
 Kepala Bidang Ideologi, HAM dan WAsbang
 ub
 Kasubid Wawasan Kebangsaan



Tembusan :
Yth. Sdr.

1. Dekan FIA UB;
2. BAPPEDA Kab. Malang;
3. BPM Kab. Malang;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Malang;
5. Camat Pujon Kab. Malang;
6. Kepala Desa Pujon Kidul Kec. Pujon Kab. Malang;
7. Mhs/Ybs;
8. Arsip.





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.uh.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 16420/UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran :-

Hal : Pra Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Desa Pujon Kidul
Kelurahan Pujon Kidul
Kabupaten Malang

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Rachmat Hidayat
Alamat : Jl. Raya Mulyorejo 24A RT 07/RW 03 Kel. Mulyorejo, Kec. Sukun
NIM : 135030107111045
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat "Community Based Ecotourism" (Studi Pada Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang)
Lamanya : 2 (dua) minggu.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 01 November 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lety Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





Lampiran 2

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

1. Bagaimana awal terbentuknya desa wisata pujon kidul?
2. Bagaimana pengelolaan desa wisata pujon kidul?
3. Bagaimana pengembangan desa ekowisata pujon kidul yang dilakukan oleh pemerintah?
4. Program-program apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan desa ekowisata pujon kidul di kabupaten malang?
5. Bagaimana keterkaitan masyarakat dalam upaya pengembangan desa ekowisata pujon kidul yang dilakukan pemerintah?
6. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata pujon kidul?
7. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa wisata pujon kidul?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT DESA WISATA PUJON KIDUL

1. Bagaimana awal terbentuknya desa wisata pujon kidul?
2. Bagaimana pengelolaan desa wisata pujon kidul?
3. Bagaimana pengembangan desa ekowisata pujon kidul yang dilakukan oleh masyarakat?
4. Program-program apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan desa ekowisata pujon kidul di kabupaten malang?
5. Bantuan apa saja yang telah diberikan pemerintah di desa ekowisata pujon kidul?
6. Bagaimana keterkaitan masyarakat dalam upaya pengembangan desa ekowisata yang dilakukan pemerintah?
7. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam pengembangan desa ekowisata pujon kidul?
8. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan desa ekowisata pujon kidul?



Lampiran 3

Dokumentasi Peneliti



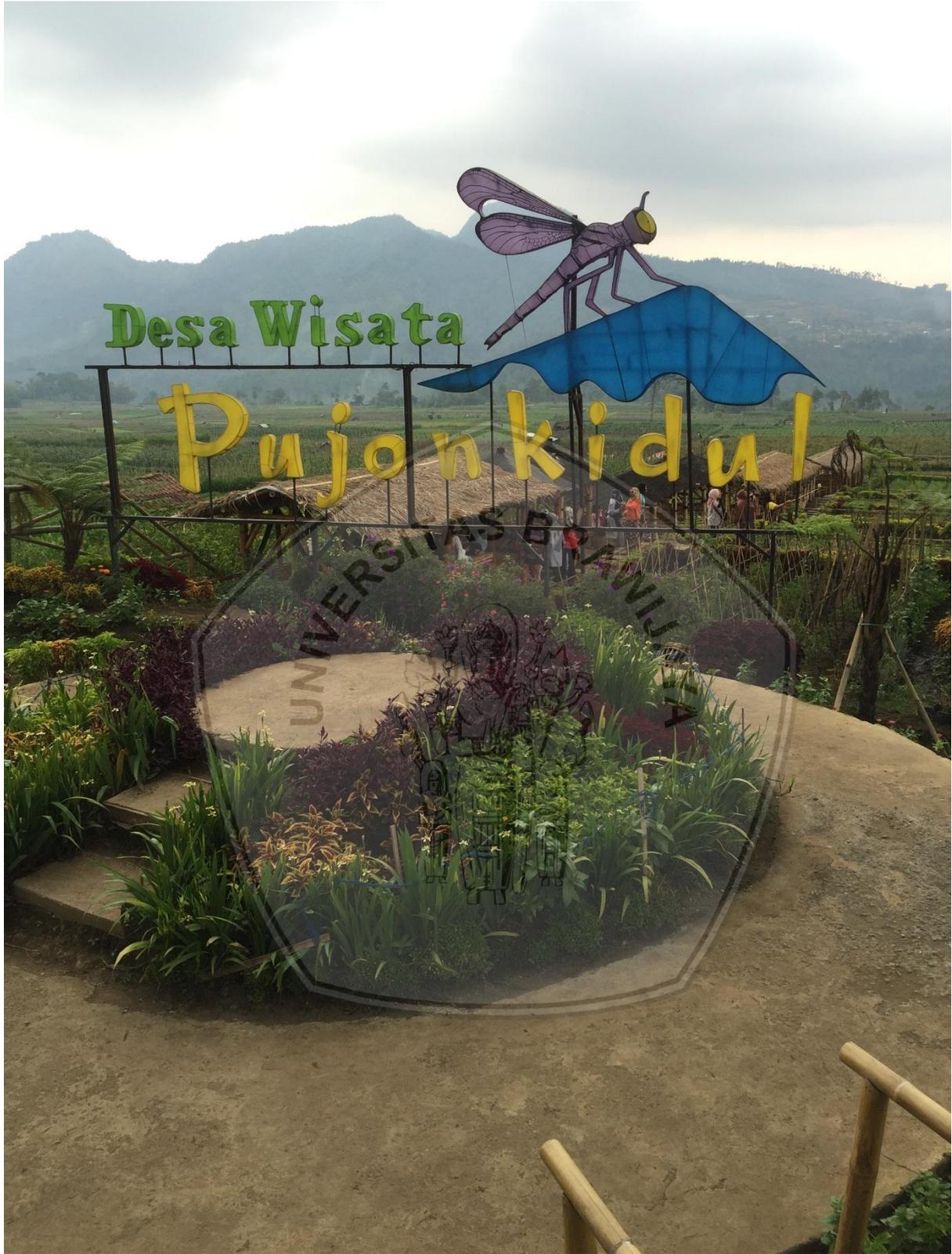
Gambar 1.

Wawancara dengan Bu Nobi selaku Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang



Gambar 2.

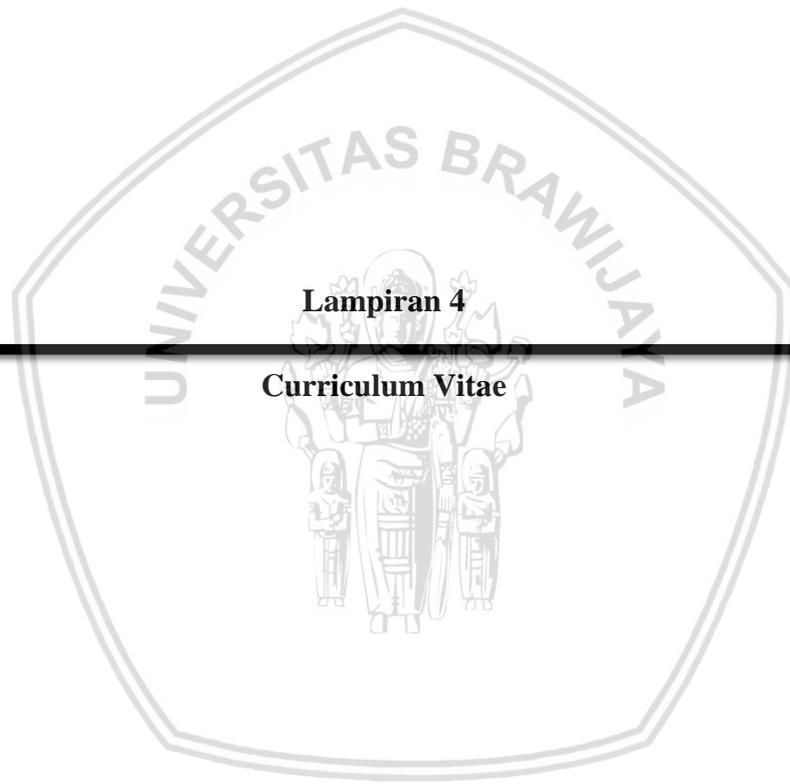
Wawancara dengan bu Ririn Selaku Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul



Gambar 3.
Desa Wisata Pujon Kidul



Gambar 4.
Suasana Desa Wisata Pujon Kidul



Lampiran 4
Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE**A. Identitas Diri**

Nama : Rachmat Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 20 Juni 1995
Umur : 23
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Raya Mulyorejo 24A RT07/RW03 Kec. Sukun Kota Malang
NIM : 135030107111045
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Administrasi/ Administrasi Publik
No. Telepon : 082232991987
Alamat E-mail : dayatboyslooser@gmail.com

**B. Riwayat Pendidikan Formal**

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1	SDN Mulyorejo 3	2001-2007
2	SMPN 19 Malang	2007-2010
3	SMKN 4 Malang	2010-2013
4	S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya	2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan suatu sektor yang saat ini diperhitungkan sebagai aspek yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian negara melalui perolehan devisa. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah bermacam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa tujuan dari kepariwisataan antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk citra tanah air
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuang bangsa
- j. Mempercepat persahabatan antar bangsa

Berdasarkan tujuan dari kepariwisataan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, diharapkan bahwa sektor pariwisata akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menghapus kemiskinan yang saat ini merupakan masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Tanah yang subur menjadi salah satu faktor sehingga segala jenis tanaman dapat tumbuh baik didukung dengan iklim tropisnya, semua kekayaan alam dan hayati merupakan aset yang tidak ternilai. Kekayaan daratan dan perairan baik perairan darat maupun perairan laut selayaknya harus dilestarikan. Pelestarian alam dan sumber daya hayati ini secara berkelanjutan dalam jangka panjang sangat penting, karena kelestarian hidup di masa depan bergantung pada kelestarian alam dan lingkungan. Sehubungan dengan upaya-upaya pelestarian itu, Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya guna melindungi kekayaan alam yang luar biasa ini melalui berbagai kebijakan dan kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat, baik nasional maupun internasional.

Selain upaya-upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah, potensi kekayaan alam dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang melimpah tersebut dikelola dan diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya dengan dasar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera tersebut maka adanya upaya dari pemerintah

yaitu dengan melaksanakan pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam melaksanakan pertumbuhan dan perubahan yang berencana kepada setiap masyarakatnya secara merata dan berkelanjutan. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya-upaya pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan sumber daya alam ini tentu harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, setiap daerah otonom di negara ini diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memutuskan bahwa hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah di era otonomi daerah memiliki peranan yang lebih besar dalam upaya-upaya pelestarian kekayaan hayati ini harus lebih banyak lagi melibatkan partisipasi masyarakat daerahnya. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah perlu dilakukan secara terintegrasi pada semua sektor, sehingga diperoleh manfaat yang lebih besar dari berbagai potensi ekonomi daerah. Selain itu, perencanaan yang terintegrasi juga akan mengurangi dampak-dampak yang tidak diharapkan baik pada saat ini maupun yang akan datang. Sehingga setiap daerah dituntut untuk bersaing secara kompetitif untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan menggali serta mengembangkan potensi daerahnya khususnya pertanian,

kelautan, industri, dan pariwisata guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga dapat membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut :

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan obyek dan daya tarik wisata;
- Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- Mendorong pendayagunaan produksi nasional

Pengembangan potensi sektor pariwisata sering kali dikaitkan dengan peranannya sebagai salah satu kekuatan dari sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah, terutama dengan adanya otonomi daerah pada saat ini, dimana masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menggali potensi yang dimiliki dan mengembangkan potensi-potensi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi penerimaan daerah atau bisanya sektor pariwisata pengembangannya lebih kepada usaha peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin pembangunan disuatu daerah otonom.

Pengembangan pariwisata pada daerah tujuan wisata diharapkan dapat mampu melestarikan kelestarian akan adat istiadat serta budaya lokal dan mampu memberikan tambahan pendapatan pada masyarakat di daerah tujuan wisata. Sesuai dengan pengertian ekologi administrasi publik, menurut Dalton E. 1970 dalam Makmur (2009,h.3) berpendapat bahwa ekologi adalah suatu konsep yang dipinjam dari bidang biologi, dimana istilah tersebut mengacu kepada studi organism dalam kaitannya dengan lingkungan. S. Pamudji 2000 dalam Makmur (2009, h.14), mengungkapkan bahwa ekologi administrasi publik berfungsi sebagai perangsang para administrator (aktor) untuk berusaha dan sekaligus menerima hasil kerja. Ekologi semacam ini merupakan lingkungan hidup administrasi public yang mempunyai faktor yang bersifat fisik alamiah dan faktor sosial masyarakat yang dapat menimbulkan masalah yang harus dipecahkan oleh pembuat kebijakan dan sebaliknya juga membantu mengatasi masalah tersebut. Adanya pengembangan secara fisik serta arus keluar masuk wisatawan sedikit banyak akan membawa pengaruh pada masyarakat lokal, sehingga diperlukan perhatian sejak dini akan dampak pengembangan pariwisata disuatu daerah tempat tujuan wisata guna mewujudkan pengembangan pariwisata yang mampu menjaga kelestarian nilai budaya dan berdaya guna bagi masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Malang diperlukan sebagai usaha baik yang memungkinkan dapat menambah keuangan daerah. Semakin pesatnya pengembangan pada saat ini yang mana tentunya sangat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Dalam mengembangkan potensi

wisata selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar Kabupaten Malang Khususnya.

Jenis pariwisata yang kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk dikembangkan Indonesia saat ini adalah wisata alam, wisata cagar alam, wisata yang memperhatikan konservasi alam yang kemudian dikenal dengan konsep Ekowisata. Tujuan dari penancangan konsep tersebut adalah memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam melestarikan alam dan warisan budaya serta pengembangan Ekowisata. Ekowisata adalah konsep yang mengkonsepkan kombinasi antara kepentingan industri kepariwisataan dengan pecinta lingkungan. Sejalan dengan konsep tersebut pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah.

Seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 tersebut akan menjamin tercapainya sasaran yakni pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya konservasi. Kabupaten Malang memiliki potensi wisata yang menjanjikan bagi pemerintah untuk menambah pendapatan daerah. Saat ini peningkatan investasi ke dalam wilayah Kabupaten Malang sangat signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya guna mengembangkan objek-objek wisata di Kabupaten Malang.

Pengembangan Ekowisata juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan wisatawan yang pada umumnya berasal dari Kota, menginginkan suasana baru di pedesaan atau di alam yang jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk Kota. Jawa Timur dengan wilayah daerah yang sangat luas, memiliki potensi berupa lahan yang cukup luas dan iklim yang mendukung untuk dikembangkan program Ekowisata. Namun menurunnya kualitas lingkungan hidup di Jawa Timur kian hari semakin memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan adanya perubahan kualitas udara, air, meningkatnya aktivitas industri dan pertanian. Kerusakan lingkungan hidup pada akhirnya akan membawa kerugian khususnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Adapun dampak positif dengan adanya pengembangan Ekowisata ini seperti menambah pemasukan daerah yang bertujuan untuk investasi sarana dan prasarana serta melaksanakan program-program pembangunan dan mengentaskan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat apabila masyarakat sekitar memiliki potensi bisnis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan wisata. Akan tetapi dibalik itu semua terdapat dampak negatif jika pemerintah tidak dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan muncul akibat pengembangan pariwisata yang pesat tersebut antara lain adalah tergeser sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan dan tingginya tingkat perbedaan pendapatan pada setiap masyarakat. Selain itu juga tingginya tingkat perbedaan pendapatan di tiap masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kecakapan beberapa kelompok masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan peluang usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan daerah, hal tersebut terjadi

karena kurangnya modal atau pengetahuan dari masyarakat itu sendiri seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar kelompok masyarakat di Kabupaten Malang bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah sehingga kurang pengetahuan dan jaringan.

Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya dapat melakukan beberapa hal guna menanggulangi dampak negatif tersebut, antara lain dengan penguatan konsep Ekowisata yang perlu diintensifkan guna menciptakan sebuah model wisata baru yang dekat dengan alam serta lingkungan sosial masyarakat pedesaan. Dalam hal ini keunikan tradisi dan kebiasaan lokal hendaknya dapat diangkat secara lebih matang di wilayah Kabupaten Malang. Ekowisata adalah kegiatan alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Dengan dikembangkannya Ekowisata di kawasan Desa Wisata Pujon Kidul menumbuhkan banyak harapan bagi masyarakat, terutama harapan untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin ramainya wisatawan yang berkunjung mampu membuka kesempatan kerja yang semakin luas dan juga telah menumbuhkan harapan dan cita-cita munculnya peluang meningkatkan pendidikan, karena penambahan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka sehingga anak-anak tersebut mempunyai kesempatan lebih baik di masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang??

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah dilakukan. Sesuai dengan rumusan masalah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang



D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik bagi mahasiswa, Fakultas Ilmu Administrasi, ataupun instansi yang bersangkutan. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu :

1. Kontribusi Akademis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang Ekowisata, baik bagi peneliti maupun pembaca, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
- b. Sebagai salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti berikutnya yang mempunyai tema atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat, dimana hal ini penting untuk kesejahteraan rakyat.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan sebagai bahan evaluasi mengenai kegiatan mereka dalam meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan kesejahteraannya.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Pariwisata di Kabupaten Malang dan

Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon
Kidul Kabupaten Malang

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian mengenai Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. Dalam bab ini juga terdapat rumusan masalah yang akan diteliti dalam rangka membatasi penelitian, kemudian juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan dengan penulisan skripsi yang nantinya digunakan untuk melandasi pemikiran dalam pembahasan masalah dari penelitian yang dilakukan, seperti mengenai Konsep Ekowisata, Ekowisata Berbasis Masyarakat, Desa Wisata dan Pembangunan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yaitu penggambaran instansi dan lokasi penelitian yang bersangkutan beserta masalah secara kronologis menurut tujuan penelitian, serta bagaimana Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan yang dapat dijadikan pertimbangan dan bermanfaat bagi instansi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Malang dalam mengembangkan desa wisata.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Lokus dari ilmu administrasi (*interest*) dan urusan publik (*public affair*). Sedangkan fokus dari ilmu administrasi publik yaitu teori organisasi dan ilmu manajemen.

Masyarakat Indonesia telah lama mengenal administrasi, dikarenakan banyak anggota masyarakat yang telah melakukan hubungan kerja dengan kantor pemerintahan. Namun demikian istilah administrasi saat ini tidak hanya digunakan pada kantor pemerintahan, tetapi juga digunakan pada kantor non pemerintah karena administrasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi menurut Siagian dalam Pasolong (2007:3), “merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), Administrasi publik merupakan “proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk

memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing definisi tersebut memiliki beberapa kesamaan yaitu:

1. Administrasi merupakan suatu proses kerjasama.
2. Proses kerjasama tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara rasional.
3. Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ketiga persamaan tersebut merupakan syarat atau faktor penyebab terjadinya administrasi. Tanpa adanya salah satu faktor itu maka tidak akan terjadi administrasi.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (siagian, 2009:4). The liang gie (dalam pasalong, 2011:3) mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi

karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsure-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara

langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Menacapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Siagian (2009:5) mendefinisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Mostopadidjaya dalam affudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin Ilmu-ilmu yang lain yaitu :

a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik

b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.

Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang di maksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan yang efektif.

A. Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan menurut Prof. Salah Wahab dalam Oka A Yoeti (2003:5) pariwisata adalah salah satu dari industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan. Lagipula pariwisata sebagai sektor yang kompleks, meliputi industry-industri dalam arti

klasik seperti misalnya industri kerajinan tangan dan industri cinderamata, penginapan serta transportasi.

Menurut Sammeng (2001:1) kata wisata dan wisatawan termasuk sudah menjadi pembendaharaan Bahasa Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan wisata adalah 1. Berpakaian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan sebagainya), 2. Piknik. Wisatawan = orang yang berwisata, pelancong, turis. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:49-50) kepariwisataan memiliki dua aspek kelembagaan dan aspek substansial yaitu sebuah aktivitas manusia. Dilihat dari sisi kelembagaannya, pariwisata merupakan lembaga yang dibentuk sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan rekreatifnya. Sebagai sebuah lembaga, pariwisata dapat dilihat dari sisi manajemennya yakni bagaimana perkembangannya dari mulai direncanakan, dikelola sampai dipasarkan pada pembeli yaitu wisatawan.

Menurut Suwanto (2004:3) bahwa pariwisata pada hakekatnya adalah suatu proses kegiatan sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan bepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan atau karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Sedangkan menurut Yoeti (2008:8) pariwisata memenuhi empat kriteria di bawah ini yaitu :

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ketempat yang lain. Perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.

2. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih, kecuali bagi *excursionist* (kurang dari 24 jam).
3. Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang tanpa mencari nafkah dinegara, kota yang dikunjungi.
4. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, dimana ia biasanya tinggal atau berdiam dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Berdasarkan pendapat dari pakar di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu yang bersifat kompleks dengan melibatkan kegiatan manusia di sebuah obyek wisata yang berupa sarana dan prasarana kondisi wisata dan lain sebagainya.

2. Bentuk Pariwisata

Menurut Pendit (2002:37) bentuk pariwisata dapat dibagi menjadi lima kategori yaitu menurut asal wisatawan, menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran, menurut jangka waktu, menurut jumlah wisatawan, dan menurut alat angkut yang digunakan. Bentuk-bentuk pariwisata tersebut dijelaskan dibawah ini:

a. Menurut asal wisatawan

Wisatawan itu berasal dari dalam atau luar negeri. Kalau asalnya dari dalam negeri berarti sang wisatawan hanya pindah tempat sementara di dalam lingkungan wilayah negerinya sendiri dan selama ia mengadakan perjalanan.

b. Menurut akibatnya terhadap neraca pembayaran

Kedatangan wisatawan dari luar negeri adalah membawa mata uang asing. Pemasukan valuta asing ini berarti memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran luar negeri suatu negara yang dikunjunginya, hal ini disebut pariwisata aktif. Sedangkan kepergian seorang warga negara keluar negeri memberikan dampak negatif terhadap neraca pembayaran luar negerinya, disebut pariwisata pasif.

c. Menurut jangka waktu

Kedatangan seseorang wisatawan di suatu tempat atau negara diperhitungkan pula menurut waktu lamanya ia tinggal di tempat atau negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan istilah-istilah pariwisata jangka pendek dan pariwisata jangka panjang, yang mana tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara untuk mengukur pendek atau panjangnya waktu yang dimaksudkan.

d. Menurut jumlah wisatawan

Perbedaan ini diperhitungkan atas jumlah wisatawan yang datang, apakah sang wisatawan datang sendiri atau rombongan. Maka timbullah istilah-istilah pariwisata tunggal dan pariwisata rombongan.

e. Menurut alat angkut yang dipergunakan

Dilihat dari segi penggunaan yang dipergunakan oleh sang wisatawan, maka kategori ini dapat dibagi menjadi pariwisata udara, pariwisata laut,

pariwisata kereta api, pariwisata mobil, tergantung apakah sang wisatawan tiba dengan pesawat, mobil, kereta api, kapal laut atau mobil.

3. Jenis Pariwisata

Menurut Spillane (1991:28-31) jenis pariwisata dibagi menjadi enam yaitu:

a. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*)

Bentuk pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu, untuk menikmati keindahan alam, dan lain-lain.

b. Pariwisata untuk rekreasi

Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari-hari liburnya untuk beristirahat untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin menyegarkan dan kelelahannya.

c. Pariwisata untuk kebudayaan (*Cultur Tourism*)

Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi, seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat istiadat, cara hidup rakyat, dan lain-lain.

d. Pariwisata untuk olahraga (*Sport Tourism*), dibagi menjadi:

1. *Big sport events*, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti olimpiade game, kejuaraan tinju dunia, dan lain-lain.
2. *Sporting tourism of the practitioners*, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri, seperti pendaki gunung, rafting, berburu, dan lain-lain

e. Pariwisata untuk urusan usaha dagang (*Business Tourism*)

Jenis pariwisata ini seperti industri pariwisata, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, kunjungan ke instansi teknis yang bahkan menarik orang-orang luar profesi ini.

f. Pariwisata untuk berkonveksi (*Convention Tourism*)

Peranan jenis wisata ini makin lama makin penting. Konveksi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal di beberapa kota atau negara penyelenggara.

4. Tujuan Pariwisata

Tujuan pariwisata telah dijabarkan oleh para ahli di bidang pariwisata sebagai optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber daya pariwisata. Daerah tujuan wisata menurut Surjanto dalam Karyono (1997:11) yaitu daerah-daerah yang berdasarkan kesiapan prasarana dan sarana dinyatakan siap menerima kunjungan wisatawan. Daerah tujuan wisata diharuskan memiliki objek wisata dan daya tarik wisata (atraksi wisata) sebagai media untuk menarik minat wisatawan.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan membawa perubahan pada daerah tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat bernilai positif jika pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang benar, yakni melalui perencanaan yang cermat dan matang supaya sesuai dengan kondisi setempat. Namun demikian, jika pelaksanaannya tidak direncanakan dengan baik

maka justru akan membawa kerugian atau berdampak negatif bagi daerah tempat pariwisata.

5. Potensi Pariwisata

Definisi potensi menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1994:576) potensi adalah kesanggupan, daya dan kemampuan untuk lebih berkembang. Sedangkan menurut Pendit (2004:117) menyebutkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dibagi 2 yaitu:

- a. Potensi Budaya
Merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, mata pencaharian, kesenian dan budaya.
- b. Potensi Alamiah
Merupakan potensi yang ada di masyarakat, yang berupa potensi fisik dan geografi seperti alam.

Jadi yang dimaksud potensi wisata adalah segala hal dan keadaan baik dan nyata dan dapat diraba maupun yang tidak meraba, yang digarap, diatur dan disediakan sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat dan dimanfaatkan atau diwujudkan sebagai kemampuan, faktor dan unsur yang diperlukan atau menentukan bagi usaha dan pengembangan kepariwisataan, baik itu berupa suasana, kejadian, benda maupun layanan atau jasa-jasa (Darmadjati, 2001:128).

B. Konsep Ekowisata

1. Definisi Ekowisata

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata

yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (Fandeli dan Mukhlison, 2005).

Ekowisata dapat di definisikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan yang mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan yang konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat (Dirjen Pariwisata, 1995). Masyarakat ekowisata Indonesia pada tahun 1977 mendefinisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami dimana tujuannya untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap udaha-usaha konservasi alam serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata.

Batasan tentang ekowisata juga diberikan oleh beberapa organisasi atau pakar luar negeri seperti :

- a. Australian National Ecotourism Strategy, 1994 :

Ekowisata adalah wisata berbasis alam yang berkaitan dengan pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip berkelanjutan.

- b. Alam A. Leq, Ph.D the Ecotourism Market in The Asia Pacific Region, 1996: Ekowisata adalah kegiatan petualangan, wisata alam, budaya dan alternatif yang mempunyai karakteristik.
- c. Hector Cebollos Lascuarin, 1987

Ekowisata adalah kealam perawan yang relatif belum terjamah atau tercemar dengan tujuan khusus mempelajari, mengagumi, serta perwujudan bentuk budaya yang ada di dalam kawasan tersebut.

Ekowisata yang berasaskan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan prinsip yang penting dalam visi ekowisata, ditambah dengan pembedayaan masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi landasan pengembangan untuk merumuskan misi. Misi ekowisata dapat dijabarkan melestarikan alam dengan mengkonversi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Penciptaan lapangan kerja setempat, pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan pendapatan lokal maupun regional secara adil, dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan ekowisata yang menentukan kewilayahannya berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaannya.

2. Perspektif Ekowisata

Ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menaruh perhatian besar terhadap kelestarian sumberdaya pariwisata. Berdasarkan Damanik dkk. (2006) selanjutnya disebutkan ada tiga perspektif ekowisata yaitu :

- a. Ekowisata sebagai produk yaitu semua astraksi yang berbasis pada sumberdaya alam.
- b. Ekowisata sebagai pasar yaitu perjalanan diarahkan pada upaya-upaya pelestarian lingkungan.

- c. Ekowisata sebagai pendekatan pengembangan yaitu metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pariwisata secara ramah lingkungan.

3. Elemen Penting Ekowisata

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009), ekowisata memiliki banyak definisi, yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya mengacu pada 5 (lima) elemen penting, yaitu :

- a. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai pelayanan yang prima.
- b. Memperkecil dampak negatif yang bias merusak karakteristik lingkungan dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi.
- c. Mengikutsertaka masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya.
- d. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit (menguntungkan).
- e. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari elemen ekowisata tersebut, terdapat beberapa cakupan ekowisata yaitu untuk edukasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi, serta upaya dalam kegiatan konservasi.

4. Prinsip dan Kriteria Ekowisata

Pengembangan ekowisata di dalam hutan yang tidak mengenal kejenuhan pasar, dapat menjadikan wisata alam sebagai salah satu tujuan wisata. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata harus mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata, untuk mencapai keberhasilan ekowisata dalam mempertahankan kelestarian dan pemanfaatan (Fandelli, 2005). Menurut Damanik dkk. (2006), prinsip-prinsip ekowisata antara lain :

- a. Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata.
- b. Mengembangkan kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya dengan tujuan wisata, baik pada diri wisatawan, masyarakat lokal maupun pelaku wisata lainnya.
- c. Menawarkan pengalaman-pengalaman positif bagi wisatawan maupun masyarakat, melalui kontak budaya yang lebih intensif dan kerjasama dalam pemeliharaan atau konservasi daerah tujuan objek ekowisata.
- d. Memberikan keuntungan finansial secara langsung bagi keperluan konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan.

- e. Memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal, dengan menciptakan produk wisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal.
- f. Memberikan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata.
- g. Menghormati hak asasi manusia dan perjanjian kerja, dalam arti memberikan kebebasan kepada wisatawan dan masyarakat lokal untuk menikmati atraksi wisata sebagai wujud hak asasi, serta tunduk kepada aturan main yang adil dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi-transaksi wisata.

Dalam pengembangan ekowisata, diperlukan sebuah dukungan khusus dalam pengadaan produk wisata, yang dapat menjadi bahan pertimbangan wisatawan. Wisatawan dengan minat khusus, umumnya memiliki latar belakang intelektual yang lebih baik, pemahaman serta kepekaan yang lebih terhadap etika, moralitas, dan nilai-nilai tertentu, sehingga bentuk dari wisata ini adalah untuk mencari pengalaman baru (Fandeli dkk., 2005).

Secara umum, basis pengembangan wisata minat khusus menurut Fandeli dkk. (2005) yaitu :

- a. Aspek alam seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi, hidrologi, hutan alam atau taman nasional.
- b. Objek dan daya tarik wisata budaya yang meliputi budaya peninggalan sejarah dan budaya kehidupan masyarakat. Potensi ini selanjutnya dapat dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah, wisata pedesaan

dan sebagainya. Wisatawan memiliki minat untuk terlibat langsung dan berinteraksi dengan budaya masyarakat setempat, serta belajar berbagai hal dari aspek-aspek budaya yang ada.

Prinsip, pengembangan dan kriteria Ekowisata yang disusun oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bekerjasama dengan Indonesia Ecotourism Network (INDECON), yang secara konseptual menekankan beberapa prinsip dasar, yaitu :

- a. Prinsip Konservasi yaitu pengembangan ekowisata harus mampu memelihara, melindungi atau berkontribusi untuk memperbaiki sumberdaya alam. Prinsip konservasi alam diartikan sebagai memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam serta dalam pengembangannya harus mengikuti kaidah ekologis. Prinsip konservasi alam memiliki tujuh kriteria :
 - 1) Memperhatikan kualitas daya dukung lingkungan daerah tujuan wisata melalui zonasi
 - 2) Mengelola dan menciptakan kegiatan wisata yang berdampak rendah dan ramah lingkungan
 - 3) Menyisihkan hasil keuntungan untuk kegiatan konservasi dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia setempat
 - 4) Menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan pengunjung, sarana dan fasilitas
 - 5) Mengembangkan kegiatan interpretasi untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi para pelaku dan pengunjung terhadap lingkungan alam dan budaya

6) Melakukan monitoring kegiatan untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkan

7) Mengelola usaha secara sehat

b. Prinsip Konservasi Budaya. Konservasi budaya memiliki prinsip peka dan menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat. Prinsip konservasi budaya memiliki tiga kriteria :

- 1) Melakukan penelitian dan mengenakan aspek-aspek sosial budaya masyarakat setempat sebagai bagian terpadu dalam proses perencanaan dan pengelolaan ekowisata
- 2) Melakukan pendekatan, meminta saran-saran dan mencari masukan dari tokoh/ pemuka masyarakat setempat pada tingkat paling awal sebelum memulai langkah-langkah dalam proses pengembangan ekowisata
- 3) Menerapkan kode etik ekowisata bagi wisatawan, pengelola dan pelaku usaha ekowisata, yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan tradisi setempat.

c. Prinsip Ekonomi. Pengembangan ekowisata harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat, khususnya setempat, dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang bangunan yang seimbang antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan kepentingan semua pihak. Prinsip ekonomi memiliki dua kriteria :



- 1) Membuka kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berusaha dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi kegiatan ekowisata baik secara aktif maupun pasif
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam upaya meningkatkan usaha ekowisata untuk kesejahteraan penduduk setempat

d. Prinsip Edukasi. Pengembangan ekowisata harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang menjadi memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian alam, lingkungan dan budaya. Prinsip edukasi memiliki lima kriteria :

- 1) Mengoptimalkan keunikan dan kekhasan daerah sebagai daya tarik wisata
- 2) Memanfaatkan dan mengoptimalkan pengetahuan tradisional yang berbasis pelestarian alam dan budaya serta nilai-nilai yang dikandung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai nilai tambah
- 3) Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai interpretasi lokal dari produk ekowisata
- 4) Memberikan pengalaman yang berkualitas dan bernilai bagi pengunjung
- 5) Dikemas dalam bentuk dan teknik dan penyampaian yang komunikatif dan inovatif

e. Prinsip Wisata. Pengembangan ekowisata harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinal kepada pengunjung, serta

memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Prinsip wisata memiliki lima kriteria :

- 1) Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan keamanan dan keselamatan di lapangan.
 - 2) Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan pengunjung, kondisi setempat dan mengoptimalkan kandungan material lokal
 - 3) Memprioritaskan kebersihan dan kesehatan dalam segala bentuk pelayanan, baik fasilitas maupun jasa
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan jasa dan informasi yang benar
 - 5) Memprioritaskan keramahan dalam sikap pelayanan
- f. Prinsip partisipasi masyarakat. Perencanaan dan pengembangan harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat. Prinsip partisipasi masyarakat memiliki beberapa kriteria :
- 1) Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan ekowisata
 - 2) Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata
 - 3) Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan

- 4) Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata
- 5) Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (leakage) serendah-rendahnya
- 6) Meningkatkan pendapatan masyarakat

(Sumber : Haris Sutan Lubis, 2008)

5. Pengembangan Ekowisata

Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan tentang makna dari istilah pengembangan. Berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daryanto, 1997:350), pengembangan diartikan sebagai “proses, cara, perbuatan, mengembangkan”. Sedangkan menurut Pamuji (1985:7), pengembangan merupakan suatu pengembangan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi, dengan demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu sesuai atau cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik atau bermanfaat. Sesuai dengan topik dari penelitian ini, maka pengembangan yang dilakukan merupakan pengembangan dalam ekowisata. Merujuk pada dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat dengan Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:4), prinsip-prinsip pengembangan ekowisata dapat digunakan dengan berbasis pada masyarakat dan konservasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Keberlanjutan ekowisata dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan (prinsip konservasi dan partisipasi masyarakat)
Ekowisata yang dikembangkan dikawasan konservasi adalah ekowisata yang “HIJAU dan ADIL” (*Green & Fair*) untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan dan konservasi, yaitu sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyediakan alternatif ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat dikawasan yang dilindungi, berbagai manfaat dari upaya konservasi secara layak (terutama masyarakat yang lahan dan sumberdaya alamnya berada dikawasan yang dilindungi), dan berkontribusi pada konservasi dengan meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap perlindungan bentang lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, dan nilai sejarah yang tinggi.
2. Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (Prinsip partisipasi masyarakat)
Aspek organisasi dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata juga menjadi isu kunci : pentingnya dukungan yang profesional dalam menguatkan organisasi lokal secara kontinyu, mendorong usaha yang mandiri dan menciptakan kemitraan yang adil dalam pengembangan ekowisata. Beberapa contoh di lapangan menunjukkan bahwa ekowisata di tingkat lokal dapat dikembangkan melalui kesepakatan dan kerjasama yang baik antara *Tour Operator* dan organisasi masyarakat (contohnya : KOMPAKH, LSM, Tana Tam). Peran organisasi masyarakat sangat penting oleh karena masyarakat adalah *stakeholder* utama dan akan mendapatkan manfaat secara langsung dari pengembangan dan pengelolaan ekowisata. Koordinasi antar *stakeholder* juga perlu mendapatkan perhatian. Salah satu model percontohan organisasi pengelolaan ekowisata yang melibatkan *stakeholder* termasuk masyarakat, pemerintah daerah, UPT, dan sektor swasta, adalah “Rinjani Trek *Management Board*”. Terbentuknya Forum atau dewan pembina akan banyak membantu pola pengalolaan yang adil dan efektif terutama di daerah dimana ekowisata merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.
3. Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)
Homestay adalah sistem akomodasi yang sering dipakai dalam ekowisata. *Homestay* bisa mencakup berbagai jenis akomodasi dari penginapan sederhana yang dikelola secara langsung oleh keluarga sampai dengan menginap di rumah keluarga setempat. *Homestay* bukan hanya sebuah pilihan akomodasi yang tidak memerlukan modal yang tinggi, dengan sistem *homestay* pemilik rumah dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari kunjungan turis, dan distribusi manfaat di masyarakat lebih terjamin. Sistem *homestay* mempunyai nilai tinggi sebagai produk ekowisata dimana seorang turis mendapatkan kesempatan untuk belajar mengenai

alam, budaya masyarakat dan kehidupan sehari-hari di lokasi tersebut. Pihak turis dan pihak tuan rumah bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain, dan dengan itu dapat menumbuhkan toleransi dan pemahaman yang lebih baik. *Homestay* sesuai dengan tradisi keramahan orang Indonesia. Dalam ekowisata, pemandu adalah orang lokal yang pengetahuannya dan pengalamannya tentang lingkungan dan alam setempat merupakan asset terpenting dalam jasa yang diberikan kepada turis. Demikian juga seorang pemandu lokal akan merasakan langsung manfaat ekonomi dari ekowisata, dan sebagai pengelola juga akan menjaga kelestarian alam dan objek wisata.

4. Prinsip Edukasi:

Ekowisata memberikan banyak peluang untuk memperkenalkan pada wisatawan tentang pentingnya perlindungan alam dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Dalam pendekatan ekowisata, Pusat Informasi menjadi hal yang penting dan dapat juga dijadikan pusat kegiatan dengan tujuan meningkatkan nilai dari pengalaman seorang turis yang bisa memperoleh informasi yang lengkap tentang lokasi, kawasan dari segi budaya, sejarah alam, dan menyasikan acara seni, kerajinan dan produk budaya lainnya.

5. Pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata (Prinsip konservasi dan wisata).

Dalam perencanaan kawasan ekowisata, daya dukung (*carrying capacity*) perlu diperhatikan sebelum perkembangannya ekowisata berdampak negatif terhadap alam (dan budaya) setempat. Aspek dari daya dukung yang perlu dipertimbangkan adalah: jumlah turis/tahun; lamanya kunjungan turis; berapa sering lokasi yang "rentan" secara ekologis dapat dikunjungi; dll. Zonasi dan pengaturannya adalah salah satu pendekatan yang akan membantu menjaga nilai konservasi dan keberlanjutan kawasan ekowisata.

Selain itu terdapat pendapat lain mengenai pengembangan ekowisata dikemukakan oleh Nugroho (2011:17) mengemukakan bahwa pengembangan jasa ekowisata diharuskan memiliki manajemen yang profesional, mencakup :

1. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran menempati posisi penting untuk menjangkau dan menarik pengunjung seluruh dunia. Mereka diharapkan menjadi sumber informasi bagi pengunjung lainnya agar dapat membantu konservasi lingkungan dan pengembangan masyarakat lokal.
2. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif. Layanan ekowisata adalah pengalaman dan pendidikan terhadap

lingkungan atau wilayah yang baru. Kepuasan pengunjung akan tercapai melalui ragam layanan yang sabar dan efektif.

3. Keterlibatan penduduk lokal dalam memandu dan menerjemahkan objek wisata. Penduduk lokal akan memiliki intensif konservasi lingkungan apabila ia dilibatkan dalam jasa-jasa ekowisata, pemberian informasi, dan memperoleh manfaat yang pantas.
4. Kebijakan pemerintah dalam kerangka melindungi aset lingkungan dan budaya. Kebijakan penataan ruang, pemberdayaan kemasyarakatan atau dikombinasi dengan instrument pasar beroperasi di wilayah tujuan wisata.
5. Pengembangan kemampuan penduduk lokal. Penduduk lokal dan lingkungannya adalah kesatuan utuh wilayah ekowisata. Mereka perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh *benefit* agar tercipta intensif dan motivasinya untuk ikut mengonservasi lingkungannya.

Peran pemerintah daerah sangat penting untuk mengoperasionalkan pengembangan ekowisata yang dilandasi prinsip-prinsip sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Ekowisata di Daerah, dalam Pasal 2 yaitu :

- a. Kesesuaian antara jenis dan karakteristik ekowisata.
- b. Konservasi, yaitu melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan secara lestari sumberdaya alam yang digunakan untuk ekowisata.
- c. Ekonomis, yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan.
- d. Edukasi, yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.
- e. Memberikan kepuasan dan pengalaman kepada pengunjung.

- f. Partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ekowisata dengan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan, dan
- g. Menampung kearifan lokal

Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah dapat menjamin tercapainya sasaran yaitu pertumbuhan ekonomi wilayah, pengunjung memperoleh pengalaman dan keterampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan, swasta memperoleh nilai tambah dan pemerintah daerah memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya-upaya konservasi.

Seiring dengan berkembangnya tujuan-tujuan ekowisata diluar taman nasional atau otoritas kementerian, serta semangat pembangunan ekonomi daerah, sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 pelaku usaha ekowisata dapat berbentuk perseorangan dan/atau badan hukum, atau pemerintah daerah atau kerja sama diantara mereka. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengendalian melalui pemberian izin, pengembangan ekowisata, pemantauan pengembangan ekowisata, penertiban atas penyalahgunaan izin pengembangan ekowisata, dan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan ekowisata. Pengendalian ekowisata dilakukan antara lain terhadap fungsi kawasan, pemanfaatan ruang, pembangunan sarana dan prasarana, kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis dan kelestarian ekowisata.

Kegiatan ekonomi kepariwisataan terkait dengan usaha pariwisata. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 14, usaha pariwisata meliputi, antara lain :

- a. Daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- b. Kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata
- c. Jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan regular/umum.
- d. Jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan
- e. Jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, boga, dan bar/kedai minum.
- f. Penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya,

- berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan, caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkupnya berupa kegiatan usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
- i. Jasa informasi pariwisata adalah jasa yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- j. Jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- k. Jasa pramuwisata usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan.
- l. Wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya

yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

- m. Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan minuman/makanan sehat, oleh aktivitas fisik dengan tujuan dengan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperlihatkan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Secara formal pengembangan pariwisata yang berbasis komunitas ini merupakan kebijakan resmi pemerintah sebagaimana tersirat dalam prinsip kepariwisataan Indonesia yang dirumuskan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang mencakup prinsip :

- a. Masyarakat sebagai kekuatan dasar.
- b. Pariwisata ; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, serta
- c. Pariwisata adalah kegiatan seluruh lapisan masyarakat, sedang pemerintah hanya merupakan fasilitator dari kegiatan pariwisata.

Sedangkan realisasi dari prinsip ini tertuang di dalam 7 program pokok dalam kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata yang terdiri dari :

- a. Pengembangan ekowisata
- b. Desa wisata
- c. Pariwisata inti rakyat
- d. Kemitraan
- e. Pengembangan usaha rakyat kecil

- f. Pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata, dan
- g. Peningkatan partisipasi dalam pengembangan pariwisata

6. Strategi Program Pengembangan Ekowisata

- a. Strukturisasi kewilayahan berdasarkan ekosistem dan kesatuan pengelolaan
- b. Pengembangan berkesinambungan ekosistem daratan dan perairan
- c. Meningkatkan kualitas dan fungsi pelestarian dalam kawasan hutan
- d. Pengembangan ekowisata berkeadilan skala lokal, regional, nasional

(Sumber : Fandeli, 2005)

C. Ekowisata Berbasis Masyarakat (community-based ecotourism)

Merujuk pada Dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), pola ekowisata berbasis masyarakat adalah pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha ekowisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat

lokal dalam mengelola kegiatan wisata dikawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola.

Pendapat lain mengenai ekowisata berbasis masyarakat dikemukakan oleh Schevyns dalam Jones(2005:3) :

ecotourism ventures only be considered “successful” if lokal community have some measure of control and share equitably in the benefits. The term “community-based ecotourism” should be reserved for that ventures based on high degree of community control (and hence where communication command a large proportion of the benefits) rather than those almost holly controlled by outside operators.

“usaha ekowisata hanya akan dianggap berhasil apabila komunitas lokal memiliki beberapa ukuran control dan pembagian manfaat secara adil. Istilah “ekowisata berbasis masyarakat” seharusnya dilaksanakan untuk usaha tersebut berdasarkan dengan tingginya tingkat control (karenanya komunikasi memegang porsi yang besar dalam pemanfaatan) daripada secara penuh dikontrol oleh pihak-pihak luar”. Selain itu pendapat dari WWF international beranggapan bahwa :

community-based ecotourism takes the social dimension of ecotourism a stage further, by developing a form of ecotourism where the local community has substantial control over and involvement in, its’s development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community.

“Ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial dari ekowisata selangkah lebih lanjut, dengan membangun konsep ekowisata dimana komunitas

lokal memiliki control secara substansial dan keterlibatan dalam pembangunan dan manajemen, serta memiliki proporsi utama dalam kemanfaatan yang kembali lagi kepada masyarakat”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ekowisata berbasis masyarakat merupakan konsep ekowisata dengan kecenderungan melihat dimensi sosial kemasyarakatan yang ada. Sehingga masyarakat harus memiliki peran dalam pembangunan dan pengelolaannya dan harus mendapatkan manfaat paling besar dari diselenggarakannya ekowisata.

Merujuk pada kerjasama Direktorat Produk Pariwisata Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia (2009:2), beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah :

- a. Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan pariwisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
- b. Prinsip *local ownership* (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan prasarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat)
- c. *Homestay* menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
- d. Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
- e. Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggung jawab masyarakat setempat termasuk penentuan biaya (*fee*) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata)

Lebih lanjut, Rudianto dan Tanaya (2014:73) mengatakan bahwa konsep ekowisata berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya pengembangan pedesaan dalam sektor pariwisata. Lake dan Sharply dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74) menyatakan bahwa pariwisata pedesaan dapat muncul jika ada perilaku

wisata yang muncul di wilayah pedesaan. Roberts dan Hall dalam Rudianto dan Tanaya (2014:74) menambahkan bahwa dalam pariwisata pedesaan harus ada karakter khusus yang dapat berupa budaya tradisional, budaya pertanian, pemandangan alam dan gaya hidup yang sederhana.

D. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Menurut Muljadi (2009:27) menyebutkan desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan. Ditegaskan kembali oleh Muriawan dalam Jurnal berjudul Konsep Desa Wisata (2006:67) bahwa desa wisata berdasarkan unsur-unsur yang sudah melekat dalam masyarakat desa lalu dimanfaatkan menjadi objek wisata. Pendit (1994:71) menyebutkan bahwa terdapat dua komponen dalam Desa Wisata, sebagai berikut:

- a. Akomodasi, sebagai tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.
- b. Atraksi, sebuah kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan sebagai partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah lokasi atau tempat yang digunakan sebagai tempat untuk wisata dengan

memanfaatkan potensi-potensi yang sudah ada, seperti nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Kemudian, keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan, pengelolaan dan pelayanan juga menjadi point penting dalam kesuksesan desa wisata. Tidak lupa poin terpenting dari desa wisata adalah akomodasi dari dan menuju lokasi desa dan atraksi para wisatawan dengan penduduk.

Dalam pelaksanaan desa wisata masyarakat ikut berpartisipasi, partisipasi tersebut harusnya bisa mengubah masyarakat dari menjadi obyek sehingga menjadi subjek pembangunan. Oleh karena itu, harus menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang ada di handout *concept resort and leisure* oleh Sastrayuda (2010) desa wisata harus memiliki manfaat terhadap :

a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Desa wisata perlu dukungan melalui kelancaran dan efektivitas pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) agar masyarakat desa mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk itu perlu adanya pengembangan usaha ekonomi dan mata pencaharian yang berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan cara : (1) Usaha Ekonomi Rakyat (usaha kecil, mikro dan koperasi) yang memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan lestari, (2) dikembangkan badan usaha milik rakyat yang dapat berdampingan, kemitraan dengan koperasi, (3) pengembangan klaster-klaster usaha ekonomi rakyat yang menampilkan produk-produk unggulan bernilai tambah tinggi sebagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat. Dukungan bagi kelancaran dan efektivitas

pemberdayaan ekonomi rakyat tersebut di atas dapat dikembangkan secara partisipatif sesuai dengan prioritas masyarakat seperti, prasarana fisik yang memperlancar transportasi dan komunikasi, pelayanan dasar, perluasan ruang publik pada tingkatan masyarakat yang mendukung berbagai lapisan masyarakat, pengembangan tenaga kerja dan lingkungan kerja bagi tenaga kerja usia muda.

b. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pendekatan integratif dalam menata kehidupan sosial dapat dikaitkan melalui kearifan lokal yang terdiri dari pemerintah daerah, sebagai regulator dan fasilitator melakukan identifikasi dan kegiatan atas bentuk, mekanisme dalam pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan dan peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan masyarakat, unsur-unsur tersebut perlu menjadi pertimbangan utama dalam mengkaji kawasan desa wisata, mengingat pengembangan kepariwisataan secara umum tidak terlepas kaitannya dengan pariwisata sebagai suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Disamping itu beberapa pendapat menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, seperti memburuknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya control masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi. Pentingnya kajian sosiologi terhadap penerapan permodelan pariwisata semakin jelas, karena tipe pariwisata yang dikembangkan adalah desa wisata, dimana desa wisata mempunyai beberapa ciri, seperti; desa wisata melibatkan masyarakat lokal secara lebih luas dan lebih

intensif karena dasarnya adalah berkaitan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisata melekat pada masyarakat itu sendiri, oleh karena itu pentingnya mengidentifikasi dampak terhadap sosial budaya pariwisata yang menurut Fiquerola (dalam Pitana 2005:117) terdiri dari enam kategori, yaitu :

- 1) Dampak terhadap struktur demografi
- 2) Dampak terhadap bentuk dan tipe mata pencaharian
- 3) Dampak terhadap transportasi nilai
- 4) Dampak terhadap gaya hidup tradisional
- 5) Dampak terhadap pola konsumsi, dan
- 6) Dampak terhadap pembanbunan masyarakat yang merupakan manfaat sosial budaya pariwisata.

c. Pemberdayaan Lingkungan Desa Wisata

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya menyangkut tiga dimensi penting yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan. Budiharsono (2006:10) mengemukakan dimensi ekonomi antara lain berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta merubah pola produksi dan konsumsi kearah yang seimbang, sedangkan dimensi sosial bersangkutan dengan upaya pemecahan masalah kependudukan perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

2. Kriteria Desa Wisata

Ascholani dalam opininya di website Kabar Indonesia pada 25 maret 2010 berjudul “Membangun Desa Wisata Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan” menyebutkan kriteria Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Atraksi wisata, semua mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
- b. Jarak tempuh, jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dari ibukota provinsi dan kota.
- c. Besaran desa, menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
- d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan, aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas di sebuah desa.
- e. Ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

3. Persyaratan Desa Wisata

Program dalam desa wisata memiliki beberapa persyaratan agar desa tersebut menjadi Desa Wisata, menurut Priasukmana dan Mohammad(2001:38) persyaratan Desa Wisata sebagai berikut:

- a. Aksesibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
- b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.
- g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

G. Pembangunan Desa

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju kearah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan. (Sadono Sukirno : 2006; 53)

Menurut Sondang P. Siagaan pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu :

- a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan
- b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain
- c. Diperlunya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya
- d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan.

2. Definisi Desa

Menurut UU Desa Pasal 1 Nomor 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan perkara masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan (Tjahja Supriatna, 2000:10)

4. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam Pasal 78 RUU desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :

- a. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa

- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
- d. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, keluarga berencana, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pembangunan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pedesaan dengan perkotaan, imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antar berbagai program sektoral/regional/inpres dan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruhan Indonesia (Tjahja Supriatna, 2000:64)

5. Prinsip-prinsip Pembangunan Desa

Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Tjahja Supriatna (2000:13) adalah :

- a. Imbang kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
- b. Dinamis dan berkelanjutan
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

6. Perencanaan Pembangunan Desa

Pada Pasal 79 RUU Desa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, mencakup :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Rencana pembangunan tahunan desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

7. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumberdaya alam desa. Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa (swakelola). Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Menurut Moleong (2006:14) seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada teori yang sudah ada. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian dimana suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proporsi yang berasal dari kata dan diuji kembali secara empiris. Salah satu dari teori dasar penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana juga dianggap sebagai pendekatan luas sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dalam penelitian lapangan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Denzin dan Lincoln 1987 dalam Moeleong (2006:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari pengertian ini, latar ilmiah dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena yang ada dan dimanfaatkan dengan berbagai metode yang ada yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Begitu juga menurut Pasolong (2012:32) metode penelitian deskriptif kualitatif mngutamakan peneliti dalam melihat kondisi obyek yang alamiah dimana

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dalam penelitian kualitatif, “proses” penelitian merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan “hasil” yang diperoleh karena itu peneliti sebagai instrumen pengumpul data merupakan suatu prinsip utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses pengumpulan data hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dekskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapat gambaran secara sistematis, aktual dari permasalahan yang akan dipecahkan. Selain itu, dapat menggambarkan dengan cepat keadaan atau kejadian yang apa adanya, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata penjabaran dari kejadian tersebut.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus pada suatu penelitian untuk memusatkan objek perhatian dan mempersempit objek untuk diteliti. Spradley dalam Sugiyono (2014:288) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam penelitian kualitatif berdasarkan tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial yang berupaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial.. Spradley dalam Sugiyono (2014:290) mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus yaitu:

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu *organizing domain*
3. Menetapkaan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek

4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul

Kabupaten Malang, meliputi :

- a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata
- b. Keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif
- c. Keterlibatan penduduk lokal
- d. Kebijakan pemerintah
- e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

- a. Faktor Pendukung Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang
- b. Faktor Penghambat Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Upaya untuk menentukan lokasi dan situs penelitian merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan penelitian, lokasi penelitian yang dimaksud disini adalah di Kabupaten Malang.



Selanjutnya yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan Desa Wisata Pujon Kidul. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan badan pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Malang dan dianggap mampu memberikan informasi yang tepat, valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang sedang diamati oleh para peneliti. Sedangkan Desa Wisata Pujon Kidul merupakan salah satu desa yang melaksanakan Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data keberadaannya memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menentukan siapa saja dan data apa saja yang harus didapatkan untuk menjawab fokus dan tujuan dari penelitian, karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan, sedangkan untuk data sekunder peneliti mendatangi situs penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan pada lokus dan situs penelitian di atas.

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi data menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan obyek penelitian meliputi wawancara mendalam. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara orang-orang terlibat seperti :

- a. Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- b. Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- c. Kepala Desa Pujon Kidul
- d. Pengelola Desa Wisata Pujon Kidul
- e. Masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul

2. Data Sekunder

Data yang bersumber dari media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Yakni data yang diperoleh melalui dokumen atau arsip, peraturan-peraturan, laporan dan referensi dari internet maupun koran yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Dokumen-dokumen
- b. Laporan-laporan
- c. Informasi lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data aktual dari sumber data. Menurut Margono (199) yang dikutip oleh Zuriah (2009:173) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Berdasarkan jenisnya, observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a) Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang diselidiki.
- b) Observasi tidak langsung yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti misalnya melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.

Pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti sendiri menggunakan observasi langsung, observasi dilakukan di Desa Wisata Pujon Kidul dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mengetahui proses Management Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan sumber-sumber data primer yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memperoleh data yang aktual yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing dalam Idrus (2009:120). Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan tiga komponen lembaga yaitu :

- a. Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
 1. Bu Nobi selaku Kasi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
 2. Bu Lani selaku Kasi Pengembangan Destinasi Wisata Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang
- b. Pemerintah Desa Wisata Pujon Kidul
 1. Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul
- c. Perwakilan masyarakat Desa Wisata Pujon Kidul
 1. Pak Badur selaku anggota Pengelola Desa Wisata Pujon Kidul
 2. Masyarakat setempat yaitu Bu Ririn dan Pak Andy

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang

diperoleh dari instansi, kantor atau tempat yang telah ditetapkan menjadi lokasi penelitian. Begitu juga menurut Zuriyah (2009:191) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, buku-buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang menunjang penelitian ini meliputi :

- a. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang 2016 – 2021
- b. RPJMD Kabupaten Malang 2016 – 2021
- c. Profil Desa Wisata Pujon Kidul Tahun 2016

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang mendukung penelitiannya. Berdasarkan Arikunto dalam Zuriyah (2009:168) kualitas instrument akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama penelitian yang mempunyai fungsi sebagai pengumpul data dengan menggunakan panca inderanya untuk menangkap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Berikut adalah instrumen penunjang yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Seperti yang diungkapkan Sugiyono (2014:305) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.

2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara bertujuan agar pencarian data dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan yang disusun peneliti guna memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Perangkat penunjang yang digunakan peneliti meliputi alat tulis atau alat pencatat lainnya yang digunakan untuk menangkap data dan informasi yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun hasil studi di lapangan. Serta menggunakan catatan lapangan dipergunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2014: 320) yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuang tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2014: 324) tertulis bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian

(*confirmability*). Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong (2014) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika

data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

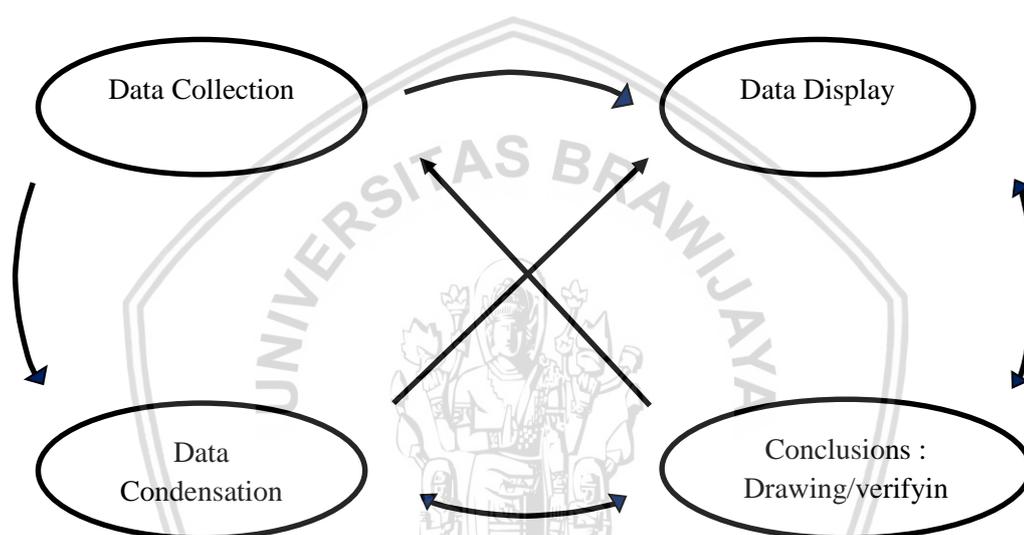
Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

H. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti untuk mendapatkan data, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut jenuh. dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2014:332) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang meliputi analisis-*analisis* berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan dalam periode tertentu, dalam menganalisis data

penelitian, peneliti mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014:33) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. adapun model analisa data interaktif dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:33

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan fokus, menyederhanakan, abstrak, dan / atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (tubuh) dari catatan lapangan yang ditulis, wawancara transkrip, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, membuat data kita kuat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses kondensasi data, peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan penelitian, penyajian data yang bersumber dari situs dan lokasi penelitian yang disajikan sesuai dengan format yang telah diatur oleh Fakultas Ilmu Administrasi yang dapat dipelajari dan memberi manfaat bagi semua pihak. Pada penyajian data ini diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang kaya akan informasi dan pengetahuan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion/drawing*)

Setelah proses penyajian data, sebelum itu data yang disajikan dan dianalisis peneliti berusaha mencari makna terhadap data yang dikumpulkan. Kemudian setelah data itu difahami dan disajikan, maka peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang sudah dipaparkan penulis di kajian pustaka.

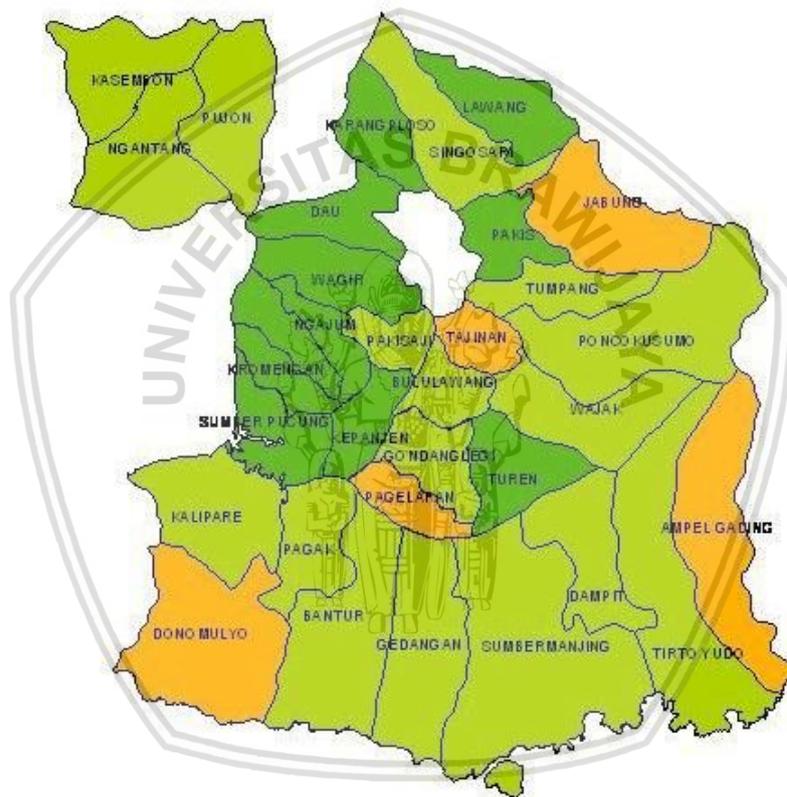


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang



Gambar 2. Peta Kabupaten Malang

a. Kondisi Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan enam kabupaten dan samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112o17',10,90" Bujur Timur dan 112o57',00,00" Bujur Timur dan antara 7o44',55,11" Lintang Selatan dan 8o26',35,45" Lintang Selatan.

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² (sumber; Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional yaitu Gunung Semeru (3.676 meter) gunung

tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter), Gunung Panderman (2.040 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Batok (2.868 meter) dan Pegunungan Kendeng (600 meter). Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Dari 18 sungai besar dan bernama di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya, terdapat Sungai Brantas, sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Hulu Sungai Brantas bagian atas terdapat di wilayah Kota Batu dan hulu bawah berada di wilayah Kabupaten Malang.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah Kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Tinggi pusat pemerintahan kecamatan (Kantor Camat) dari permukaan laut berkisar antara 240-1.299 meter dpl. Berdasarkan hasil pemantauan tiga pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso- Malang, pada Tahun 2015 suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 17o C hingga 27,6o C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 9 persen hingga 99,0 persen dan curah hujan rata-rata berkisar antara 15,3 mm hingga 485 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan Juli- Oktober, hasil pemantauan Pos Karangates. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan April, hasil pemantauan Pos Karangploso.

b. Jumlah Penduduk

Menurut hasil proyeksi penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 berjumlah 2.544.315 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.278.511 (50,24 persen) jiwa dan perempuan 1.265.804 (49,76 persen) jiwa. Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 24,07 persen (dibawah 30 persen) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 7,80 persen (dibawah 10 persen). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong tua dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Sementara umur median intermediate berada pada kisaran 20-30 tahun dan umur median muda adalah 20 tahun kebawah. Dengan komposisi umur produktif (15-64 tahun) sekitar 68,12 persen.

c. Tata Ruang Wilayah

Struktur ruang kabupaten bertujuan dalam penentuan hirarki dan penetapan fungsi kawasan baik perkotaan maupun perdesaan, serta pembagian satuan wilayah pengembangan. Adanya hierarki perkotaan berarti ada keterkaitan suatu perkotaan dengan perkotaan lainnya. Perkotaan yang memiliki hierarki lebih tinggi akan lebih besar pengaruh jangkauannya dan akan mempengaruhi perkotaan yang hierarkinya lebih rendah. Seiring perkembangan yang ada di Kabupaten Malang, Kepanjen akan berubah status dari Ibukota Kecamatan menjadi Ibukota Kabupaten. Hal ini akan mengakibatkan peningkatan berbagai kegiatan, sehingga hierarki perkotaannya juga naik dari orde IV menjadi orde III. Pada masa yang akan datang orde perkotaan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut :

- Orde III adalah Perkotaan Kepanjen.
- Orde IV adalah Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, Perkotaan Gondanglegi dan Perkotaan Donomulyo.
- Orde V semua perkotaan yang berfungsi sebagai ibukota kecamatan selain yang disebut diatas.
- Tiap-tiap kecamatan untuk mempercepat perkembangan dapat di tempuh dengan penentuan desa-desa pusat pertumbuhan.

Pola Ruang

1. Kawasan Permukiman

Pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni kawasan permukiman perkotaan yang dapat diindikasikan juga sebagai Ibukota Kecamatan. Wilayah ini dominasi kegiatan yang difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kekotaan dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Sedangkan kawasan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan sebagian diantaranya memiliki aksesibilitas yang kurang, jumlah sarana dan prasarana penunjang terbatas pada pelayanan kecil.

2. Kawasan Pertanian.

Kawasan ini secara keseluruhan seluas 162.441 Ha dengan rincian : pertanian sawah seluas 47.902 Ha, tegalan seluas 102.219 Ha dan perkebunan seluas 12.320 Ha, dimana untuk kawasan jenis ini keberadaannya tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Dari kondisi tersebut diharapkan kawasan ini

mampu menciptakan swasembada pangan terutama melalui program-program yang ada yaitu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi serta rehabilitasi dan tidak menutup kemungkinan pembukaan lahan-lahan baru yang diperuntukkan bagi pertanian daerah.

3. Kawasan Perkebunan.

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada setiap kecamatan. Jenis komoditi perkebunan yang ada dan cukup dominan di beberapa wilayah adalah teh, cengkeh, panili, tebu, kelapa, coklat dan kopi. Wilayah yang menghasilkan perkebunan ini umumnya merupakan kawasan yang memiliki kondisi topografi perbukitan dan sebagian kecil pada daerah dataran rendah dengan jenis tanaman yang ditanam adalah termasuk jenis tanaman keras.

4. Kawasan Industri.

Kawasan industri yang ada di Kabupaten Malang meliputi kawasan industri Singosari - Lawang, Wagir, Turen dan lain-lain. Untuk kawasan industri Turen meliputi industri besar (PT. PINDAD) serta beberapa jenis industri kecil dan home industry lain seperti indusuri tapioka, marning, sangkar burung, kerupuk, dan lain-lain. Jenis industri lain yang ada di Kabupaten Malang antara lain : industri tapioka di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, industri gula yang terdapat di dua kecamatan yaitu pabrik gula Kebonagung di Kecamatan Pakisaji dan pabrik gula Krebbe Baru di Kecamatan Bululawang. Selain itu terdapat pula industri lidi, rokok, keramik, asbes di Kecamatan Wagir; industri tikar mendong, tampar mendong, keju di Kecamatan Wajak; dan lain-lain.



5. Kawasan Pariwisata

Kabupaten Malang ternyata memiliki banyak obyek wisata yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, obyek tersebut diantaranya adalah : Obyek Wisata Buday, Obyek Wisata Buata, Wisata Alam Air`Terjun, Wisata Alam Air`Terjun dan Pantai

6. Kawasan Peternakan.

Beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, baik ternak besar maupun ternak kecil, Kecamatan Ampelgading : potensinya adalah sapi potong dan kambing. Selain ternak-ternak besar tersebut diatas, masing-masing kecamatan juga memiliki potensi pengembangan ternak kecil, yakni : ayam buras/kampung, ayam ras, kambing, domba, kelinci dan sebagainya terdistribusi secara merata.

7. Kawasan Perikanan.

Peningkatan perkenomian Kabupaten Malang bidang perikanan dikembangkan melalui mperikanan laut atau tangkap di wilayah pantai Sendangbiru melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang dan ikan serta sandar perahu. Sektor perikanan yang ada di Kabupaten Malang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu perikanan darat dan perikanan laut :

8. Kawasan Pertambangan.

Yang termasuk kawasan ini adalah penggalian pasir, kerikil dan batuan yang terdapat di sepanjang daerah aliran sungai, yakni di Kecamatan Turen, Ampelgading, Wajak, Ngantang, Kromengan, Kasembon, Dampit, Gedangan,

Tumpang, Lawang, Pakis, Singosari dan Gondanglegi. Wilayah yang mempunyai potensi bahan galian/tambang batu kapur adalah Kecamatan Gedangan, Donomulyo, Kalipare, Pagak dan Sumbermanjing Wetan, sehingga pengembangannya di masa yang akan datang tetap terpacu pada lokasi tersebut dengan tetap memperhatikan konservasi alam.

9. Kawasan Hutan.

Kawasan ini tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran, terutama pinggir timur, sebagian berada di utara dan sebagian di selatan Kabupaten Malang, dimana diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang terletak pada kawasan non budidaya adalah hutan produksi terbatas. Diantara kawasan hutan yang termasuk sebagai hutan produksi terbatas adalah di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Dau, Wagir, Karangploso, Pujon, Tumpang, Jabung, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, bantur dan Gedangan sedangkan termasuk sebagai hutan produksi tetap adalah di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Dampit, Pagak, Kalipare dan Bantur.

10. Kawasan Khusus, yakni *Kawasan Sekitar Bandar Udara, Kawasan Militer, Sekitar Gudang Amunisi*

d. Pemerintahan

Unit administrasi pemerintahan dibawah kabupaten adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/ Rukun Tetangga (RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.035 RW dan 13.906 RT . Roda pemerintahan berjalan lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi derap pengembangan. Sebagai salah satu indikasi pencapaian kemajuan pembangunan dapat dicermati melalui tingkat perkembangan desa. Tingkat perkembangan desa/kelurahan merupakan cermin kemandirian dalam mengorganisasi dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerahnya. Keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang ada sebagai pelaku maupun sebagai sasaran pembangunan. Salah satu tolok ukur kemampuan SDM adalah tingkat pendidikan. Kepala desa dengan tingkat pendidikan SMP sekitar 13,24 persen, SMU sekitar 56,76 persen, Akademi 3,51 persen, dan Universitas 26,49 persen. Untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan dan sebagai upaya peningkatan kinerja pemerintah secara keseluruhan maka Pemerintah Kabupaten Malang selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Aspirasi politik 58 masyarakat Kabupaten Malang berjalan baik sesuai koridornya melalui beberapa partai besar.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

a. Sejarah

Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Pada tahun 1989 sampai dengan 1996 waktu itu masih berstatus Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang yang berkantor di Jalan Kawi 41 Malang menjadi satu dengan kompleks Gedung APDN Malang, Kepala Cabang Dinas Pariwisata saat itu dipimpin oleh Bapak SUNARDI (almarhum). Pada tahun 1996 sampai dengan 2004 terjadi perubahan dari Cabang Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur di Malang menjadi Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan Gede No. 6 Malang yang dipimpin oleh Kepala Dinas :

1. SUNARDI pada tahun 1996 sampai dengan 1999
2. Dra. HARSIARI pada tahun 1999 sampai dengan 2001
3. Drs. NURYANTO, MM pada tahun 2001 sampai dengan 2004

Pada tahun 2004 sampai 2008 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang dengan Nomor: 90 Tahun 2004 dari Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Malang menjadi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang dengan alamat kantor Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang yaitu Bapak PURNADI, SH. MSi. Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2013 terjadi perubahan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor: 11 Tahun 2008 dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Malang menjadi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Malang yang berkantor di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari – Malang dan dipimpin oleh Kepala Dinas:

1. Bapak PURNADI, SH. MSi. pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010
2. Ibu RATNA NURHAYATI, MSi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013

Setelah Ibu RATNA NURHAYATI, MSi. Menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 digantikan oleh Bapak Made Arya Wedanthara, SH, M.Si yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor : 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

1. Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

A. Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Kebudayaan;
- d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
- e. Bidang Pemasaran;

f. Bidang Obyek Wisata;

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sekretariat Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

C. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata;



- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya;
- o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

3. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Dalam menjalankan fungsinya Sekretaris mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :
 - a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Keuangan;
 - c). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan
- i. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- j. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- e. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

c. VISI MISI

VISI

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi sebagai berikut “
TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG YANG
BERBASIS MASYARAKAT “

MISI

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui :
 1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan kearifan lokal;
 2. Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 3. Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;
 4. Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat

d. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN

Berdasarkan Visi Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011 - 2015 maka diterapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya dukungan untuk mewujudkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas nilai-nilai budaya daerah
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya dan pengelolaan keragaman budaya
- d. Meningkatkan pengembangan destinasi wisata melalui pengembangan aksesibilitas, produk wisata, kelompok sadar wisata dan pembentukan desa wisata
- e. Meningkatkan jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang melek/faham pariwisata melalui promosi dan informasi yang berkualitas
- f. Meningkatkan pembinaan usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

- a. TUJUAN
 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal di Kabupaten Malang;
 2. Meningkatnya pengembangan kualitas dan kuantitas destinasi wisata;
 3. Meningkatnya kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah.

b. SASARAN

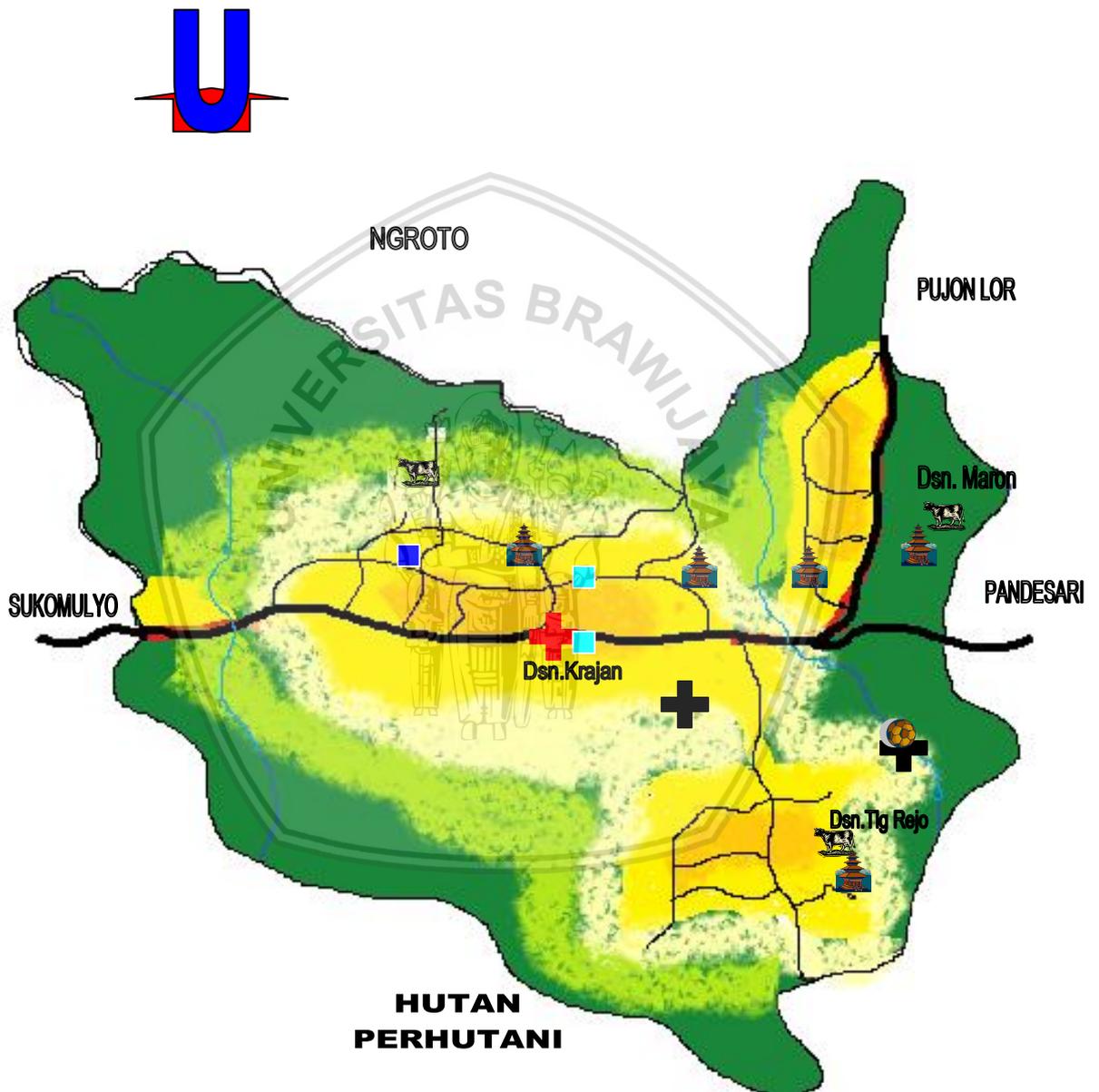
1. Terlaksananya pemberdayaan seniman, kelompok kesenian, budayawan lokal Kabupaten Malang;
2. Meningkatnya pengembangan obyek wisata secara kualitas dan kuantitas;
3. Terlaksananya peningkatan program kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang.



3. Gambaran Umum Desa Pujon Kidul

PETA DESA PUJON KIDUL

KECAMATAN PUJON



Gambar 3. Peta Desa Pujon Kidul

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

1. Kondisi Desa

Secara geografis Desa Pujonkidul terletak pada posisi 7°21'-7°31' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa Perbukitan /Pegunungan yaitu sekitar 1200 m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Malang tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pujonkidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1200. mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2013-2016

Secara administratif, Desa Pujonkidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pujonlor Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukomulyo. Di sisi Selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Pujonlor. Kecamatan Pujon.

Jarak tempuh Desa Pujonkidul ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 37 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1.1/2 jam.

A. Kondisi dan Ciri Geologis Wilayah

Luas Wilayah Desa Pujonkidul adalah 330 Ha. Luas lahan yang ada terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yang dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Luas lahan yang diperuntukkan untuk pemukiman adalah 24.9 Ha. Luas lahan yang diperuntukkan untuk Pertanian adalah 87 Ha. Luas lahan untuk ladang

tegalan dan perkebunan adalah 240. Ha. Luas lahan untuk Hutan Produksi adalah 578. Ha. Sedangkan luas lahan untuk fasilitas umum adalah sebagai berikut: untuk perkantoran Ha, sekolah 0,4 Ha, olahraga 0,5 Ha, dan tempat pemakaman umum 0,5 Ha.

Wilayah Desa Pujonkidul secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah Desa .Pujonkidul terpetakan sebagai berikut: sangat subur 56 Ha, subur 140 Ha, sedang 1.109 Ha, tidak subur/ kritis 233 Ha. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen dengan menghasilkan 8,5 ton/ha. Tanaman jenis palawija juga cocok ditanam di sini.

Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti, jagung, serta tanaman buah seperti Apel , Tomat, wortel juga mampu menjadi sumber pemasukan (income) yang cukup handal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman Kayu-kayuan merupakan tanaman handalan. Kondisi alam yang demikian ini telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Pangan Masyarakat Desa. Jenis tanah hitam Desa Pujonkidul ini menjadi bagus sebagai lahan Pertanian jiwa penduduk.

Sejarah Desa

➤ Sejarah Berdirinya Desa

Menurut informasi yang kami dapatkan dari para sesepuh desa bahwa desa Pujonkidul didirikan oleh 2 orang yang bernama Mbah Brojonolo dan Den Ajeng Karsinah yang juga disebut pada tahun 1901 membuka hutan di bagian di daerah barat, namun demikian Mbah Brojonolo dan Den Ajeng Karsinah kehilangan arah

selanjutnya beliau berdua melalui babatan batan hutan amat dariman kemudian babatan huta amat dariman dibagi menjadi dua sebelah utara dan sebelah selatan. babatan hu/tan inilah yang kemudian menjadi Desa **Sejarah Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Pujonidul berdiri sejak tahun 1901 dengan kepala pemerintah pertama kali yaitu Bapak Aris, untuk lebih jelas tentang silsilah pemerintahan desa Pujonkidul sebagai berikut:

1. Jaeng Retno (1865-1890)
2. Jaeng Rono (1890 -1915)
3. Aris Jais' -(1915-1925)
4. Rateno (1925-1945)
5. Saeru (1945-1978)
6. Admadihardjo (1979-1980)
7. Painu (1980-1983)
8. Djuma'i (1983-1993)
9. Sugiono (1993-1994)
10. Siti Nurjana (1994-2000)
11. Jamludin (2000-2001)
12. Sugiono (2001-2011)
13. Udi Hartoko (2011 s/d Sekarang)

B. Demografis/ Kependudukan

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun **2017**, jumlah penduduk Desa Pujonkidul adalah **4.394 jiwa**, dengan rincian **2.059** laki-laki dan **2.335** Perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam **1.362 KK**.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pujonkidul maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Untuk memperoleh informasi ini maka perlulah dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	0-4	161 orang	3,67%
2	5-9	312 orang	7,11%
3	10-14	319 orang	7,27%
4	15-19	394 orang	8,98%
5	20-24	332 orang	7,57%
6	25-29	346 orang	7,89%
7	30-34	336 orang	7,66%
8	35-39	380 orang	8,66%
9	40-44	325 orang	7,41%
10	45-49	327 orang	7,45%

No	Usia	Jumlah	Prosentase
11	50-54	337 orang	7,68%
12	55-59	241 orang	5,49%
13	60-64	172 orang	3,92%
14	65 ke atas	406 orang	9,25%
Jumlah		4.388 orang	100,00%

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pujonkidul sekitar 2.046 atau hampir 46,63%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

A. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematisa berpikir atau pola pikir individu, selain mudah menerima informasi yang lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa

Tabel 2
Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	563	12,83%
2	Belum Tamat SD/Sederajat	475	10,82%
3	Tamat SD/Sederajat	2.496	56,88%
4	Tamat SMP/Sederajat	577	13,15%
5	Tamat SMA/Sederajat	232	5,29%
6	Diploma I/II	7	0,16%
7	Akademi/Diploma III/Sarjana	7	0,16%
8	Diploma IV/Strata I	29	0,66%
9	Strata II	2	0,05%
10	Strata III	0	0,00%
JUMLAH		4.388	100,00%

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Rentetan data kualitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Pujonkidul hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Pujonkidul tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Pujonkidul baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa . Pujonkidul. yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Pujonkidul Bahkan beberapa lembaga binbel dan pelatihan yang pernah ada malah gulung tikar. Mungkin dorongan dari pemerintah dan masyarakat lemah. Inilah yang menjadi pekerjaan dasar pemerintahan Desa Pujonkidul. sekarang ini.

B. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan adanya gejala masyarakat yang terserang penyakit relatif tinggi, yang antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang

bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa . Pujonkidul. secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup lumayan tinggi jumlahnya. Tercatat penderita bibir sumbing berjumlah 1 orang, tuna wicara 3 orang, tuna rungu 3 orang, tuna netra 3 orang, dan lumpuh 2 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup sehat di Desa . Pujonkidul

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB. Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2016 di Desa Pujonkidul berjumlah lumayan banyak yaitu 358 orang. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan Polio dan DPT-1 berjumlah 358 bayi. Tingkat partisipasi demikian ini relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan mengingat cukup tersedianya fasilitas kesehatan berupa sebuah Puskesmas, dan Polindes di Desa .. Pujonkidul. Maka wajar jika ketersediaan fasilitas kesehatan yang relatif lengkap ini berdampak pada kualitas kelahiran bagi bayi lahir. Dari 5 kasus bayi lahir pada tahun 2016, hanya 0 bayi yang tidak tertolong.

C. Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa .Pujonkidul dapat teridentifikasi ke dalam beberap sektor yaitu pertanian dan

peternakan, jasa/perdagangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan berjumlah 1.730 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 182 orang, yang bekerja di sektor wira swasta 97 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 162 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 4.149 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 3.
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya pada tahun 2016

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.833 orang	
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	19 orang	
	2. Jasa Perdagangan	26 orang	
	3. Jasa Angkutan	16 orang	
	4. Jasa Ketrampilan	8 orang	
	5. Jasa lainnya	21 orang	
3	Sektor Peternakan	1.714 orang	
4	Sektor lain	16 orang	
Jumlah		3.653 orang	

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

D. Struktur Pemerintahan

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Pujonkidul memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari

kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk

Wilayah Desa .Pujonkidul terbagi di dalam 9 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 3 Dusun yaitu: Dusun Krajan ,Dkuh Maron dan Dukuh Tulungrejo, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi Kasun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Pujonkidul tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya.

C. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Pujonkidul hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pilkada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Pujonkidul, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara tradisi memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena

inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap.

Karena demikian, maka setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Fenomena ini juga terjadi pada pemilihan desa Pujonkidul pada tahun 2011. Pada pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 95%. Tercatat ada tiga kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Pujonkidul seperti acara perayaan desa.

Pada tahun 2013 dan 2014 ini masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala Desa, namun hampir 85 % daftar pemilih tetap, memberikan hak pilihnya. Ini adalah progress demokrasi yang cukup signifikan di desa Pujonkidul

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan

kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Pujonkidul. mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Pujonkidul mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Pujonkidul. kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Pujonkidul Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan,

tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa . Pujonkidul. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Pujonkidul.. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

➤ **Bencana Alam dan Sosial**

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Pujonkidul. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

D. Keadaan Ekonomi

Tabel 4.

Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) tahun 2016

No	Sumber Pendapatan	Hasil
1.	Industri rumah tangga	-

2.	Jasa	Rp. 600.000.000,-
3.	Perdagangan	Rp. 750.000.000,-
4.	Peternakan	Rp. 3.111.000.000,-
5.	Perkebunan	Rp. 692.000.000,-
6.	Ladang / Tegalan	Rp. 73.500.000,-
7.	Pertanian	Rp. 610.500.000,-
	Jumlah	Rp 5.237.600.000,-

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

E. Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel 5.

Tingkat pendidikan Aparat Desa

No	Aparat	Keterangan			
		SD / Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Sarjana
1	Kepala Desa			1 Orang	
2	Sek Des			1 Orang	
3	Kaur		3 Orang	1 Orang	1 Orang

4	Kepala Dsn		2 Orang	1 Orang	
5	Staf		1 Orang		

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 6.

Administrasi Pemerintah Desa Pada Tahun 2016

No	Jenis Administrasi	Keterangan	
I	Buku Administrasi Umum:		
1	Buku Keputusan Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
2	Buku Kekayaan / Inventaris Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
3	Buku Agenda	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
II	Buku Administrasi Keuangan		
4	Buku Data Induk Penduduk	Ada / Tidak	Kosong / Terisi

5	Buku Rekap Penduduk Akhir Bulan	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
III	Buku Administrasi Keuangan		
6	Buku Anggaran Desa	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
7	Buku Kas Umum	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
8	Buku Kas Pembantu	Ada / Tidak	Kosong / Terisi
9	Buku Administrasi PBB	Ada / Tidak	Kosong / Terisi

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 7.

Keuangan Desa Pada Tahun 2016

No	Keterangan	Jumlah
1	Dana Desa	Rp 652.728.000,-
2	Bagi Hasil Pajak	Rp 23.614.926,-

3	Alokasi Dana Desa	Rp 486.990.000,-
4	Pendapatan Desa Yang Sah	Rp 29.200.000,-
Jumlah		Rp 1.192.532.926,-

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

Tabel 8.

Realisasi Peraturan Desa

No	Uraian	Keterangan
1	Peraturan desa tentang APBDes	ADA
2	Struktur Organisasi dan Tata kerja pemerintah desa	ADA
3	Peraturan Desa tentang Desa Wisata	ADA

Sumber : Profil Desa Pujon Kidul

A. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata

Berdasarkan pendapat Iwan Nugroho (2011:17) mengenai pengembangan ekowisata, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah adanya pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata. Strategi pemasaran yang menempati posisi yang penting untuk menjangkau dan menarik wisatawan. Pemasaran destinasi biasanya diletakkan dengan strategi yang berorientasi pertumbuhan dan berfokus pada penciptaan citra, pengiklanan dan promosi penjualan yang bertujuan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun internasional (Dewi, 2011:8). Merujuk pada pendapat Phillip Koetler (2005:10), pemasaran adalah proses sosial yang dengan mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran destinasi dirancang agar dapat mempengaruhi wisatawan berkaitan dengan jenis produk dan aktivitas yang dipilih, periode waktu kunjungan, jenis akomodasi, serta pola pengeluaran/ belanja selama berada di destinasi wisata.

Dalam pemasaran dikenal dengan istilah bauran pemasaran, yang menyangkut aspek-aspek di dalamnya, salah satunya adalah 4P, 4P merupakan singkatan dari *product* (produk), *price* (harga), *place* (distribusi), *promotion* (promosi). Aspek pertama yaitu *product* (produk), berkaitan dengan dengan produk yang dijual kepada pelanggan, dimana hal ini produk berarti potensi wisata yang ada di desa wisata yang dijual ke wisatawan. Dari aspek *product* masyarakat

berperan secara penuh dalam perencanaan dan pengelolaan potensi wisata yang akan dijual sebagai daya tarik wisata. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa ::

“terkait produk yang akan dijual ditentukan oleh masyarakat sendiri, karena pada dasarnya produk tersebut sudah ada sebelum dikenal dengan istilah desa wisata. Sebagai contoh yaitu sayuran organik, peternakan sapi perah dan lain sebagainya itu mayoritas masyarakat pujon kidul bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Sehingga bukan pemerintah yang mendirikan dan sengaja membuat potensi wisata tersebut melainkan dari dulu memang alamiah seperti itu, hanya saja sejak dibentuknya desa wisata ini, potensi tersebut sudah lebih dikembangkan agar tidak hanya terlihat sebagai kebun dan peternakan biasa tapi dilayak disebut obyek wisata dan dapat menarik perhatian wisatawan. Untuk pengelolaannya tentu saya masyarakat itu sendiri. Pemerintah hanya membantu mempromosikan dan memfasilitasi.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Penentuan dalam aspek *product* yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa :

“ masyarakat desa yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan apa yang kami jual di desa pujon kidul ini. Kami yang telah mendiami desa ini sejak lama, ibaratnya kami penduduk asli sehingga kami memahami apa saja yang dapat dijadikan potensi wisata disini. Lagipula memang potensi disini di dominasi oleh alam, dan itu memang sudah ada sedari dulu karena mayoritas masyarakat kami bekerja di sektor tani. Hanya saja kalau dulu kami sekedar bertani, jadi sawah dan kebun hanya sekedar memproduksi lalu dijual ke tengkulak. Tapi dengan adanya desa wisata ini terjadi peningkatan manfaat dari sawah dan kebun menjadi potensi wisata dan dikelola oleh masyarakat sendiri. Pemerintah hanya memberi bantuan fasilitas dan promosi terkait dengan produk wisata ini.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon).

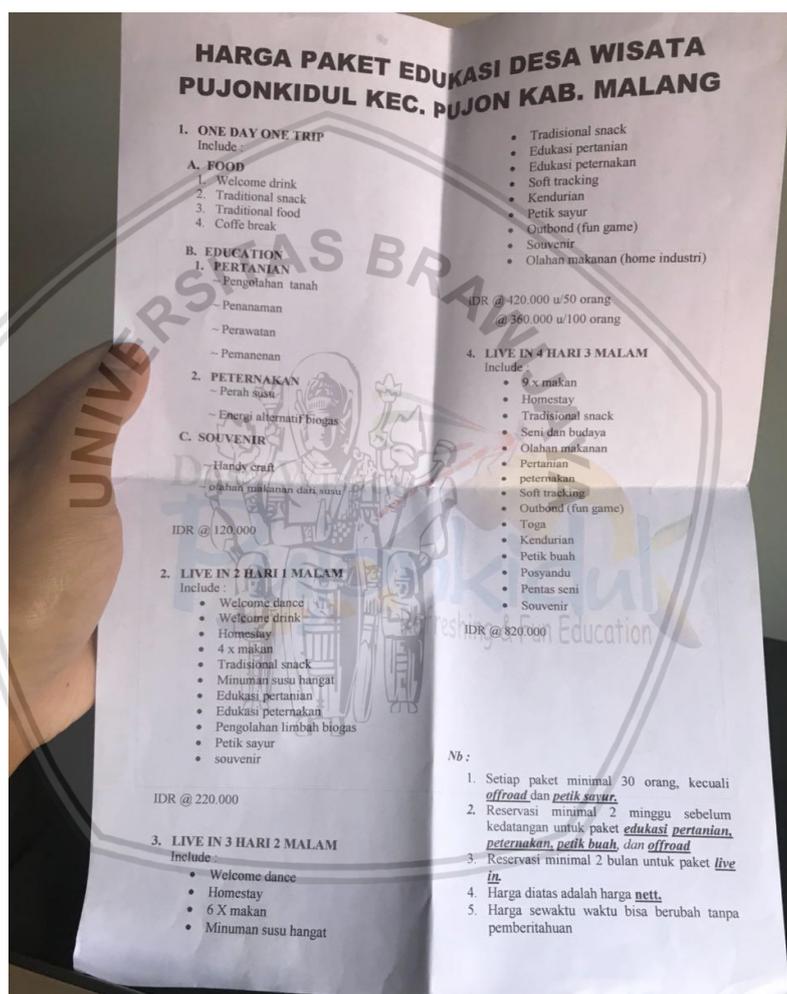
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menjadi aktor utama dalam penentuan produk yang dijual sebagai suatu potensi wisata di desa wisata pujon kidul. Dikarenakan objek wisata yang bersifat alamiah bukan buatan maka kebanyakan produk yang dijual memang sudah ada sebelum desa wisata dibentuk atau di canangkan sebagai desa wisata. Hanya saja pada perkembangannya produk tersebut mengalami perkembangan untuk meningkatkan nilainya agar memiliki daya tarik bagi para wisatawan.

Aspek kedua *Price* (harga) sama halnya dengan aspek sebelumnya, *Price* (harga) juga ditentukan sendiri oleh masyarakat desa wisata yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut menjadi aktor tunggal dalam penentuan dan penetapan harga. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“Pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari berbagai paket wisata adalah masyarakat setempat, dan untuk yang mengelola objek desa wisatanya ya masyarakat sendiri sehingga dalam aspek hargapun masyarakat yang menentukan. Sehingga hal ini menimbulkan masalah juga, karena tidak ada regulasi yang mengatur tentang patokan harga sesuai paket wisata, sehingga terkadang terjadi perang tarif antar sesama desa wisata. Hal ini yang menimbulkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME terkait masyarakat sebagai penentu harga paket wisata juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa :

“dalam penentuan harga setiap paket wisata ya masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi itu bukan menjadi ranah pemerintah karena kepemilikan dan yang menjalan objek wisata di desa ini masyarakat kami sendiri. Cuma akhirnya kami susah juga karena belum ada peraturan yang mengatur tentang patokan harga. Jadi pernah terjadi perang harga. Hal itu membuat suasana antar pelaku desa wisata tidak enak karena persaingan yang tidak sehat.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan).



Gambar 4.

Paket Wisata di Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa masyarakat desa menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan menetapkan harga dari setiap paket wisata di desa wisata yang bersangkutan karena mereka

sendiri yang memiliki dan mengelola berbagai obyek wisata yang ada di desa wisata tersebut. Hanya saja pada perkembangannya terjadi permasalahan bahwa penetapan harga tersebut tidak dilengkapi dengan adanya regulasi dari pihak pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya perang harga sesama pelaku wisata di desa wisata yang pada akhirnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

Aspek ketiga dalam pemasaran adalah *place* (distribusi) yang berkaitan dengan pemilihan tempat yang meliputi transportasi, perdagangan, pengaturan persediaan, dan cara pemesanan bagi konsumen. Untuk aspek ini, masyarakat desa tidak menjadi aktor tunggal, melainkan pemerintah turut ikut serta dalam mengatur aspek distribusi. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“dalam hal distribusi pihak pemerintah turut juga membantu dalam hal aksesibilitas, seperti memperbaiki jalan menuju wisata. Selain itu kami juga membantu dalam hal pemesanan bagi konsumen. Jadi di website kami sertakan kontak yang dapat dihubungi untuk info pemesanan.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Pendapat yang sama mengenai aspek *place* dikemukakan oleh bapak Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa :

“kalau dalam aspek distribusi kami tidak bertindak sendirian, pemerintah juga membantu dalam hal distribusi, contohnya masalah jalan yang berkaitan dengan akses yang memfasilitasi adalah pemerintah seperti memperbaiki aspal. Selain itu pemerintah di website maupun dibrosur menyertakan kontak pengelola desa wisata apabila ada wisatawan yang ingin reservasi.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam aspek place (distribusi), masyarakat tidak menjadi satu satunya pihak yang berperan di dalamnya, melainkan terdapat peran pemerintah yang membantu memfasilitasi, seperti dalam hal aksesibilitas berkaitan dengan jalan menuju destinasi wisata, serta dengan menyertakan kontak masyarakat desa setempat yang dapat dihubungi apabila wisatawan ingin melakukan reservasi.

Berkaitan dengan aspek promosi dalam pemasaran yang spesifik menuju desa wisata, maka pihak yang melakukan aktivitas tersebut adalah pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, bahwa :

“untuk masalah pemasaran desa wisata hal itu sudah menjadi salah satu tugas dari bagian promosi. Kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membuat banyak brosur yang masing-masing menunjukkan potensi dari desa wisata. Brosurnya tergolong lengkap mulai dari fasilitas dan akomodasi yang akan didapatkan oleh wisatawan. Jika ada event-event maka itulah yang kami bagikan. Dari situlah banyak masyarakat yang tau bahwa bukan hanya wisata buatan seperti jatimpark yang ada di Kota Batu. Masih banyak potensi desa wisata yang memiliki keunikan masing-masing. Selain itu info kepariwisataan juga kami cantumkan di website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kalau secara informal kami sering menyebarkannya melalui teman dan keluarga.” (Hasil dari wawancara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang)

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“Selain promosi yang dilakukan oleh bidang promosi, saya beserta staff juga pernah melakukan promosi tentang desa wisata. Jadi kami mempertemukan ketua dan anggota asosiasi *travel agent* yang ada di Malang Raya maupun di Jawa Timur serta ketua pemandu wisata tingkat provinsi dan di tingkat Malang Raya beserta kelompok sadar wisata. Diharapkan mereka yang menjadi motor untuk memasarkan desa wisata. Jadi terdapat kerjasama

dengan biro perjalanan untuk memasarkan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Kami juga pernah mempertemukan pihak-pihak pelaku wisata dari Jogjakarta dan Bali dengan yang ada di Batu dan Malang Raya. Kami duduk disatu meja untuk saling mempromosikan potensi daerah, yang salah satunya adalah desa wisata di Pujon Kidul ini.”(hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Aktivitas promosi desa wisata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, tapi juga dilakukan oleh masyarakat yang mendiami desa wisata. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata Pujon Kidul, bahwa:

“masyarakat Pujon Kidul sebenarnya sudah sangat sadar dan semangat untuk mengembangkan desa wisata. Tanpa disuruh pemerintah, kami sudah jalan sendiri untuk memasarkan desa kami. Pemuda-pemuda melalui karangtaruna membuat blog maupun website tentang Desa Pujon Kidul. Jadi dari website itu banyak orang yang tau tentang potensi wisata apa aja yang ada Desa Wisata Pujon Kidul. Banyak orang yang mengira bahwa hanya ada pemandangan café sawah padahal wisata yang bisa di dapatkan disini lebih dari itu seperti outbond, perah susu dan bercocok tanam sayur dll. Oleh karena itu website dan blog kami isi dan memperlihatkan semua potensi wisata yang ada disini. Ternyata memang banyak pengunjung yang datang kesini awalnya tertarik melihat potensi wisata yang kami tampilkan di website. Selain itu masyarakat disini juga aktif untuk menawarkan dan memasarkan tempat-tempat wisata yang ada. Intinya kami sebagai warga lokal aktif memasarkan dengan cara yang minim biaya.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah Pujon).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kedua belah pihak, yakni pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta masyarakat lokal yang dalam hal ini adalah masyarakat Pujon Kidul, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan promosi dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, hanya saja pemerintah melakukan lebih banyak jenis aktivitas promosi, mulai dari pembuatan brosur, *free map*, promosi melalui website resmi pemerintah, sampai pada mempertemukan aktor-aktor pariwisata. Sedangkan dari masyarakat, website

menjadi media yang ampuh untuk memasarkan desa wisatanya, hal tersebut sama-sama dilakukan masyarakat.

b. Keterampilan dan Layanan Kepada Pengunjung Secara Intensif

keterampilan dan layanan kepada pengunjung berkaitan dengan sikap yang dilakukan oleh masyarakat desa sebagai tuan rumah desa wisata. Masyarakat yang terlibat bersifat keseluruhan, itu artinya mulai dari pelaku usaha seperti pemilik kebun/sawah, pemilik ternak dalam semua bidang potensi wisatanya sampai pada seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di desa wisata tersebut. Pada dasarnya mayoritas masyarakat Pujon Kidul adalah petani sehingga mereka tidak memiliki *mindset* sebagai seorang pelaku usaha wisata. Oleh karena itu terkadang minim tentang melayani wisatawan. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Ibu RIRIN sebagai salah satu warga desa pujon kidul bahwa, :

“kami kan memang dasarnya banyak bekerja sebagai petani, kami tidak mempunyai dasar atau pengetahuan tentang pariwisata. Apalagi orang-orang disini rata-rata hanya lulusan SD , jadi tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk menjamu wisatawan. Tapi untungnya pemerintah memberi pelatihan ke POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Pelatihannya seperti mengelola dan menjamu wisatawan baik tatacara dan sopan santu agar tertib. Semua pengetahuan tersebut disebarkan ke masyarakat-masyarakat desa lainnya sehingga bertahap kami mengerti bagaimana cara mengelola desa wisata kami.” (hasil wawancara pada tanggal 7 februari 2018 di desa pujon kidul).

Pelatihan memang menjadi salah satu kunci untuk membekali keterampilan untuk desa wisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang secara rutin dan berkala memberikan pelatihan terkait dengan mengelola desa wisata agar memiliki daya jual dan membekali masyarakat dengan prinsip-prinsip

kepariwisataan demi memberi kepuasan kepada para wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“salah satu program kami memang memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku wisata, seperti Pokdarwis. Pelatihan itu diadakan dua kali setahun, dan kami mendatangkan pembicara yang memang kompeten dibidangnya. Jadi kami datangkan dari provinsi yang memang memiliki keahlian dibidangnya sehingga masyarakat dapat mengembangkan berbagai aspek dan potensi yang ada didesanya. Yang kami berikan ini materinya luas, menyangkut berbagai aspek dan menyeluruh kesemua pelaku wisata, bahkan di taraf terkecil selain pelatihan juga kami pernah melakukan studi banding ke desa wisata lain. Jadi kami ajak pokdarwis untuk ikut studi banding jadi mereka bisa lihat bagaimana orang orang disana dalam mengembangkan desanya, bagaimana interaksi antara warga lokal dengan wisatawan. Sehingga saat mereka pulang mereka bisa menceritakan pengalaman dan informasi tersebut kepada masyarakat di desanya.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ternyata memang menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif. Hal itu sependapat dengan yang dijelaskan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas memang memberikan manfaat yang besar untuk pengembangan desa wisata disini. Dari situ saya mengetahui banyak hal tentang mengelola desa wisata dan melayani wisatawan. Dari situ informasi yang sudah saya dapatkan saya ceritakan lagi keteman-teman, pemilik usaha, keluarga dan pemuda pemudi disini. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari segi potensi alamnya desa kami lebih kaya dan berpotensi dari pada desa wisata lainnya. Saya cerita begitu keteman-teman di desa jadi mereka lebih bersemangat agar desa wisata pujon kidul ini menjadi desa wisata lebih baik ,” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan dari keterangan-keterangan diatas yang didapat melalui wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa selama ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui bagian pengembangan SDM sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat desa wisata pujon kidul melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin dan berkala yang diikuti oleh para pelaku pariwisata termasuk perwakilan desa wisata. Pelatihan dan pembinaan tersebut memberikan pengaruh yang baik terhadap keterampilan dan layanan kepada pengunjung. Studi banding juga menjadi salah satu media yang tepat untuk meningkatkan keterampilan penduduk lokal dan mengelola desa wisatanya, karena dari studi banding tersebut mereka dapat membandingkan apa yang menjadi plus dan apa yang kurang dari desa wisatanya sehingga sepulangnya ketempat asalnya para perwakilan desa wisata yang mengikuti studin banding dapat melakukan evaluasi terkait dengan pengelolaan desa wisatanya selama ini dan dapat menceritakan kepada warga yang lain untuk meningkatkan kualitas desa wisatanya terlebih dalam hal keterampilan melayani wisatawan.

c. Keterlibatan Penduduk Lokal

Merujuk pada dokumen Kerjasama Direktorat Produk Pariwisata dan WWF Indonesia (2009:2), ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitik beratkan peran aktif komunitas. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat setempatlah yang memiliki pengetahuan tentang alam dan budaya yang menjadi potensi dan nilai jual daerahnya sebagai daya tarik wisata.

Oleh karena itu keterlibatan masyarakat menjadi hal yang mutlak. Pola kegiatan ekowisata berbasis masyarakat yang dalam penelitian ini adalah desa wisata, mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki baik secara adat maupun sebagai pihak pengelola.

Dilaksanakannya pengembangan desa wisata di Kabupaten Malang juga tidak lepas dari masyarakat setempat, bahwa mereka memiliki peran yang aktif dalam pengelolaan desa wisatanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“dalam pengembangan desa wisata, dapat dikatakan kalau pemerintah bertindak sebagai pihak yang memfasilitasi dan membantu, ya seperti dalam hal sarana dan pengembangan SDM. Jadi untuk menemukan dan mengelola potensi wisatanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di desa wisata itu sendiri. Masyarakat berperan sangat aktif dalam mengembangkan desa wisatanya. Salah satunya memasarkan desa wisata mereka dengan membuat blog dan website sebagai sarana untuk memasarkan pariwisatanya. Selain itu pemerintah juga membentuk POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata). Anggota pokdarwis ini berasal dari masyarakat masing – masing desa wisata itu sendiri. Ibaranya pokdarwis ini menjadi kelompok yang mewakili masyarakat desa wisata. Kalau ada acara atau pelatihan ya kami mengundang pokdarwis itu diharapkan bekal yang diberikan Pemerintah, pokdarwis ini bisa menyebarkan informasi dan wawasannya ke masyarakat di desanya. Pokdarwis ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan desa wisata.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Keterlibatan masyarakat secara penuh dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata juga diakui oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“keterlibatan masyarakat di desa wisata ini menyangkut aspek yang luas. Jadi walaupun ada pihak yang lain yang memiliki peran pengembangan

desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan sebagai pihak yang juga memiliki peran dalam pengembangan desa wisata, masyarakat tetap kita posisikan pihak yang sangat penting, pembangunan fasilitas yang dibangun pemerintah juga mendapat pengawasan dari masyarakat setempat.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengembangan desa wisata, masyarakat desa setempat memiliki peran yang sentral. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana beserta bimbingan dan pelatihan secara rutin dan berkala. Untuk pengelolaan potensi desa wisata dikembangkan lagi kepada masyarakat desa setempat karena mereka yang sangat paham tentang kondisi dan situasi desa wisatanya. Jadi pihak yang mengelola potensi wisata adalah masyarakat itu sendiri. Selain dalam aspek pengelolaan, keterlibatan masyarakat juga dapat lihat dalam aspek promosi dimana mereka menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik secara internal maupun eksternal. Dari segi internal masyarakat membangun kerjasama antara pengusaha peternakan, pertanian serta kegiatan alam bebas lainnya beserta pokdarwis, dan juga dengan kelompok masyarakat yang ada seperti karang tarun. Sedangkan dari segi eksternal, masyarakat terutama yang ada dalam gabungan pokdarwis melakukan kerjasama antar desa wisata untuk mempromosikan masing-masing desanya.

Selain itu, adanya partisipasi dalam pembangunan desa wisata, juga menimbulkan sisi positif dalam hal pertambahan nilai. Hal tersebut seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“tentu saja dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pengembangan desa wisata, hal tersebut menimbulkan perkembangan yang positif bagi kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya bahwa sebelum dicanangkannya desa wisata banyak sekali masyarakat desa yang pengangguran. Tetapi dengan adanya desa wisata dan keterlibatan penuh dari masyarakat kesejahteraan warga juga meningkat khususnya bagi para petani yang ada di desa pujon kidul ini. (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan penuh dari masyarakat di desa wisata menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya pihak petani. Selain itu dengan adanya keterlibatan penuh dari masyarakat dalam pembangunan, masyarakat setempat yang sebelumnya banyak tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan karena direkrut oleh pemilik usaha di desa wisata yang bersangkutan.

b. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu saja tidak terlepas dari adanya intervensi Pemerintah, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pengembangan desa wisata. Merujuk pada pendapat James E. Anderson yang dikutip oleh Islamy (2009:17): kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem a matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Nugroho (2012:167) berpendapat bahwa kebijakan public adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, dan pemerintah disini adalah Negara.

Selain dalam hal sarana prasarana serta pengembangan SDM, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membantu kelompok sadar wisata atau POKDARWIS. Hal tersebut sejalan dengan oleh ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“jadi disini untuk mengembangkan desa wisata itu ada dua hal yang menjadi perhatian, yang pertama masalah sarana prasarana pariwisata dan infrastruktur yang menjadi salah satu tugas di bidang pengembangan sumberdaya manusia. Di bidang saya, kami mengembangkan desa wisata dengan membangun sarana untuk menunjang kegiatan wisata. Contohnya kita bangun gapura atau pintu masuk menuju desa wisata, gazebo, membangun paving jalan dan rest area. Malah di salah satu desa kami malah membangun fasilitas outbound. Jadi ya dalam membangun sarana prasarana di desa wisata kami menyesuaikan wilayah dan potensi yang ada di desa yang bersangkutan. Untuk tindakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam hal pengembangan SDM ya melakukan dengan pembinaan dan pelatihan, sosialisasi, kami juga melakukan studi banding untuk menambah wawasan dari pelaku wisata di desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. (hasil wawancara pada tanggal 8 february 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Informasi terkait dengan pengembangan sarana prasana desa wisata juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“bahwa kalau di desa pujon kidul ini bantuan yang kami dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ya gapura serta papan penunjuk arah menuju desa wisata pujon kidul. Sementara ini hanya itu saja yang dibangun Dinas sebagai sarana desa wisata pujon kidul ini.” (hasil wawancara pada tanggal 5 february 2018 di café sawah pujon)



Gambar 5.

Gapura dan Penunjuk Arah Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, dan dengan masyarakat desa pujon kidul dapat dikatakan bahwa pembangunan fasilitas yang dilakukan pemerintah tidak sama antar satu desa dengan desa yang lainnya. Hal tersebut juga didasarkan atas kondisi dan kebutuhan dari desa wisata yang bersangkutan. Peran POKDARWIS dalam pengembangan desa wisata ini sejalan dengan Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“pemerintah membentuk pokdarwis ini diharapkan ada perwakilan-perwakilan dari desa wisata yang dapat menjadi penggerak bagi pengembangan desa wisatanya. Jadi kami menetapkan orang-orang yang dianggap pantas mewakili desa wisata untuk tergabung dalam kepengurusan pokdarwis. Mereka juga dapat menjadi mediator antara kami dan masyarakat, karena mereka merupakan penduduk asli yang mendiami desa wisata sehingga mereka sendiri yang mengetahui kebutuhan dan problematika apa yang dihadapi di desanya, karena mereka dibentuk oleh Dinas, maka keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat mereka sampaikan kepada kami.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang)

Keberadaan peran Pokdarwis ini juga diakui oleh masyarakat yang mendiami wisata, hal ini sejalan dengan Pak Andi selaku warga Desa Pujon Kidul bahwa :

“tentu saja pokdarwis berperan aktif dalam pengembangan desa wisata disini. Di desa ini ada Pak Badur beliau sering ikut pelatihan yang dilakukan Pemerintah, jadi pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan itu sering dibagi ke masyarakat desa ini melalui pertemuan-pertemuan warga atau sekedar ngobrol-ngobrol biasa. Beliau ini kalau bagi saya menjadi salah satu penggerak dan aktif dalam menghimpun anak-anak muda disini untuk mengembangkan desa”. (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan desa wisata salah

satunya adalah dengan cara membentuk Pokdarwis dimana hal tersebut telah ditetapkan dengan suatu regulasi, yang salah satunya adalah Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Hanya saja pada realitanya, harapan bahwa Pokdarwis ini mampu menjadi salah satu penggerak bagi pengembangan desa wisata tidak selalu berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan Pemerintah dalam pengembangan desa wisata adalah berupa pembuatan visi misi serta RPJMD yang mencantumkan strategi dalam mengembangkan desa wisata, pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang baik dari segi sarana prasarana dan SDM, serta keputusan pemerintah untuk membentuk kelompok sadar wisata demi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di desanya masing-masing.

c. Pengembangan Kemampuan Penduduk Lokal

Penduduk lokal beserta lingkungannya merupakan kesatuan yang utuh dari wilayah desa wisata, yang dalam hal ini mengacu pada konsep ekowisata berbasis masyarakat. Masyarakat desa yang bersangkutan perlu dikembangkan potensi dan partisipasinya untuk memperoleh manfaat atas diselenggarakannya desa wisata. Berkaitan dengan pengembangan kemampuan penduduk lokal, hal ini telah menjadi salah satu tanggung jawab dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bagian Pengembangan Sumberdaya Manusia yang menjadi tugas langsung dari Seksi Bimbingan dan Pelatihan. Berbeda dari pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang lebih

bertujuan memberi dan meningkatkan kualitas keterampilan dari masyarakat desa wisata, tetapi bimbingan dan binaan yang bersangkutan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“selain melakukan pelatihan secara rutin dan berkala, salah satu tugas kami adalah memberikan bimbingan dan binaan yang juga dilakukan secara rutin dan berkala. Salah satu contohnya pada awal 2011 kami menyelenggarakan acara yang mempertemukan para pelaku desa wisata termasuk perwakilan masing-masing desa dan pokdarwis untuk memberikan wawasan kepariwisataan. Karena pada dasarnya kami sadar bahwa mayoritas masyarakat yang mendiami desa wisata ini adalah orang-orang pertanian yang tentu saja mindsetnya adalah mindset petani bukan mindset seorang pelaku wisata. Dan kami berupaya untuk membekali mereka dengan dasar-dasar pariwisata dan banyak hal lagi yang berkenaan dengan cara-cara untuk mengembangkan desa wisata. Diharapkan dari bimbingan yang diberikan mulai terbentuk mindset sebagai pelaku wisata dan diiringi dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola daerahnya sebagai desa wisata.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Adanya upaya dari Pemerintah untuk mengembangkan kemampuan penduduk desa wisata melalui bimbingan dan binaan juga diakui oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“bimbingan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah tentunya saja memiliki pengaruh positif dalam hal kemampuan penduduk di Desa Wisata. Kan seperti yang saya katakan bahwa mayoritas masyarakat disini mindsetnya ya petani, kami juga bukan orang-orang pendidikan yang tinggi yang memiliki wawasan luas tentang kepariwisataan. Apa yang diselenggarakan oleh dinas tidak hanya pelatihan demi meningkatkan keterampilan tetapi juga ada bimbingan. Seperti yang saya ikuti yaitu tentang kepariwisataan. Darisitu saya semakin paham tentang dasar-dasar pariwisata.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya meningkatkan kemampuan penduduk lokal demi mengembangkan desa wisata diwujudkan melalui bimbingan dan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan wawasan dasar kepada penduduk lokal yang mendiami desa wisata, dimana penduduk lokal tersebut masih memiliki mindset sebagai petani bukan seorang pelaku wisata. Sehingga melalui bimbingan dan pembinaan tersebut masyarakat secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan khususnya dalam upaya mengembangkan desa wisatanya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Dalam Pengembangan Community Based Ecotourism, tentu banyak hal yang menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung ini dapat berasal baik dari Pemerintah maupun masyarakat yang mendiami desa wisata. Berdasarkan wawancara dan data-data pendukung dalam pengembangan Desa Wisata, yaitu :

1. Adanya komitmen yang kuat, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata

Merujuk pada visinya, Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan. Salah satu

objek wisata yang dapat perhatian dari Kabupaten Malang adalah Desa Wisata, yang itu artinya pengembangan desa wisata menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan desa wisata, yang hal itu tertera dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Komitmen yang kuat juga dari pemerintah ditunjukkan melalui upaya yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk mengembangkan desa wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Liswan Nobiyana T.ME selaku Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Pemberdayaan masyarakat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bahwa :

“pemerintah berusaha untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada, salah satunya adalah desa wisata. Desa wisata ini menjadi suatu alternative wisata yang memiliki keunikan tersendiri. Kan selama ini orang melihat Malang identik dengan Jatim Park, BNS, padahal banyak desa wisata yang patut untuk dikunjungi. Terlebih lagi desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang masih sangat alami dan dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu pemerintah memiliki komitmen yang kuat bagaimana caranya untuk memajukan desa wisata. Kepala Dinas pun semangat untuk memajukan desa wisata. Beliau selalu mengingatkan agar kami terus memaksimalkan segala upaya baik dari segi infrastruktur dan SDM agar desa wisata dapat menjadi lebih baik dan semakin dikenal wisatawan.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengembangkan desa wisata juga sejalan yang dikatakan Ibu Lani Masruro sebagai Kabid Pengembangan Destinasi Wisata bahwa :

“kami berupaya semampu kami untuk membantu masyarakat desa wisata untuk mengembangkan daerahnya. Salah satu contohnya adalah saya pernah memberikan kontak para *travel agent* dan melakukan kerjasama agar dapat mempromosikan desa wisatanya. Intinya pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka agar desa wisatanya dapat

berkembangan dan menjadi lebih baik.” (hasil wawancara pada tanggal 8 februari 2018 di dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen dari pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tidak hanya sekedar tertuang dalam RPJMD tetapi juga terwujud dalam upaya yang dilakukan oleh segenap staff dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan desa wisatanya masing-masing. Pemerintah dalam hal ini tidak menjadi satu-satunya pihak yang berkomitmen untuk mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat yang mendiami daerah tersebut juga memiliki komitmen yang kuat baik dalam menggali potensi, mengelola, maupun mengembangkan.

2. Pemberitaan Media Massa

Kiprah Kabupaten Malang sebagai Kabupaten dengan beragam potensi wisata ternyata sudah dikenal tidak hanya dalam skala regional tetapi juga secara nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang menyorot potensi wisata di Kabupaten Malang, salah satunya desa wisata. Ternyata pemberitaan tersebut menjadi promosi dengan pengaruh yang besar, karena dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia secara luas. Ketertarikan yang tinggi dari media massa tersebut sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul bahwa:

“kami sering kedatangan tamu dari media, baik yang sekitar Malang Raya, Provinsi bahkan media nasional, terutama dari TV. Kami senang sekali jika ada media yang meliput, kan hal itu bisa menjadi ajang promosi juga untuk desa kami. Dari media itu akhirnya banyak sekali wisatawan yang datang, bahkan dari luar pulau. Mereka takjub sekali

dengan desa wisata yang ada di Pujon Kidul ini. Mungkin di kotanya tidak ada desa wisata dengan potensi yang alamiah ini. Setelah saya Tanya dapat info desa wisata ini darimana? Mereka menjawabnya dari siaran TV nasional. Terkadang tamu-tamu daerah dan Kementerian pun sering berkunjung ke desa kami.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di Kelurahan Pujon Kidul)



Gambar 6. Pemberitaan dari Televisi

Sumber : diolah peneliti

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemberitaan dari media, terutama media nasional memberikan pengaruh yang positif bagi pengembangan desa wisata. Dari pemberitaan terjadilah aktivitas promosi dengan lingkup yang luas, yakni nasional. Sehingga pemberitaan tersebut dapat menarik minat wisatawan yang bahkan berasal dari luar pulau. Dengan semakin banyaknya

orang yang melihat pemberitaan tersebut maka semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan ke desa wisata, oleh karena itu masyarakat semakin termotivasi untuk mengembangkan desa wisatanya.

b. Faktor Penghambat

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana di Desa Wisata

Dalam pariwisata, sarana prasarana menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting. Begitu juga terkait dengan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang awalnya adalah lingkungan asli tempat masyarakat tinggal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa desa wisata merupakan pemukiman yang tentu di dalamnya terdapat sarana prasarana wisata yang memadai. Sebenarnya masalah sarana prasarana telah menjadi tanggung jawab dari pemerintah melalui Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tetapi pada realitanya sarana prasarana yang dibangun masih tergolong minim. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Badur selaku anggota pengelola desa wisata pujan kidul, bahwa:

“salah satu hambatan dalam pengembangan desa wisata ini ya kurangnya sarana prasarana yang memadai. Pemerintah hanya baru membangun gapura, lahan parkir untuk wisatawan. Akses ke desa kami masih tergolong susah ketika wisatawan lagi ramai ramainya karena jalan yang sempit. Diluar itu kami masih butuh sarana-sarana seperti jalan paving ataupun aspal yang baik menuju desa wisata kami.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujan)



Gambar 7.

Parkir dan Akses Menuju Desa Wisata Pujon Kidul

Sumber : diolah peneliti

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih tergolong minim hanya sebatas aksesibilitas. Sarana prasarana lainnya seperti pos informasi masih rencana. Ternyata pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mendapat respon yang lamban sehingga sampai saat ini belum ada tindak lanjut secara maksimal.

2. Rendahnya kemampuan masyarakat Pujon Kidul dalam hal Manajemen Potensi Wisata

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa wisata pujon kidul adalah masyarakat yang kesulitan dalam hal manajemen potensi wisata yang ada di daerahnya. Masyarakat pujon kidul di dominasi oleh petani dan tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan yang cukup handal untuk mengelola segala potensi yang ada di daerahnya menjadi suatu daya tarik wisata. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak oleh Bapak Badur selaku selaku anggota pengelola desa wisata pujon kidul, bahwa:

“kelemahan kami memang dalam hal manajemen. Untuk masyarakatnya sebenarnya sudah mendukung diselenggarakannya desa wisata ini, Cuma ya kami sadar bahwa kemampuan masyarakat masih tergolong rendah untuk mengelola potensi yang ada disini. Karena masyarakat sendiri belum paham tentang manajemen dan dasar-dasar pariwisata sendiri, ya namanya juga *basicnya* masih petani, jadi ya pengembangan wisata ini masih menjadi hal yang asing. Dan pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada sosialisasi tapi kita harus menjelaskan kembali ke masyarakat agar lebih paham dan mengerti.” (hasil wawancara pada tanggal 5 februari 2018 di café sawah pujon)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan manajemen dan dasar-dasar pariwisata masih kurang.

Hal itu disebabkan karena pada dasarnya masyarakat pujon kidul bekerja sebagai petani sehingga masih asing dengan konsep pariwisata.

B. Analisis Data

1. Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang

Ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) merupakan suatu pariwisata yang lahir dari konsep ekowisata. Merujuk pada definisi dari *World Conservation Union* (WCU) dalam Nugroho (2011:15) mengemukakan bahwa ekowisata adalah perjalanan wisata yang lingkungan alamnya masih asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal. Ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) muncul sebagai konsep yang mengedepankan aspek sosial dari konsep ekowisata. Konsep ini merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki partisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata. Hal ini sejalan dengan pendapat Denman (2001:2), bahwa *“The term community based ecotourism take this social dimension a stage further. This is a form of ecotourism where the local community has substantial control over, and involvement in, it’s development and management, and a major proportion of the benefits remain within the community”*. (konsep ekowisata berbasis masyarakat mengambil dimensi sosial selangkah lebih jauh. Hal ini

merupakan bentuk dari ekowisata dimana masyarakat lokal memiliki control secara substansial dan keterlibatan di dalamnya, baik itu dalam pengembangan dan manajemen, serta memiliki proporsi yang besar dari keuntungannya). Dalam penelitian ini desa wisata dianggap sebagai salah satu destinasi wisata yang menggunakan konsep ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Ecotourism) karena desa wisata menjunjung keaslian dari lingkungan dari alamiah dan dikelola oleh masyarakat setempat yang mendiami desa tersebut. Dalam melakukan pengembangan, terdapat beberapa aspek, yaitu :

a. Pemasaran yang spesifik

Aspek pertama dalam pengembangan desa wisata adalah pemasaran. Menurut Santon dalam Basu Swasta dan Irawan (2003:5) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dalam bidang pemasaran, dikenal istilah bauran pemasaran, yakni 4P *product, price, place, dan promotion*. Aspek pertama dalam pemasaran adalah *product*. *Product* berkaitan dengan barang yang dijual ke customer, yang dalam hal ini adalah berbagai potensi yang ditawarkan oleh masyarakat desa wisata. Dalam aspek ini, masyarakat desa juga menjadi aktor tunggal dalam penentuan dan pengelolaan aspek *product*. Pada dasarnya potensi yang ada di desa wisata sudah ada sebelum desa yang bersangkutan mencanangkan dirinya sebagai desa wisata. Itu artinya pertanian dan peternakan telah ada sejak lama dan menjadi lapangan pekerjaan masyarakat setempat. Sehingga dapat dikatakan bahwa

product yang dijual di desa wisata bukanlah program buatan dari pemerintah melainkan memang telah menjadi lingkungan alamiah di desa wisata yang bersangkutan. Pengelolanya pun dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa wisata setempat.

Aspek kedua dari pemasaran adalah *price* yaitu berkaitan dengan besaran harga yang ditujukan untuk suatu paket wisata. Dalam hal ini masyarakat yang menjadi satu-satunya pihak yang menentukan dan mengatur harga paket-paket wisata di masing-masing desa wisata. Sayangnya belum ada regulasi yang mengatur mengenai kesetaraan harga di masing-masing desa wisata, sehingga terkadang terjadi perang harga sesama pemilik usaha di suatu desa wisata. Hal ini dapat menjadi masukan bagi perangkat desa atau pihak dari kecamatan untuk melakukan intervensi dengan membuat regulasi agar terjadi kesetaraan harga dan tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam desa wisata yang bersangkutan.

Aspek ketiga dalam bauran pemasaran adalah *place*. *Place* berkaitan dengan distribusi. Menurut Koetler (2008:48), distribusi meliputi aktivitas perubahan dalam membuat produknya tersedia di target pasar. Strategi pemilihan tempat meliputi transportasi, pergudangan, pengaturan persediaan, cara pemesanan bagi konsumen. Selain itu distribusi juga berkaitan dengan pemilihan lokasi, persediaan, transportasi dan juga logistik. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengatur aspek *place* karena mereka merupakan masyarakat yang telah lama mendiami desa wisata yang tentu saja sangat mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di lokasi, hanya saja pemerintah juga turut

berperan yakni dalam hal akses, transportasi serta cara pemesanan bagi konsumen yang sering dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Aspek keempat adalah *promotion*. *Promotion* berkaitan dengan pemasaran. Promosi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata “*Pro*” dan “*Movere*”. *Pro* berarti maju *Movere* berarti bergerak. Jadi promosi maknanya adalah membuat sesuatu tampak terbuka dan hidup senantiasa (Effendy 1986). Promosi merupakan suatu kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang sesuatu yang dijadikan bahan promosi agar khalayak merasa tertarik atau bertambah informasinya. Berdasarkan pendapat Koetler dan Keller (2009:512), bauran komunikasi pemasaran promosi terdiri atas tujuh cara komunikasi, yaitu :

1. *Advertising*
2. *Sales promotion*
3. *Public relation and publicity*
4. *Direct marketing*
5. *Personal selling*
6. *Word of mouth marketing*
7. *Event and experiences*

Dalam pengembangan desa wisata, pemasaran yang digunakan salah satunya melalui pembuatan brosur yang langsung memperlihatkan potensi masing-masing desa wisata, *guide book*. Itu artinya salah satunya cara yang digunakan dalam pemasaran ini adalah *advertising*. Cara *advertising* ini dilakukan oleh

pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui *website*, baik dari *website* resmi pemerintah maupun blog yang dibuat oleh masyarakat desa yang bersangkutan. Pemasaran melalui *website* tergolong dalam cara *direct marketing*. Tidak hanya dengan cara *advertising* dan *direct marketing*, pemasaran juga dilakukan pemerintah yang dapat melalui forum pertemuan atau pameran yang diadakan oleh pemerintah yang dapat diistilahkan dengan *public relation and publicity*. Cara lain yang digunakan adalah *word of mouth*, yakni mempromosikan dari mulut ke mulut, dimana dalam hal ini staf-staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupaya untuk memasarkan desa wisata baik di lingkungan pergaulan, keluarga, dan pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemasaran yang spesifik menuju desa wisata dilakukan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan mengenai empat aspek dalam pemasaran tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat menduduki peran yang sentral, itu artinya telah terjadi suatu pemberdayaan masyarakat di dalam pemasaran desa wisata, dimana masyarakat yang berperan secara dominan dalam pemasaran, baik dari segi produk, harga, distribusi dan promosi, sedangkan pemerintah hanya membantu dan bertindak sebagai fasilitator. Sayangnya dari keempat faktor tersebut pemerintah harus benar-benar melakukan intervensi terkait dengan aspek harga yang disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur tentang kesetaraan harga. Bagaimana pun pemerintah desa juga pemerintah yang bersangkutan harus mulai mengatur patokan harga agar tidak terjadi perang harga antar sesama pelaku wisata, karena pada dasarnya desa wisata berpijak pada keterlibatan dan peran aktif

masyarakat desa sehingga seharusnya tidak boleh terjadi persaingan yang tidak sehat sesama masyarakat desa yang dapat membuat situasi pengembangan desa wisata menjadi tidak kondusif karena salah satu tujuan dikembangkan ekowisata adalah untuk mengerakkan aktivitas ekonomi pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata ini juga masih memerlukan adanya regulasi dan pembagian tugas yang baik antara perangkat desa maupun perangkat desa lainnya agar informasi yang disampaikan sesuai dengan harapan mereka serta perlunya kerja sama antara media massa dengan desa terkait agar tetap ada terpublikasi secara berkelanjutan.

b. Keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung

Aspek kedua dalam pengembangan desa wisata adalah keterampilan dan layanan secara intensif kepada pengunjung. Masyarakat desa wisata sebagai tuan rumah dan penyelenggara wisata tertentu harus memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pariwisata. Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memberikan pelatihan kepada komponen desa wisata, yang di dalam hal ini adalah Pokdarwis beserta perwakilan desa wisata yang merupakan bekal agar memiliki keterampilan dalam menyuguhkan potensi wisata dan melayani wisatawan. Keterampilan-keterampilan yang diajarkan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh pelaku wisata, seperti contohnya melatih masyarakat desa tentang cara mengelola desa wisatanya, memandu wisatawan, menerjemahkan objek wisatanya dengan sebaik-baiknya. Pelatihan tersebut dilakukan oleh orang-orang yg memang ahli dibidangnya. Pemateri yang didatangkan merupakan pakar dan praktisi

dibidang perhotelan, sehingga dengan di datangkannya tenaga profesional sebagai pemateri dapat dipastikan apabila hal-hal yang diajarkan merupakan materi yang berkualitas. Selain itu peran Pokdarwis dalam peningkatan keterampilan sangatlah penting karena bagaimanapun ia harus bertanggung jawab untuk melakukan transfer pengetahuan dan informasi yang telah di dapatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang kepada masyarakat di desanya.

c. Keterlibatan Masyarakat

Sebagai konsep ekowisata berbasis masyarakat, pendekatan pengembangannya pasti melibatkan masyarakat dengan alasan bahwa sektor pariwisata menyediakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, serta pariwisata dapat menciptakan berbagai keuntungan sosial maupun budaya, serta pariwisata dapat membantu mencapai sasaran konservasi lingkungan (Inskeep dalam Tanaya dan Rudianto 2014:73). Dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, adanya keterlibatan penduduk lokal tentu menjadi pelaku wisata yang mengelola, mengembangkan dan mendapatkan keuntungan finansial dari penyelenggaraan desa wisata. Pada dasarnya masyarakat di desa pujon kidul memiliki peran besar terhadap pengelolaan desa wisatanya. Mereka saling membantu dan bekerja sama antar pelaku wisata serta mempromosikan desa wisatanya. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) juga dapat dikatakan menjadi penggerak pengembangan desa wisata melalui transfer pengetahuan dan informasi. Adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata, mengandung aspek pemberdayaan masyarakat. Merujuk pendapat Prijono Sonny dan Pranaka (1996:55), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya,

mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya, dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Menurut Teguh (2004:82-83), tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam suatu proses pemberdayaan antara lain :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk menghantarkan pada kemandirian

Berkaitan dengan pengembangan desa wisata, ketiga aspek tersebut telah dilakukan pemerintah demi memberdayakan masyarakat di masing-masing desa wisata, termasuk desa pujon kidul. Tahap pertama yakni penyadaran dan pembentukan perilaku dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tentang visi misi Kabupaten Malang yang salah satunya berupaya menjadi kota atau kabupaten pariwisata nasional dan internasional. Dari situ masyarakat sudah mulai mengerti bahwa pariwisata menjadi sektor yang dapat perhatian besar dari pemerintah. Sehingga mulai timbul kesadaran untuk mengembangkan desanya tidak hanya dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam sektor pariwisata. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dengan cara memberikan pembinaan yang di

dalamnya memperkenalkan dasar-dasar pariwisata dan cara-cara mengelola pariwisata. Dari situ mulai terdapat wawasan baru tentang kepariwisataan, khususnya desa wisatanya. Hal tersebut menjadi hal yang penting karena *mindset* masyarakat sebelumnya berbasis pertanian, sehingga pengenalan konsep pariwisata menjadi hal yang mutlak untuk membuka wawasan masyarakat tentang pengelolaan dan pengembangan desa wisata. Sedangkan tahap ketiga adalah peningkatan intelektual, kecakapan, keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengadakan pelatihan secara berkala dengan ragam materi tentang pengembangan desa wisata, seperti cara mengelola desa dan produk unggulannya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya mayoritas petani dapat memiliki keterampilan. Diharapkan melalui ketiga tahap tersebut masyarakat memiliki bekal yang cukup mandiri dalam mengembangkan desa wisatanya.

d. Kebijakan Pemerintah

Pengembangan desa wisata tentu tidak terlepas begitu saja dari peran pemerintah, melainkan menjadi salah satu perhatian dalam sektor pariwisata. Hal tersebut terbukti dengan adanya kebijakan dari pemerintah mengenai pengembangan desa wisata. Merujuk pada jenis atau kategori kebijakan tersebut menurut James Anderson dalam Suharno (2010:24-25), dapat dikatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Malang pengembangan desa wisata adalah kebijakan substansial, karena kebijakan pemerintah Kabupaten Malang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Kebijakan substansial ini berupa visi misi Kabupaten Malang

serta RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang memasukan desa wisata sebagai salah satu perhatian yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Sayangnya hal tersebut dirasa belum cukup mengatur pengembangan desa lingkup kota, padahal juga diperlukan kebijakan yang bersifat regulatori dalam lingkup desa atau kelurahan terkait kesetaraan harga di desa wisata serta mengatur peranan Pokdarwis, karena bagaimanapun juga desa dan kelurahan yang bersangkutan yang menjalankan desa wisata secara langsung.

Solichin Abdul Wahab (2008:40), memberikan beberapa pedoman memahami istilah kebijakan, yakni :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik ekspilisit maupun inplicit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisaisi dan intra organisasi
9. Kebijakan publik mesti tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau di definisikan secara subjektif

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pengembangan desa wisata tertuang dalam visi misi Kabupaten Malang serta dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Berikut merupakan visi misi Kabupaten Malang 2016-2021 :

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Adapun Misi-misi Kabupaten Malang antara lain :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dari visi misi tersebut pemerintah Kabupaten Malang memiliki perhatian khusus dalam hal pariwisata, yang tentu terdapat aspek desa wisata di dalamnya. Demi menjalankan misi no 4 yakni Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, terdapat beberapa strategi terkait dengan pengembangan desa wisata antara lain :

1. Mengembangkan desa atau kelurahan menjadi desa-desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah
2. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pengelolaan wisata untuk desa wisata

Adapun dalam menjalankan misi no 6 yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan, salah satu sasaraannya memiliki keterkaitan dengan pengembangan desa wisata yaitu terwujudnya infrastruktur pariwisata, yang salah satu straginya berupa pembangunan rest area serta akses menuju lokasi wisata. Berkaitan dengan pengembangan desa wisata pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan pengembangan dalam dua hal, yaitu infrastruktur dan Sumberdaya Manusia.

Selain dalam hal pengembangan sarana prasarana serta pengembangan sumberdaya manusia, salah satu kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata atau sering disebut POKDARWIS. Merujuk pada pendapat Rahim (2012:5) sadar wisata digambarkan

sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam dua hal berikut, yaitu :

1. Masyarakat menyadari peran dan tanggung jawabnya sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana dan kondusif sebagaimana yang tertuang dalam slogan Sapta Pesona
2. Masyarakat menyadari hak dan kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air

Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) menjadi kelompok penggerak pariwisata sebagai bentuk kelembagaan secara informal yang dibentuk dari anggota masyarakat (khususnya yang memiliki kepedulian dalam mengembangkan kepariwisataan daerahnya) yang menjadi salah satu unsur pemangku kepentingan dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan serta peran penting dalam pengembangan wisata di daerahnya yang dalam hal ini adalah desa wisata. Pokdarwis dalam konteks pengembangan desa wisata berperan sebagai salah satu penggerak untuk mendukung terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif di desanya.

e. Pengembangan kemampuan penduduk lokal

Adanya pengembangan kemampuan penduduk lokal menjadikan adanya suatu proses pengembangan kapasitas dilingkup masyarakat desa setempat merujuk pada pendapat Ryiadi (2006:15) dimensi pengembangan kapasitas terbagi ke dalam tingkatan, yaitu tingkat individu, tingkat organisasi, dan tingkat sistem.

Pada tingkat individu, *capacity building* ditekankan pada aspek pengetahuan keterampilan, kemampuan dan pengelompokan kerja. Sedangkan pada tingkat organisasi, berkaitan dengan sumberdaya organisasi, budaya organisasi, keterlaksanaan, struktur organisasi dan sistem pengambilan keputusan. Tingkatan akhir adalah tingkatan pengembangan kapasitas pada sistem, dimana seluruh komponen pemerintah termasuk di dalamnya, seperti menyangkut peraturan, serta kebijakan. Apabila merujuk kepada aspek pengembangan kapasitas di desa wisata terjadi di tingkat individu yaitu pengembangan kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan penduduk lokal demi mengembangka desa wisata dilakukan dengan cara pemberian bimbingan-bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk memberikan wawasan secara rutin dan berkala. Bimbingan dan pembinaan tersebut secara bertahap mulai paham mengenai kepariwisataan dan bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang ada di desanya.

Selama ini peserta dari kegiatan bimbingan dan pembinaan ini adalah Pokdarwis dan perwakilan desa wisata. Itu artinya hanya satu atau dua orang yang mewakili desa wisata untuk mendapatkan wawasan tersebut. Hal ini menjadi tidak efektif apabila wakil yang bersangkutan ternyata bukan orang yang diharapkan oleh pemerintah. Mengetahui hal tersebut maka regulasi mengenai tugas dan peran Pokdarwis tingkat kelurahan atau desa sangat dibutuhkan, karena bagaimanapun lingkup kelurahan atau desa yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pengembangan desa wisat, sehingga apabila regulasi tersebut diberlakukan

anggota pokdarwis akan merasa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya di desa wisatanya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat

a. Faktor Pendukung

Dalam pengembangan desa wisata setidaknya dua faktor pendukung, yakni adanya komitmen yang kuat baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, dan pemberitaan dari media massa. Sebagai faktor pertama, terdapat keselarasan antara pemerintah dan masyarakat desa wisata untuk saling berkomitmen mengembangkan desa wisata, tetapi masyarakat desa pun telah memiliki kesadaran dan upaya untuk mengembangkan desa wisatanya. Sehingga pemerintah tidak perlu berupaya keras dalam memotivasi masyarakat. Komitmen yang tinggi dari masyarakat ditunjukkan melalui visi misi Kabupaten Malang serta RPJMD yang memuat poin mengenai pengembangan pariwisata. Tidak hanya itu, staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga aktif dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang ada di desa wisata dengan melakukan pelatihan dan pembinaan secara berkala, serta sering mempertemukan pelaku wisata diluar desa wisata untuk melakukan kerja sama. Di lain pihak, komitmen yang tinggi dari masyarakat terlihat dari inisiatifnya untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak serta memasarkan desa wisatanya melalui *website* ataupun blog dan media sosial lainnya.

Faktor pendukung kedua dalam pengembangan desa wisata adalah pemberitaan media massa. Citra Kabupaten Malang sebagai kota wisata sudah dikenal baik skala regional maupun dalam lingkup nasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya media massa yang memberikan potensi Kabupaten Malang, yang salah satunya adalah desa wisata. Pemberitaan tersebut dilakukan baik dari media cetak maupun televisi. Hal itu membawa dampak yang sangat positif karena melalui pemberitaan itulah terjadi promosi dengan cakupan masyarakat secara luas, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi wisatawan yang berdomisili jauh dari Kabupaten Malang.

b. Faktor penghambat

Dibalik adanya faktor pendukung, tentu terdapat pula faktor-faktor yang menghambat pengembangan desa wisata. Faktor tersebut adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, minimnya pemahaman perangkat desa mengenai desa wisata, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata. Faktor penghambat pertama adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata. Merujuk pada pendapat Budiyanto (2010:38), pengembangan ekowisata salah satunya menyangkut peningkatan sarana dan prasarana penunjang dikawasan wisata. Tetapi pada realitasnya, fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah masih belum memadai bagi aktivitas wisatawan. Sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah hanya sebatas aksesibilitas sedangkan untuk fasilitas umum penting seperti toilet rest area, pos informasi masih belum dibangun. Pengaduan masyarakat belum mendapat tindak lanjut dari pemerintah terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sehingga sampai saat ini untuk pemenuhan

fasilitas masih belum terlaksana secara penuh. Hal tersebut menjadi kesalahan yang vital karena pada dasarnya kegiatan pariwisata harusnya dapat menciptakan kenyamanan dan kepuasan wisatawan, yang salah satunya diperoleh dari adanya fasilitas umum di destinasi wisata. Maka dari itu pemerintah harus memberi perhatian yang lebih intens terkait dengan fasilitas umum yang dibangun di desa wisata.

Faktor kedua adalah rendahnya kemampuan masyarakat pujon kidul dalam hal manajemen potensi wisata. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya masyarakat pujon kidul bekerja dalam sektor pertanian sehingga tidak tahu banyak tentang konsep pariwisata. Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga belum melakukan secara intens kepada masyarakat terkait dengan dijadikannya Pujon Kidul sebagai desa wisata. Akibatnya tidak ada pihak yang secara langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat pujon kidul mengenai bagaimana cara mengelola potensi yang ada. Terlebih Pokdarwis yang diharapkan dapat menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat setempat sekaligus memberikan *transfer knowledge* tidak berperan secara aktif, sehingga pengetahuan dan wawasan yang didapatkan melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintah tidak tersalurkan kepada seluruh masyarakat pujon kidul.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan fokus masalah serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Manajemen Ekowisata Berbasis Masyarakat di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Dalam pengembangan desa wisata terdapat lima aspek yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, keterampilan dan layanan kepada pengunjung secara intensif, keterlibatan penduduk lokal, kebijakan pemerintah, serta pengembangan kemampuan penduduk lokal
2. Sebagai aspek pertama yaitu pemasaran yang spesifik menuju tujuan wisata, hal ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal. Dari segi pemerintah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang membuat brosur yang masing-masing menunjukkan potensi desa wisata lengkap beserta paket wisata, harga dan akomodasi, beserta potensi wisatanya masing-masing serta *guide book* yang memuat informasi wisata beserta paket wisata, akomodasi dan *contact person* yang dapat dihubungi. Selain itu pemerintah juga melakukan promosi desa wisata melalui event-event yang melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Sedangkan dari segi masyarakat, masyarakat desa wisata setempat melakukan promosi dengan membuat blog yang memperlihatkan potensi yang ada di desa wisata beserta paket wisatanya.

Aspek ketiga yakni kebijakan pemerintah dalam mengembangkan desa wisata tertuang dalam visi misi yaitu ingin mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Kebijakan pemerintah juga terlihat dalam RPJMD Kabupaten Malang yakni berusaha mengembangkan desa menjadi desa wisata berdasarkan potensi masing-masing wilayah. Selain itu kebijakan pemerintah dilakukan dengan memberikan sarana prasarana fasilitas kepada masing-masing desa wisata dan bimbingan secara berkala kepada perwakilan desa wisata, serta dengan membuat SK tentang pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang dibentuk sebagai perwakilan desa wisata yang berupaya untuk memberdayakan masyarakat di desanya dan sebagai mediator antara masyarakat desa dengan pemerintah.

Aspek selanjutnya dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan penduduk lokal, dimana masyarakat desa setempat berperan aktif dalam aspek penentuan objek wisata, pengelolaan desa wisata. Aspek terakhir adalah kemampuan penduduk lokal. Peningkatan kemampuan penduduk lokal dilakukan dengan cara yang sama pelatihan dan bimbingan secara rutin dan berkala kepada perwakilan pokdarwis yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

3. Dalam pengembangan desa wisata terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam pengembangan desa wisata antara lain adanya komitmen yang baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengembangkan desa wisata, dan pemberitaan dari media massa. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya sarana prasarana di desa wisata, dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam manajemen potensi wisata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan nantinya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Malang sebaiknya memberikan perhatian yang intens terkait sarana dan prasarana untuk menunjang desa wisata. Sarana prasarana tersebut harus dapat memfasilitasi kepentingan-kepentingan dasar dari wisatawan, seperti rest area, pos informasi dan jalan yang dipaving atau aspal yang baik.
2. Disamping pemberian pelatihan dan pembinaan kepada Pokdarwis dan wakil dari desa wisata akan lebih baik apabila pihak dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang melakukan sosialisasi secara intens mengenai manajemen potensi wisata dan observasi ke desa wisata untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Perlunya pengemasan menarik paket wisata yang berwawasan edukatif dan konservasi bagi para wisatawan sehingga dapat menambah wawasan masyarakat maupun wisatawan dan meningkatnya ekonomi lokal di pujung kidul.
3. Perangkat desa harus mampu membekali diri dengan wawasan mengenai desa wisata agar mampu berperan aktif untuk menggerakkan masyarakatnya dalam pengembangan desa wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascholani, Chasan.. *Membangun Desa Wisata sebagai upaya pengurangan kemiskinan* (<http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20100325101857>)
- Basu Swasta, DH dan Irawan, 2003. *Manajemen pemasaran modern*. Yogyakarta: Liberty
- Darmardjati, RS. 2001. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramit.
- Damanik, Janianton., Webber, Helmut.F. 2006. *Perencanaan Ekowisata*
- Daryanto, Endri. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Denman, 2001. *Community based Development Planning*. John Willey, and Sons, Inc.
- Fandeli, Chafid., dan Nurdin, Muhammad. 2005. *Pengembangan Ekowisata*
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Erlangga
- Haris Sutan Lubis, 2008. "Prinsip-prinsip Ekowisata"
- Koetler, dan Keller. 2009. *Manajemen pemasaran* Edisi 13
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Muljadi, A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Muriawan, Agus Putra. 2006. *Konsep Desa Wisata*. *Jurnal Manajemen Pariwisata*. Vol. 5 No. 1. Hal 72
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Iwan. 2011. "Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pendit, Nyoman Suwandi. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Cetakan Kelima Pradnya Paramita. Jakarta. Hal. 71
- Pitana, I Gede, Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Priasukmana, Soetarso., Dan R. Mohammad Mulyadin. 2001. *Info sosial ekonomi pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Vol. 2 No. 1 (2001) pp.37-44

- Sastrayuda, Gumelar S. (2010) *Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure*
- Sammeng, Andi. Mappi. 2001. *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta : Balai Pustaka
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Spillane, James J. 1987. *Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Tjahja Supriatna, 2000. *Pembangunan Desa*. Gramedia Pustaka
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Bandung : Angkasa
- Wahab, Yoeti, Oka A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metedeologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

